

DINAMIKA

**POLITIK
NASIONAL**

**PASANG SURUT HUBUNGAN
KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perubahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DINAMIKA
POLITIK
NASIONAL

**PASANG SURUT HUBUNGAN
KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

Dr. Ujang Komarudin, M.Si

Untuk Dua Pahlawanku
(alm) Marwi Natsir dan (almh) Komariah
Untuk Dua Bidadariku
Istriku Siti Lia Nurdiah dan
Mamahku Hj. Enah Herlina
Untuk Dua Jagoanku
Raden Kholid Raja Daud, dan
Sultan Muhammad Al-Fatih

DINAMIKA POLITIK NASIONAL

Pasang Surut Hubungan Kekuatan Politik di Indonesia

Copyrights @2017 oleh Dr. Ujang Komarudin, M.Si

Editor: M.R. Muchlis

Desain Sampul: M.R. Muchlis

xiv+190 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-7936-45-4

ENLIGHTS

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Eightyeight@Kasablanka Lantai 35

Jalan Casablanka Raya Kav.88, Jakarta 12870

Telepon 021.80640526

Email: info@enlights.co

www.enlights.co

Indonesia Political Review (IPR)

De Salim Townhouse

Jalan H. Salim No.132 Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Email: ipoliticalreview@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi Kata Pengantar

vii
xii

BAB 1 PILKADA DKI JAKARTA 2017

1. Kaderisasi Bisa Hilang Kalau Parpol Calonkan Kader Luar di Pilkada 2
2. Calon Kepala Daerah Kudu Bikin Kontrak Politik Dengan Rakyat 4
3. Parpol Diminta Tak Mencalonkan Kader yang Terseret KKN 6
4. Perlu Debat Publik Supaya Rakyat Bisa Lihat Kualitas Pasangan Calon 8
5. Sebulan Jelang Pilkada DKI, Kondisi Politik Makin Panas: Survei Bikin Bingung, Warga Bisa Apatis dan Golput Bengkak 10
6. Maju Melalui Jalur Parpol, Ahok Dinilai Tak Konsisten 13
7. PDIP Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI, Pengamat: Itu Skenario Besar 14
8. Kepala Daerah Wajib Klarifikasi Rekomendasi Dugaan Korupsi Dari DPRD 15

BAB 2 AHOK DAN DINAMIKA PARNAS DI DKI JAKARTA

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Karakter Emosional Ahok Merugikan Golkar | 18 |
| 2. | Golkar Bersiaplah Dikecewakan Ahok | 19 |
| 3. | Golkar: Ahok Ditekan Kok PDIP Diam Saja | 21 |
| 4. | Mega Tak Ikut Kampanye PDIP Tidak Serius Menangkan Paslon Ahok-Djarot? | 23 |
| 5. | IPR: Jangan-jangan, Ahok Mau Di-Atut-kan PDIP | 25 |
| 6. | Ini Kata Pengamat Soal Silang Pendapat Internal Golkar Terkait Dukungan ke Ahok | 27 |

BAB 3 PILKADA 2017 DALAM SOROTAN PENGAMAT

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Dilirik PAN Untuk Maju di Pilgub Jatim 2018 Mantan Menhub Pasti Sulit <i>Ngalabin</i> Gus Ipul & Risma | 30 |
| 2. | Pilkada Aceh: Ulama Tak Natral, Rawan Gesekan | 32 |
| 3. | Artis Tetap Jadi Pendulang Suara Di Pilgub Jawa Barat | 34 |
| 4. | Konstelasi Politik Pilgub Jabar 2018: Istri Aher Bakal Jadi Rebutan Para Kandidat Calon Gubernur. | 37 |
| 5. | Didukung Nasdem, Ridwan Kamil Kemungkinan Masuk Jebakan | 40 |
| 6. | Konstelasi Pilgub DKI Jakarta 2017 Jokowi Dan JK Terbelah | 41 |
| 7. | Pengrusakan Atribut Calon Kepala Daerah Bisa Menyulut Konflik | 43 |
| 8. | Gaet Pemilih Pemula, Calon Kepala Daerah Manfaatkan Medsos | 45 |

BAB 4 PEMERINTAH DAN PARTAI TERBELAH DALAM PILKADA

1. Lebaran Kurban Tidak Boleh Dirusak Politik Transaksional 48
2. Pengamat Ingatkan Setnov Tak Ulangi Kesalahan Pendahulu 50
3. Siswono Gabung ke NasDem, Partai Golkar Kembali Ditinggalkan Seniornya 52
4. Nurdin Ketua Mahkamah Golkar, Masalah *Cincai* 53
5. Gerindra Sindir Kubu Djan Faridz Carmuk Ke Jokowi 54
6. Indonesia Harus Mencetak Habibie-Habibie Muda untuk Masa Depan Bangsa yang Cemerlang 56

BAB 5 KONTESTASI MENUJU PEMILU 2019

1. Anies-Sandi Menang Posisi Prabowo Makin Kuat Di Pilpres 2019 58
2. Ketidakjelasan *Reshuffle* Akan Berdampak pada Tidak Kondusifnya Kondisi Ekonomi dan Politik 60
3. Soal *Reshuffle* Kabinet Jilid II 61
4. Suara Golkar Belum Tentu Naik Meski Dukung Jokowi dan Ahok 62
5. Anies Wins, Warning for Jokowi in 2019 Presidential Election? 69
6. Anies Menang, Peringatan bagi Jokowi di Pilpres 2019? 70

BAB 6 SERBA-SERBI INDONESIA

1. Penangkapan Putu Sudiartana Kembali Coreng DPR 74
2. Jokowi Didesak Ganti Nusron Wahid 75
3. Tito Karnavian Dipilih Untuk Amankan Pemilu 2019 76

| | | |
|----|--|----|
| 4. | Maraknya Pekerja RRC di Indonesia Bagian dari Imperium China Raya | 77 |
| 5. | Ini Kata Pengamat Soal Kudeta Gagal di Turki | 79 |

BAB 7 DEMOKRASI SISTEM YANG TAK SEMPURNA

| | | |
|----|----------------------------------|-----|
| 1. | Demokrasi | 82 |
| 2. | Demokrasi dan Keadilan | 87 |
| 3. | Demokrasi dan Para Pengkritiknya | 98 |
| 4. | Demokrasi <i>ala</i> Rousseau | 101 |
| 5. | Dilema Demokrasi | 108 |
| 6. | Kelemahan Demokrasi | 112 |
| 7. | Model-Model Demokrasi | 117 |
| 8. | Perkembangan Demokrasi | 120 |
| 9. | Rezim Non Demokrasi | 126 |

BAB 8 MEMBANGUN INDONESIA YANG BERMARTABAT

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Sisi Gelap Demokrasi | 130 |
| 2. | Mencari Ujung Drama Ahok vs BPK | 133 |
| 3. | Sengkarut Data Kementerian | 136 |
| 4. | <i>Quo Vadis</i> Munaslub Beringin | 139 |
| 5. | Refleksi Hari Lahirnya Pancasila | 143 |
| 6. | Menyoal UU Pemilu | 147 |
| 7. | Menagih Janji Nahkoda Baru Partai Golkar | 151 |

BAB 9 PRO KONTRA

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Pro-kontra Perppu Kebiri | 156 |
| 2. | Menyoal Revisi UU Pilkada | 159 |
| 3. | Menanti Sepak Terjang Tito Sebagai Kapolri | 163 |
| 4. | Maju Mundur <i>Reshuffle</i> Kabinet | 167 |
| 5. | Birokrasi yang Tak Kujung Rapi | 170 |

BAB 10 PENUTUP

Penutup 176

Daftar Pustaka 179



KATA PENGANTAR

Dr. Ujang Komarudin, M.Si

PUJI syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas anugerah dan karunia-Nya buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Semoga dapat memberi warna dan kebaikan bagi Indonesia.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Manusia paling berpengaruh di dunia. Semoga kita dapat meneladani kehidupan beliau.

Buku ini merupakan buku referensi yang membahas tentang politik nasional dan lokal DKI Jakarta, Pilkada Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dll.

Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan Pilkada yang paling sengit dan menarik sejak DKI Jakarta berdiri. *Incumbent* Ahok-Djarot dapat ditumbangkan oleh pendatang baru Anies-Sandi yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS. Dan merupakan sejarah yang berulang, di mana pada Pilkada 2012, *incumbent* Foke-Nara juga dikalahkan oleh pendatang baru Jokowi-Ahok.

Penulis juga mengamati perpolitikan nasional, terkait dengan isu Pemilu, partai politik, demokrasi, keadilan, reshuffle, korupsi, dll. Tujuannya adalah agar perpolitikan nasional menjadi lebih beretika dan mengedepankan nilai-nilai kesantunan, kejujuran dan persatuan.

Terima kasih kepada para *endorser* yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membuat testimoni sehingga

buku ini menjadi buku yang berbobot, menarik, dan layak untuk menjadi referensi.

Terima kasih untuk Kang Ridwan, yang telah banyak membantu proses pembuatan buku ini. Saya ucapkan *Jazakumullah khairon katsiro*.

Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi penulis. *Amin yaa robbal 'alamin*.

Depok, 30 Oktober 2017

Ujang Komarudin

A stylized, grey-toned bird logo, possibly a Garuda, is positioned in the upper right quadrant of the page. The bird is depicted in profile, facing right, with its wings partially spread. The design uses various shades of grey to create a sense of depth and shadow. The background of the entire page is a light grey gradient, with a white curved shape on the left side that frames the text.

BAB SATU

Pilkada DKI Jakarta 2017

Kaderisasi Bisa Hilang Kalau Parpol Calonkan Kader Luar di Pilkada

CALON kepala daerah dari kader internal partai bisa jadi akan hilang. Hal ini karena partai politik lebih senang mencalonkan atau memberikan perahunya ke calon eksternal yang berpotensi menang di pilkada. “Fenomena partai berbondong-bondong mengajukan calon kepala daerah di luar kadernya merupakan bagian strategi pragmatis untuk menang pilkada. Justru ini bahaya buat partai itu ke depannya. Ini menghilangkan kaderisasi kader partai”. Kader muda partai yang mumpuni dan berprestasi tak akan dapat menikmati manisnya kekuasaan, jika tak dapat restu dari pimpinan partai (Chairiyah dan Komarudin, 2019).

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merilis partai-partai yang mencalonkan kader asli pada pilkada 2015. Pada posisi pertama ditempati Partai Golkar dengan 24 kader, PDIP 20 kader, Demokrat 5 kader, PAN 4 kader, Hanura 3 kader, Nasdem 1 kader, PKS 1 kader, Gerindra 1 kader, PPP 1 kader, dan PKB, PBB serta PKPI tidak ada kader asli yang memenangkan pilkada 2015.

Ujang menyebutkan, hasil penelusuran JPPR harusnya jadi acuan agar parpol bisa lebih gencar melakukan pendidikan politik kepada kadernya agar muncul pemimpin daerah dari internal mereka. “Kalau lebih banyak calon eksternal bisa bahaya bagi parpol,” tegasnya.

Ujang menjelaskan, banyak alasan yang disampaikan parpol mengenai calon eksternal yang mereka dukung. Calon eksternal dinilai memiliki survei cukup bagus untuk menang sehingga calon dari internal tidak dicalonkan.

“Yang pasti, calon non-kader memiliki kelebihan dari kader partai itu sendiri. Misalnya lebih bagus dari sisi popularitas dan elektabilitas, memiliki basis finansial yang kuat, dan memiliki basis

masa real. Tapi dampaknya akan membuat fungsi partai semakin melemah dalam melahirkan kader potensial dalam pilkada,” jelasnya.

Karena itu, parpol sebaiknya mencalonkan kader asli internalnya. Kader internal harus diberikan kesempatan untuk bisa maju dalam pilkadadan parpol tidak berpikir pragmatis dengan mengusung calon dari eksternal. []

Calon Kepala Daerah Kudu Bikin Kontrak Politik dengan Rakyat

KEPALA daerah terpilih dalam perhelatan pilkada sering kali melupakan janji politiknya kepada masyarakat. Sering kali apa yang dilakukannya bertolak belakang dengan keinginan masyarakat. Agar janji-janjinya saat kampanye bisa dijalankan, maka perlu dibuat aturan hukum, yakni kontrak politik. Ketika melenceng dari kontrak politik itu, kepala daerah terpilih bisa dilengserkan.

“Harusnya setiap kepala daerah membuat kontrak politik dengan rakyatnya secara formal bermaterai. Dengan materai, kontrak politik akan jadi dokumen negara yang kuat dan berlandasan hukum. Jika melenceng dari kontrak itu, kepala daerah bisa diturunkan”. Kontrak politik asalnya berangkat dari teori kontrak sosial JJ. Rosseaou, menurutnya negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial (Rousseau, 1986). Begitu juga dengan calon kepala daerah. Dia terpilih bisa saja hasil dari perjanjian politik dengan masyarakat.

Sekarang ini ada kontrak politik, namun faktanya tidak berkekuatan hukum karena tidak bermaterai. Artinya, kalau sang kepala daerah melenceng dari kontrak politik, maka masyarakat tidak bisa berbuat banyak.

“Beda kalau bermaterai kontrak politiknya, jika suatu saat nanti kepala daerah ingkar janji, bisa digugat secara hukum dan kemungkinan bisa dilengserkan”.

Seluruh calon kepala daerah jika disodorkan kontrak politik bermaterai pasti akan takut dan menolak. “Secara hukum kontrak politik itu akan kuat. Walau secara politik akan sulit. Paling tidak landasan hukum kontrak politik atau janji politik menjadi lebih kuat”.

Politik bukan masalah hitam putih dan tegas seperti hukum. “Bisa saja, ketika rakyat menggugat, kepala daerah terpilih

membayar penggugat sehingga terjadi perdamaian. Ini jadi masalah di Indonesia”.

Meski demikian, Ujang berharap, KPU perlu membuat aturan kontrak politik bermaterai agar jadi dokumen negara yang berkekuatan hukum.

“Perlu ada kontrak politik bermaterai agar ada pengikat janji politik. Sekarang ini, pilkada itu adalah uang. Uang masih jadi penentu menang atau tidaknya calon kepala daerah, sedangkan janji politik hanya sekedar janji kosong saja.”[]

Parpol Diminta Tak Mencalonkan Kader yang Terseret KKN

PARTAI politik harus bertanggungjawab jika dalam penyodoran nama-nama calon kepala daerah masih melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kita ini sedang dalam masa transisi menuju demokrasi lebih baik. Seharusnya, kader-kader terlibat KKN tidak dimajukan parpol sebagai calon. Sebab partai adalah penyaring utama kepemimpinan yang bersih dan akuntabel”.

Harus diakui, partai politik sampai sekarang belum baik dalam hal menyaring calon pemimpin yang akan diusung dalam pilkada. “Itulah keresahan demokrasi. Siapa pun bisa mencalonkan diri, termasuk terlibat KKN tanpa disaring secara ketat oleh partai. Ini tidak sehat buat demokrasi”. Saat ini, partai hanya melihat siapapun yang dianggap memiliki kedudukan strategis dan modal finansial kuat tanpa melihat latar belakang masalah hukum akan didukung. Sebaliknya, yang tidak memiliki itu semua akan ditolak. “Seolah-olah, dalam demokrasi Indonesia, setan gundul pun bisa didukung dan terpilih. Itu pun adalah konsekwensi undang-undang yang membolehkan mereka maju”.

Melalui partai-partai politik itulah sejumlah posisi jabatan di pemerintahan dan parlemen akan diisi. Sebagai sumber produksi dan reproduksi kekuasaan menjadikan partai politik diminati banyak kalangan, khususnya bagi mereka yang ingin berkuasa (Nurhasim, 2013).

Sudah saatnya partai kembali jadi lembaga yang melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Caranya dengan selektif melakukan pengkaderan dan regenerasi kepemimpinan sehat.

“Sebenarnya, yang menyaring agar tidak terjadi KKN dalam pencalonan adalah partai. Kalau kaderisasi dan regenerasi berjalan baik tentu partai harus memberi jalan kepada orang-orang hebat

untuk diberi kesempatan mencalonkan diri di pilkada. Bukan karena ayahnya adalah pimpinan partai, anggota DPR atau mantan kepala daerah di wilayah sama, lantas orang itu dicalonkan”.

Sistem baik, harus dibangun sehingga fungsi-fungsi partai berjalan dengan baik pula, termasuk pencalonan di pilkada. “Agar tidak terjadi KKN, partai mesti membangun merit sistem. Jadi siapa yang berprestasi, dia lah kan dicalonkan”.

Pilkada tidak terlepas dari berbagai kepentingan elite lokal dalam mencalonkan diri atau dicalonkan partai. Akibatnya, penguasa partai politik di daerah kerap membuka terjadinya transaksi politik, bahkan memungkinkan terjadinya nepotisme dalam pencalonan kepala daerah.

“Masyarakat kita sangat sensitif dengan isu-isu nepotisme apalagi korupsi dan kolusi. Wajar jika ada calon yang terindikasikan KKN, pemilih akan jengah dan positioning partai untuk investasi politik di Pemilu 2019 nanti akan jeblok.” []

Perlu Debat Publik Supaya Rakyat Bisa Lihat Kualitas Pasangan Calon

DEBAT publik dalam pilkada serentak dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sebagai panduan dalam memilih siapa yang layak jadi pemimpin daerah.

“Debat publik diperlukan untuk melihat kualitas pasangan calon (paslon). Memang terlalu absurd jika melihat kualitas calon hanya dari debat publik. Tapi. Paling tidak, debat publik akan memberikan gambaran umum tentang visi, misi, dan program kerja paslon ketika terpilih nanti”. Meski demikian sayangnya, debat publik yang diselenggarakan dalam pilkada serentak 2015 lalu belum jadi sumber referensi pemilih untuk menentukan pilihannya.

“Debat publik belum jadi referensi rakyat untuk memilih. Ini cuma memberikan pendidikan politik saja. Banyak faktor rakyat dalam memilih, salah satunya money politics. (Politik uang) ini harus diberantas dan dihilangkan di pilkada tahun depan. Debat publik harusnya jadi faktor dominan untuk memilih kepala daerah. Tapi kenyataannya, kekuatan finansial, masih dominan saat ini”.

Dalam UU Pilkada memang tidak diwajibkan ada debat publik. Sebagai penyelenggara pilkada, KPU tentu memiliki kewajiban menghasilkan pilkada berkualitas, salah satunya menggelar debat publik. “Jika KPU sudah mewajibkan, tidak akan ada paslon kepala daerah membangkang. Di negara maju, justru debat publik jadi sesuatu fundamental. Tapi, debat publik di negara kita masih sekedar pendidikan politik dalam rangka mencerdaskan rakyat. Justru, aroma politik uang masih kuat di negara kita”.

Saat ini ada aturan baru dalam rancangan peraturan yang disiapkan KPU. Yakni semua paslon wajib mengikuti debat antar kandidat. Debat publik menjadi penting karena debat merupakan bagian dari kampanye. Seperti diketahui bahwa kampanye dalam pilkada memiliki bobot penyampaian visi, misi, dan program oleh pasangan calon atau tim kampanye (Zuchron, 2017).

Bagi paslon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon dikenai dua jenis sanksi. Pertama, KPU mengumumkan kepada publik bahwa pasangan calon itu menolak mengikuti debat. Kedua, jatah iklan di media massa elektronik bagi pasangan calon itu dikurangi sebanyak 50 persen dari jumlah sisa iklan di media massa.

“Penerapan sanksi ini kita lakukan karena berdasarkan evaluasi pilkada serentak 2015 terdapat pasangan calon tidak bersedia ikut debat.”[]

Sebulan Jelang Pilkada DKI, Kondisi Politik Makin Panas Survei Bikin Bingung, Warga Bisa Apatis dan Golput Bengkak

KONDISI politik makin memanas sebulan jelang Pilgub DKI. Hasil survei Pilgub DKI Jakarta yang dirilis sejumlah lembaga survei beberapa waktu lalu, menimbulkan pro kontra dan membingungkan masyarakat. Hal ini bisa membuat warga apatis dan golput makin tinggi. Diketahui, sebulan jelang Pilgub DKI digelar, sejumlah lembaga survei mengeluarkan rilis hasil surveinya. Hasil survei itu berbeda-beda. Ada yang memenangkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Ada pula yang menempatkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Ahok-Djarot sebagai pemenang.

Beberapa lembaga survei, seolah-olah ada kesan, lembaga survei ini berafiliasi dengan masing-masing calon di Pilgub DKI. “Survei muncul belakangan ini bisa membahayakan dan membuat publik bingung. Dan yang paling berbahaya adalah masyarakat akan semakin apatis dan mengarah ke golput”. Seharusnya jelasnya, survei jadi bahan dan pedoman masyarakat dalam melihat calon di DKI. Tapi dengan survei itu, semuanya jadi sumir, seolah ada kesan survei saling mengunggulkan calon jagoannya masing-masing.

“Di setiap pilkada, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. Ini berkaitan dengan legitimasi calon saat terpilih nantinya. Jika survei kesannya cuma menjagokan calon tertentu, yang jadi rusak pilkada”. Semua lembaga survei jangan sampai tersesat dengan kepentingan pasangan calon. Sehingga nilai akademisnya jadi rusak. “Ada baiknya masyarakat tidak disuguhi dengan hasil survei membingungkan bahkan mengarahkan pemilih untuk memilih paslon tertentu. Ini berbahaya. Bayangkan, hasil survei dari tiga lembaga survei kesemuanya berbeda. Masing-masing memenangkan salah satu paslon. Apa ini tidak membuat bingung masyarakat”.

Agar masyarakat tidak bingung, maka perlu dilakukan sosialisasi politik. Sekaligus juga menjelaskan kepada masyarakat, agar turut berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres, ikut pengawasan dalam proses pencoblosan di TPS, berpartisipasi mencegah ketidakadilan dan kecurangan dalam Pilkada dan Pemilu, ikut serta secara aktif mencegah penggiringan publik dengan membentuk opini publik (Umar, 2018).

Hasil lembaga survei yang berbeda dan cenderung mengarahkan pada kemenangan calon tertentu bisa menyumbangkan angka golput di Pilgub DKI. “Saya kira survei ini membuat bingung masyarakat dan bisa meningkatkan jumlah golput. Bagi masyarakat yang paham tentang manipulasi-manipulasi lembaga survei akan menghilangkan harapan di pilkada DKI”. Perlu diingatkan agar masyarakat jangan percaya dengan lembaga survei yang digunakan calon tertentu. “Sebelum membuat masyarakat apatis, malas dalam berpartisipasi di pilkada tentunya lembaga survei memberikan pendidikan. Bukan memberikan rilis hasil survei untuk kemenangan calon tertentu. Saat ini, kesannya membangun opini”.

Tidak ada satupun hasil survei mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap satu paslon gubernur dan wakil gubernur tertentu. “Hasil survei berbeda-beda bukan hanya sekarang, hampir disemua pilkada. Tidak ada lembaga survei berhasil mempengaruhi pemilih untuk mengubah pilihannya”. Lembaga survei harus mengungkap hasil penelitiannya secara jujur. Sehingga hasil survei itu tidak menimbulkan polemik. “Kalau dapat data untuk elektabilitas, langsung itu disebut elektabilitas saja. Kalau dapat dari proses tidak akan memilih pasangan tertentu, ya harus disebutkan”.

Hal paling besar dapat mengubah pendirian pemilih adalah kampanye dari tiap-tiap kandidat. Kampanye lebih besar pengaruhnya ketimbang hasil survei. Meski demikian, tak menampik bahwa tidak sedikit pula pihak-pihak yang menggunakan

hasil survei untuk menggiring sebuah opini. Hal semacam itu perlu perlu dihindari. “Karena itu bukan fungsi sebenarnya khittah dari survei.”[]

Maju Melalui Jalur Parpol, Ahok Dinilai Tak Konsisten

KEPUTUSAN yang diambil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju Pilgub DKI 2017 melalui jalur Partai Politik merupakan bentuk inkonsistensi secara politik. “Ahok merupakan politisi yang tidak konsisten. Pagi dia mengatakan ingin Maju melalui jalur independen, siang dia bilang maju melalui parpol”.

Meski menyadari bahwa Partai Politik itu merupakan pilar demokrasi dan tanpa Parpol demokrasi tidak akan berjalan. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif (Suhelmi, 2001), dalam konteks demokrasi, inkonsistensi yang ditunjukkan Ahok tersebut sangat berbahaya secara politik.

“Inkonsistensi Ahok itu sangatlah berbahaya jika dibawa ke ranah politik. Karena politik harus memiliki karakter yang baik, yakni karakter yang bisa dicontoh oleh rakyatnya”. Kemudian, berkaitan dengan nasib Teman Ahok yang sudah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok, bahwa teman Ahok akan digunakan sebagai alat back up jika mesin Parpol tidak Jalan.

Sementara itu, secara umum di kalangan masyarakat pun tidak menimbulkan dampak yang merugikan Ahok. “Justru menguntungkan Ahok. Secara politik punya dua keuntungan, pertama didukung oleh Parpol dan kedua memegang kendali atas teman Ahok”.

Sebagaimana diketahui, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya memutuskan untuk maju Pilgub DKI 2017 melalui jalur parpol. Ahok memutuskan jalur parpol di saat Teman Ahok, yang jadi relawan pendukungnya sudah berhasil mengumpulkan dukungan 1 juta KTP untuknya.

PDIP Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI, Pengamat: Itu Skenario Besar

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Selasa (20/9/2016) malam, mengumumkan mengusung secara resmi pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai cagub dan cawagub untuk Pemilukada DKI Jakarta 2017.

Keputusan PDIP mengusung Ahok-Djarot merupakan pilihan pragmatis. Pilihan tanpa ideologis. Namun sangat realistis. “Itu pilihan yang pragmatis dan realistis,” dukungan partai berlambang kepala banteng itu tidak berdiri sendiri, namun memiliki skenario besar di balik itu. “Itu skenario besar”.

Jika kemudian pasangan Ahok dan Djarot terpilih pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang merupakan jembatan untuk agenda politik yang lebih besar lagi yaitu pemilu 2019. “Ada kemungkinan, misalnya bila kemudian Ahok terkena kasus hukum atau Maju sebagai Wapres di Pemilu 2019, Maka Djarot yang Kader PDIP akan menjadi Gubernur DKI”.

Untuk diketahui, Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat saat ini telah resmi mendaftar ke KPU DKI. Berkas pendaftaran mereka selanjutnya akan diproses oleh KPU DKI. []

Kepala Daerah Wajib Klarifikasi Rekomendasi Dugaan Korupsi dari DPRD

REKOMENDASI dugaan korupsi akan membahayakan banyak pihak bila tidak ada suatu bentuk di klarifikasi terbuka. Hal tersebut dikarenakan bilamana digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dipergunakan sebagai alat untuk menuduh orang lain yang bersalah untuk melakukan Tindak pidana korupsi.

“Rekomendasi haruslah diklarifikasi dan dijawab sesegera mungkin, karena bilamana hanya didiamkan begitu saja, dugaan tersebut bisa menjadi kuat ke arah tindak pidana korupsi”. Selama masih berupa rekomendasi dalam bentuk dugaan, sekiranya masyarakat tidak boleh memvonis seorang kepala daerah bersalah. Hal ini dikarenakan bagaimanapun Indonesia masih menganut unsur prinsip praduga tidak bersalah.

Meskipun kepala daerah tersebut tidak boleh langsung divonis bersalah, orang nomor satu di wilayah pimpinannya tersebut harus transparan dan terbuka untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Jika masih indikasi kepala daerah jangan langsung divonis, namun meskipun belum divonis kepala daerah tersebut harus terbuka dan adil sebagai pemimpin daerahnya”. Seperti diketahui bersama Indonesia saat ini sedang marak rekomendasi oleh Ketua DPRD masing-masing daerah yang mengungkap indikasi penyelewengan anggaran atau bahkan kritikan wanprestasi program kepala daerah masing-masing.

DKI dan Maluku Tenggara menjadi dua wilayah yang menjadi sorotan saat ini akan perkara tersebut. Masyarakat berharap penyelesaian akan rekomendasi tersebut kiranya dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya masyarakat ditipu karena kepala daerah tersebut terbukti mencuri uang rakyat. []



BAB DUA

**Ahok dan Dinamika Parpol
di DKI Jakarta 2017**

Karakter Emosional Ahok Merugikan Golkar

MUNDURNYA kader Golkar dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) buntut dari pernyataan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama yang melukai umat muslim perlu dihargai. “Itu langkah yang harus dihargai, perlu disadari sikap Ahok itu bisa sangat merugikan Golkar. Bahkan saat ini beberapa tokoh Golkar sibuk mengklarifikasi pernyataan Ahok tersebut walaupun Ahok sudah meminta maaf” (Izad, 2017 :171-190).

Seperti dijelaskan, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi dan Energi Terbarukan, Dedy Arianto resmi mengundurkan diri dari kepengurusan pusat partai beringin. Keputusan ini diambilnya karena Golkar tetap mendukung petahanan Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama di Pilkada Jakarta 2017, walau pernyataannya sudah melukai hati masyarakat.

Mundurnya kader Golkar tersebut, karena Golkar seolah melanggar motonya sendiri yakni Suara Golkar Suara Rakyat. Golkar Harus mendengar suara dari Kader Muda Partai dan rakyat, kalau masih mau mengusung moto Suara Golkar Suara Rakyat. Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan tidak bermakna. Karena terkadang hanya menjadi jargon politik bagi partai.

Wajar jika elektabilitas Ahok-Djarot kian hari kian merosot dan pada bulan Februari nanti akan semakin parah. “Penurunan suara Ahok - Djarot bukan karena PDIP, tetapi karena karakter pribadi Ahok yang emosional dan sebagaimana Kader Golkar mungkin sudah menganggap Ahok - Djarot pasti akan kalah”.

Ternyata tidak hanya internal Golkar saja yang meminta Golkar keluar dari koalisi Ahok- Djarot, tapi dari Relawan juga melontarkan desakan yang sama. Karena politik itu dinamis, setiap saat bisa berubah. Jadi tidak heran jika nanti Golkar akan berpaling dari Ahok apalagi ada desakan dari dalam dan dari luar. []

Golkar Bersiaplah Dikecewakan Ahok

PARTAI Golkar harus belajar banyak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra jika ingin mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Sebab, kedua partai itu lebih tahu bagaimana karakter Ahok yang mengkhianati.

Sah-sah saja jika Golkar mendukung Ahok. Tapi, harus lihat, bagaimana Ahok berkhianat dan keluar dari Partai Gerindra yang sudah berjasa mengantarkannya sebagai pendamping Jokowi sebagai wakil Gubernur DKI. Golkar harus meminta komitmen kuat dari Ahok, karena bukan tidak mungkin Ahok akan melakukan hal sama kepada Golkar seperti dilakukan kepada Partai Gerindra. Golkar harus siap dikecewakan Ahok pasca didukung di Pilkada 2017. Ini pernah terjadi ketika Partai Gerindra mengusungnya di Pilgub DKI 2012.

Saat ini, menurut Ujang, memang sedang terjadi silang pendapat di internal Golkar seakan faksi dan sisa konflik di partai berlambang beringin itu belum sepenuhnya selesai. Harusnya Golkar satu suara dalam memutuskan sesuatu dan harus didahului dengan rapat internal agar tidak terjadi silang pendapat.

Sebuah partai besar tidak dibenarkan masing-masing person atau kader berbicara atas dasar persepsi pribadi dengan membawa institusi partai. Harus diputuskan berdasarkan mekanisme internal partai, jangan main asal ceplos dukung Ahok. Keputusan DPD Partai Golkar DKI Jakarta terkesan terburu-buru mendeklarasikan mendukung Ahok sebagai calon gubernur.

Meski demikian, Ujang melihat langkah Partai Golkar mendukung adalah langkah realistis. Sesuatu wajar, karena Ahok memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan dengan calon lainnya. Jadi intinya, Golkar mendukung calon yang diprediksi akan menang. Sebelumnya, Partai Golkar secara resmi memberikan surat

keputusan dukungan kepada Ahok sebagai cagub DKI 2017. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi memberikan surat keputusan dukungan DPP Golkar kepada Ahok di Kantor DPD I Golkar DKI, Jalan Pegangsaan, Menteng, Jumat (24/6).

Saat menyerahkan surat itu, Fayakhun mengatakan, ada beberapa alasan akhirnya partai pohon beringin itu mendukung Ahok. Fayakhun mengatakan, sembilan anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI siap bekerja sama dengan Ahok untuk membangun Jakarta dan program kerja Pemprov. “Saya cuma meminta satu hal dengan sungguh-sungguh, mohon Pak Ahok bikin bagus dan benahi kota Jakarta,” kata Fayakhun.

Dukungan Golkar kepada Ahok diputuskan pada Musda DPD Golkar DKI. Selain Golkar, ada dua partai lain yang mendukung Ahok. Yakni Partai Hanura (10 kursi) dan Nasdem (5 kursi). Totalnya, Ahok mengumpulkan 24 kursi dukungan di DPRD DKI Jakarta (Asriandi, 2016). []

Golkar: Ahok Ditekan Kok PDIP Diam Saja

KEBERADAAN Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam tim kemenangan pasangan Ahok-Djarot dipertanyakan kader Partai Golkar. Pasalnya, ketika Ahok mengalami tekanan berat justru Partai Golkar mati-matian membelanya. Padahal PDIP sebagai Ketua Tim Kemenangan Ahok-Djarot (Permadi, 2018 : 1-6).

Ketika gelombang reaksi penolakan Ahok muncul begitu deras, akibat penistaan agama Islam, justru Golkar, melalui Nusron Wahid mati-matian membela Ahok. Sementara pengurus atau kader PDIP sepi dan diam saja dari pembelaan kepada Ahok. Bahkan Wakilnya Djarot pada satu kesempatan, justru menegur Ahok. Padahal posisi Tim Sukses saat ini diambil alih PDIP.

Melihat fenomena Ahok, Golkar, dan PDIP saat ini. Terlihat terdapat kesan setelah PDIP resmi mengusung Ahok, Golkar sangat terlihat ‘dikecilkan’ makna dan posisinya secara politik. Bahkan, ketika Golkar mati-matian membela Ahok atas kasus penistaan agama, membuat posisi Golkar semakin tidak positif di mata publik dan membahayakan Golkar di 2019. Antipati terhadap Ahok yang sudah meluas secara nasional, saat ini diiringi pula dengan antipati terhadap Nusron. Nusron dan Golkar sekarang diposisikan sebagai kelompok berusaha membenarkan kesalahan Ahok.

Ahok saja sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf, tapi Nusron dan Golkar tetap ngotot dan memaksakan seolah tidak ada yang salah. Bila hal ini terus berlangsung, saya khawatir akan berkembang pula menjadi antipati terhadap Golkar. Apalagi tagline Golkar selama inikan “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Kalau mayoritas masyarakat sudah menolak Ahok, lantas untuk apalagi dasar Golkar tetap mempertahankan Ahok.

Hal senada dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Dia menyebutkan PDIP seolah

mencoba mendulang keuntungan dari sikap diamnya membela Ahok atas masalah yang dideranya. Ada persaingan antarpartai di dalam tim pemenangan Ahok-Djarot. Selama ini, memang PDIP tidak pernah ketemu dengan Golkar dan selalu saling berhadapan atau saling bertarung. Masih segar dalam ingatan kita di mana PDIP saat belum menetapkan dukungannya terhadap Ahok. Kader-kadernya sering melontarkan komentar pedas terhadap bekas Bupati Belitung Timur itu. Di mana posisi PDIP sebelum dukung Ahok semua orang tahu, bahkan PDIP gencar menyerang Ahok. Setelah masuk tentu mereka (PDIP) akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau ikut jadi buruk. Ini terlihat dari sikap diamnya PDIP.

Ada sejarah panjang pula dimana PDIP selalu senang jika Golkar tidak menjadi pemenang nomor 1 dari pemilu ke pemilu terlebih PDIP pernah sakit hati kepada Golkar ketika jatah Ketua DPR yang harusnya didapat PDIP karena memenangkan Pemilu 2014 justru diambil Golkar, dengan cara merubah UU MD3.

Bahkan, yang masih hangat adalah ketika Golkar bermanuver mendukung Jokowi sebagai Capres 2019 tanpa syarat dihadapan Mega dalam Rapimnas I Golkar, beberapa waktu lalu. Dengan kondisi ini, PDIP tentu tidak tinggal diam. Di Pilkada DKI, partai besutan Megawati ini menyodok dii akhir masa pendaftaran untuk mendukung Ahok-Djarot. Lalu, mengusur Ketua Tim pemenangan dari Golkar, diambil alih kader PDIP.

Karena itu, sudah saatnya Golkar sadar dan mencari formulasi tepat agar masyarakat tidak keburu mencap negatif partai berlambang pohon beringin ini. Golkar jangan sampai kecolongan, karena sebenarnya PDIP adalah musuh dalam selimut yang nyata dan kejam dalam politik. []

Mega Tak Ikut Kampanye PDIP Tidak Serius Menangkan Paslon Ahok-Djarot?

TIDAK ‘turun gunungnya’ Megawati berkampanye memenangkan pasangan calon (paslon) *incumbent* Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memunculkan banyak komentar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, tak ikut berkampanyenya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menunjukkan, partai banteng moncong putih ini tak serius mendukung pasangan nomor urut 2 Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.

Kelihatannya PDIP seolah tidak serius mendukung Ahok-Djarot. Padahal, hampir semua ketum partai turun tangan menangkan jagoannya, sedang Megawati kok nggak turun gunung. Atau PDIP takut partainya anjok di Pemilu 2019. Tidak hadirnya Mega dalam kampanye Ahok-Djarot mungkin disebabkan pasangan *incumbent* ini sedang dirundung banyak masalah, terutama kasus dugaan penistaan agama yang menyeret, Ahok, bekas Bupati Belitung Timur.

Padahal pada persaingan Pilkada DKI 2017 saat ini sudah semakin ramai. Bahkan sejumlah ketua umum partai ‘turun gunung’ ikut kampanye dengan pasangan calon yang diusungnya. Misalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir dalam pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu (Sanjaya dkk, 2017: 149-155).

Kemungkinan PDIP nggak mau kalau Mega turun nanti malah kena imbas yang membuat perolehan suara PDIP di Pemilu 2019 anjlok. Sebelumnya, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, menyebutkan, Megawati tak akan ‘turun gunung’ ikut kampanye memenangkan pasangan Ahok-Djarot, meski semua ketum partai berjuang memenangkan jagoannya di Pilgub DKI. Eva berkilah, urusan memenangkan paslon Ahok-Djarot sudah dilakukan kader

PDIP lainnya. Sehingga apa yang dilakukan ketum partai lain terhadap jagonya tak dilakukan Megawati.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, kehadiran ratusan ribu kader PDIP sudah mewakili peran Mega dalam memenangkan pasangan calon petahana itu. Sebab, kata dia, kader PDIP sudah dididik untuk bekerja keras memenangkan calon baik dalam pilkada ataupun pemilu.

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Sandiaga Uno mengungkapkan, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan turun berkampanye memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI.

Bahkan, menurut Sandiaga, hal itu merupakan permintaan langsung dari Prabowo untuk turun ke lapangan memenangkan pasangan calon yang diusung Gerindra dan PKS itu. Hal itu diungkapkan Sandiaga bersama Anies saat bertemu Prabowo di kediaman orang tua Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2016. []

IPR: Jangan-jangan, Ahok Mau Di-Atut-kan PDIP

BASUKI Tjahaja Purnama dinilai menjadi tiket gratis bagi PDI Perjuangan untuk mendapatkan kursi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Meskipun saat kampanye terjadi penolakan, elektabilitas cagub incumbent ini masih tertinggi dan berpeluang terpilih kembali. Namun, penolakan itu bisa menjadi alasan untuk melengserkan Ahok di periode selanjutnya. Itung-itungan politiknya, jika Ahok lengser tentu saja wakilnya Djarot Saiful Hidayat yang secara otomatis naik sebagai gubernur.

PDI Perjuangan seperti dapat durian runtuh dari situasi sekarang ini. PDI Perjuangan tidak begitu mati-matian membela Ahok menghadapi warga yang menolak. Ini masalah waktu aja, PDIP cerdik dan bisa mengambil keuntungan dari situasi yang ada.

Strategi PDI Perjuangan ini bisa dibaca dari pengalaman di Banten. Saat itu, kasus korupsi yang menjerat Ratu Atut Choisyah akhirnya berhasil menjadikan kader PDI Perjuangan Rano Karno sebagai gubernur. “PDIP seolah hanya terus memoles Djarot, sedang Ahok terjerembab dibiarkan, jangan-jangan mau di-Atut-kan. Tapi yang jelas PDIP jadi dapat durian runtuh kalau Ahok mundur atau dimundurkan (berhalangan tetap). Terlebih, dari awal pencalonan sangat jelas terlihat PDI Perjuangan memang terlihat sangat berambisi menginginkan kadernya sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan, penolakan warga ini bisa menjadi alasan bagi PDI Perjuangan untuk menjungkalkan Ahok jika kelak terpilih lagi.

Itungan politis mereka mungkin Ahok tak akan bertahan lama dengan serangan ketidaksukaan masyarakat kepadanya. Dari inilah kemudian akan dibuat skenario untuk melengserkan Ahok dan menaikkan Djarot. Ahok dalam suatu kesempatan pernah mengakui ada pihak yang mendorongnya untuk mundur dari pencalonan, karena dianggap akan terus membuat suasana tidak kondusif. Ahok menekankan, dia tidak akan mundur dari

pencalonan gubernur. Dia dengan tegas mengatakan, lebih baik menjadi tersangka dan dipenjara dibanding mundur dari pilkada (Aqsa, 2017). []

Ini Kata Pengamat Soal Silang Pendapat Internal Golkar Terkait Dukungan ke Ahok

SEBUAH Partai yang besar tidak dibenarkan masing-masing person atau kader berbicara atas dasar persepsi pribadi. Harus diputuskan berdasarkan mekanisme internal partai. Kemudian, keputusan DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang buru-buru mendeklarasikan calon gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dinilainya tidak elok. Tidak elok DPD Partai Golkar DKI sudah deklarasi mendukung Ahok, karena harus menunggu keputusan DPP.

Namun demikian, Ujang tetap mengapresiasi langkah Partai Golkar DKI Jakarta mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok tersebut. Sesuatu yang wajar, karena Ahok memiliki elektabilitas paling tinggi jika dibandingkan dengan calon lainnya. dan dianggap akan menang menjadi Gubernur yg kedua kalinya. Jadi intinya, Partai Golkar mendukung yang akan menang,” terangnya.

Sebelumnya, Plt. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Yorrys Raweyai sudah mendeklarasikan dukungan Golkar kepada Ahok. Namun, dukungan tersebut belum direstui oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia menyatakan bahwa surat tersebut belum diterima dan akan disampaikan ke DPP lalu dirumuskan bersama dewan pembina sebagaimana AD ART (Aqsa, 2017). []



BAB TIGA

Pilkada 2017 dalam Sorotan Pengamat

Dilirik PAN untuk Maju di Pilgub Jatim 2018 Mantan Menhub Pasti Sulit *Ngalahin* Gus Ipul dan Risma

MANTAN Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diprediksikan sulit mengalahkan kandidat calon seperti Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma di Pilgub Jawa Timur 2018. Saat ini, Gus Ipul dan Risma jadi icon Jatim (kompas.com).

Untuk membaca peta politik di Jatim tidaklah sulit, karena dengan cukup terang menderang siapa yang bisa mendekati hati santri dan kiai maka akan mudah memenangkan pertarungan politik di sana.

Jawa Timur itu kota Santri. Jadi Jonan dipastikan tidak akan bisa mengalahkan Risma ataupun Gus Ipul di Pulgub Jatim 2018. Sebagai bekas menteri, Jonan merupakan salah satu sosok populer. Hanya saja, untuk mengalahkan figur kepala daerah di Jatim sangat sulit. Partai yang akan mengusung Jonan juga harus realistis melihat peta politik di Jatim, meski Jonan memiliki popularitas yang cukup baik.

Pilihan yang mungkin dilakukan Jonan bersanding dengan Risma dan Gus Ipul. Dengan formasi seperti ini dia bisa saja menang. Senada diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Pangi mengatakan, jika benar Jonan bakal di usung Partai Amanat Nasional tentu hal itu terlalu berisiko dan akan menghasilkan kekalahan.

Jonan sulit untuk bisa menangkan Pilkada Jatim, karena walaupun dia sukses membuat perkeretaapian kita, tapi prestasinya tidak muncul dan terkesan biasa-biasa saja saat menjadi Menhub. Selain itu, yang membuat Jonan bakal sulit menang Pilgub Jatim adalah karena kemarahan warga Jawa Timur terkait insiden Tol Brexit. Warga Jawa Timur marah juga ketika beliau terlambat mengucapkan minta maaf kepada korban tragedi Brexit

Sebelumnya, DPP PAN melirik mantan Menhub Ignasius Jonan sebagai kandidat yang layak maju pada Pilgub Jatim 2018. Jonan memang sangat menarik dan layak menjadi salah satu alternatif kandidat untuk calon pemimpin di Jatim. Jonan yang baru di-reshuffle Presiden Jokowi ini dikenal mampu membalikkan keadaan dari negatif menjadi positif. “Bukti saat dia sebagai Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sudah menunjukkan bagaimana kualitas dan kemampuan Pak Jonan saat memimpin.

Selain itu, faktor layaknya Jonan tampil sebagai kandidat adalah putra daerah karena dibesarkan dan menempuh pendidikan lama di Surabaya. Kendati demikian, partainya memiliki mekanisme dan aturan saat memilih seorang kandidat untuk dimajukan di pilkada. Salah satu pertimbangan yang menjadi pengaruh bagi PAN, adalah hasil survei karena dinilai merupakan representatif serta mewakili masyarakat setempat.

Calon yang diusung harus sejalan dengan PAN, terutama kader eksternal atau dari luar partai. Tapi bagaimanapun juga, kader internal menjadi pilihan utama. Ada tiga nama kader internal layak maju dan jadi penguasa Jatim. Yakni, Bupati Bojonegoro Suyoto, mantan Bupati Lamongan Masfuk, dan artis sekaligus anggota DPRAnang Hermansyah. Kalau di kader eksternal selain Jonan, nama Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) jadi alternatif dan diperhitungkan karena pengalaman dan kualitasnya memimpin.[]

Pilkada Aceh: Ulama Tak Netral, Rawan Gesekan

SEJUMLAH kalangan menilai, Pilkada Aceh tahun 2017 masih rawan gesekan atau konflik. Hal ini disebabkan konstelasi politik dan gesekan antar calon dan pendukung calon cukup kuat. Bukan itu saja. Fakta lain mengungkapkannya ulama di Provinsi berjudul Serambi Mekkah ini juga terbelah sehingga lapisan bawah jadi ikut-ikutan (Bappenas, 2017).

Harusnya ulama netral di Pilkada Aceh seperti PNS, TNI dan Polri. Kalau TNI dan Polri mengamankan dari sisi fisiknya sedangkan ulama mengamankan dari spiritualnya. Gesekan tentu tidak bisa dihindari jika ulama yang seharusnya sebagai penyejuk suhu politik di pilkada Aceh malah ikut-ikutan mendukung salah satu pasangan calon.

Di Aceh, tentu memiliki banyak ulama yang bisa membawa kesejukan dan kedamaian dalam pilkada. Hendaknya mereka bisa jadi penengah dan memberikan panduan bukan ajakan untuk memilih calon tertentu dalam Pilkada Aceh. Dikhawatirkan ulama tidak netral dan lebih dekat dengan duniawi akan hilang kepercayaannya dari masyarakat. Apalagi Aceh penduduknya sebagian besar adalah beragama Islam.

Ulama bisa tetap pada khitahnya memberikan panduan-panduan kepada masyarakat termasuk bagaimana cara memilih pemimpinnya. Masyarakat tentu akan mengikuti bagaimana sikap ulamanya, lebih baik ulama netral dan tetap pada jalan benar saja. Senada diungkapkan wakil Ketua Ikatan Pelajar Aceh Timur (IPPAT) Riandani. Ulama dan santri di Aceh harus bersikap netral pada pilkada Aceh 2017. Kondisi keberpihakan kepada salah satu calon pada pilkada Aceh 2017 sangat tidak bagus dan akan merusak kesucian ulama dan santri itu sendiri. karena ulama itu ibarat “bunganya” ummat ketika musim semi.

Apabila orang sedang sakit melihat ulama, meski tak menyembuhkan paling tidak akan meringankan. Begitu juga apabila orang fakir melihatnya dia merasa menjadi kaya dan menjadikan dia sebagai tempat menuntut ilmu dalam meluruskan kemaslahatan ummat. []

Ramalan Direktur Eksekutif IPR: Artis Tetap Jadi Pendulang Suara di Pilgub Jawa Barat

CALON Kepala Daerah dengan latar belakang Artis masih dibutuhkan di Pilgub Jawa Barat 2018. Artis masih dianggap mampu mendulang suara. Diprediksi, perang artis bakal terjadi di Pilgub Jabar 2018. Demikian Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Ketika Ahmad Heryawan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jabar. Saat pertama kali maju, Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan menggandeng artis Dede Yusuf yang juga politisi Partai Demokrat.

Lima tahun kemudian, Aher pecah kongsi dengan Dede Yusuf, yang mencalonkan sendiri. Saat Pilgub Jabar itu, Aher menggandeng Deddy Mizwar, artis sinetron. Hasilnya, pasangan Aher-Deddy Mizwar mampu mengungguli lawan-lawannya.

Kondisi ini, harus dimanfaatkan betul bagi setiap calon yang ingin maju di Pilgub Jabar tahun depan. Dia mengaku, figur akan tetap menjadi hal terpenting dalam meraih kemenangan. Sebab masyarakat Jabar senang dengan sosok pemimpin populer, gagah, ganteng atau cantik, memiliki moral dan akhlak bagus.

Jadi, artis secara umum jadi vote getter atau pendulang suara. Orang Sunda terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik, begitu pula laki-lakinya ganteng-ganteng. Makanya, keberadaan artis dalam pilkada Jabar tidak bisa dipisahkan. Mereka bisa jadi pendulang suara.

Kemenangan Aher dua kali berturut-turut itu harus menjadi catatan di Pilgub Jabar. Makanya, tidak mengherankan jika dunia keartisan jadi dambaan masyarakat Jabar. Masyarakat Jabar menyukai publik figur seperti Dede Yusuf dan Deddy Mizwar.

Karena itu, lanjut Ujang untuk menarik simpati masyarakat Jabar dibutuhkan publik figur seperti artis. Menurutnya, Artis memiliki kelebihan lebih cepat dikenal dan diketahui masyarakat bawah.

Saat ini, sejumlah kalangan artis muncul sebagai kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018. Sebut saja, Dede Yusuf, Deddy Mizwar, Desy Ratnasari, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka, Primus Yustisio dan banyak lainnya.

Tapi, ingat artis juga bukan sembarang artis. Artinya, artis yang berimajinasi baik, berperas cantik atau ganteng, memiliki jiwa sosial tinggi, dan rajin menjalankan ibadah. Masyarakat Jabar tentu lebih senang dengan artis cerdas. Pilkada Jabar nanti akan terjadi perang artis. Setiap calon yang maju tentu akan menggagah artis sebagai pedampingnya atau cawagub. Jabar akan menjadi tempat pertarungan para artis sebagai calon wagub.

Jika Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi atau istri Gubernur Jabar, Netty Ahmad Heryawan ingin maju Pilkada Jabar perlu memikirkan untuk menggandeng artis sebagai wakilnya. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Rico Marbun menuturkan, dalam sejarahnya, dua kali pemilihan gubernur-wakil gubernur Jabar selalu dimeriahkan sederetan artis. Pilgub Jabar 2008 misalnya, ada nama eks aktor laga Dede Yusuf yang mendampingi calon gubernur Ahmad Heryawan. Pasangan Aher-Dede Yusuf puna terpilih sebagai gubernur-wakil gubernur Jabar 2008-2013. Tahun 2013, kembali sederetan artis kembali mewarnai Pilgub Jabar. Dede Yusuf maju sebagai calon gubernur bersama Lex Laksamana.

Selain itu, ada Rieke Dyah Pitaloka sebagai cagub PDIP. dan Deddy Mizwar mendampingi Ahmad Heryawan. Akankah Pilgub Jabar 2018 muncul sederetan artis lagi? Rico mengatakan, fenomena artis di pentas pilkada adalah sesuatu lumrah. Hanya saja, menjual sisi keartisan saja tak akan laku di Jabar. Memang sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur, seorang artis memiliki nilai lebih.

Keuntungan calon kepala daerah dari kalangan artis atau menggandeng artis sebagai cawagubnya, ibarat seperti start balapan motor GP. Artinya selalu start di posisi terdepan. Dalam konteks pilkada ini terjadi karena calon dari artis punya popularitas atau

tingkat pengenalan lebih unggul ketimbang kandidat lainnya. Tapi, saat ini jadi artis populer bukan jaminan bisa menang pilkada. Ada dua hal penyebab popularitas artis tak relevan di pilkada. Pertama, faktor kompetensi.

Bila populer namun tidak kompeten atau tidak sesuai keinginan publik, lambat laun publik juga emoh memilih sehingga tetap saja yang ideal untuk Jawa Barat menurut saya bukan hanya artis. Tapi gabungan antara artis-politisi atau artis-kepala daerah. Jadi menjual keartisan saja tidak akan cukup laku,” pungkasnya. []

Konstalasi Politik Pilgub Jabar 2018 Istri Aher Bakal Jadi Rebutan Para Kandidat Calon Gubernur

KONSTALASI politik jelang Pilgub Jawa Barat (Jabar) makin hangat. Sejumlah kandidat bermunculan memanas pesta demokrasi di Tanah Pasundan itu. Netty Prasetyani, istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan diprediksi jadi primadona para calon di Pilgub Jabar 2018 (Poltracking, 2018).

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. Diketahui, jelang Pilgub Jabar 2018, sejumlah kandidat calon gubernur mulai bermunculan. Sebut saja, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Wagub Jabar Deddy Mizwar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Politisi Partai Demokrat yang juga mantan Wagub Jabar Dede Yusuf, anggota DPR dari PAN Desy Ratnasari, politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka, politisi Golkar Nurul Arifin, istri Gubernur Aher Netty Prasetyani dan masih banyak lainnya. Nama istri Gubernur *incumbent* Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan bakal jadi rebutan para kandidat calon Gubernur Jabar. Kata Ujang, Netty bisa diperebutkan untuk menjadi calon wakil gubernur.

Sebagai istri Gubernur Jabar, Netty bisa mendulang suara bagi pasangannya. Apalagi diketahui, Aher dapat dibilang sebagai Gubernur memiliki kinerja cukup bagus memimpin Jabar selama 10 tahun. Tidak salah kalau istrinya diincar untuk menjadi calon wakil gubernur. Istri Aher memang sedang jadi bintang. Karena kabarnya sedang diperebutkan banyak calon Gubernur Jabar 2018 sebagai calon Wakil Gubernur Jabar. Selain dikenal sebagai istri Gubernur *incumbent*, Netty juga seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang cukup mengakar di Jabar. Bisa saja dia akan didukung PKS dan Gerindra jika nanti mampu digandeng. Istri Aher sangat diuntungkan karena Aher merupakan Gubernur

berprestasi dan memiliki pengaruh cukup besar di Jabar. Sebagai Gubernur Aher banyak memberi bantuan kepada kepala desa di seluruh Jabar. Baik berupa peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD), maupun bantuan sepeda motor untuk operasional kepala desa.

Banyak anggapan kalau istri Aher tentu akan meneruskan program-program pro rakyat tersebut. Karena itu, jika ada calon bisa menggandeng istri Aher, kemungkinan partai seperti PKS dan Gerindra akan mendukung. Belum lagi popularitas Aher akan meningkatkan elektabilitas calon yang bersama istrinya itu. Yang pasti jika Netty dipinang, maka Aher akan turun memenangkan pasangan itu.

Sebelumnya, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini dinilai pantas bertarung di Pilgub Jabar 2018. Hasil kajian dari Research for Political Regeneration Organization (Repro) Indonesia, menyebutkan, Helmy Faishal layak ikut Pilkada Jawa Barat 2018 karena merupakan salah satu putra daerah lahir di Cirebon. Jawa Barat sangat memerlukan figur berpengalaman leadership yang tangguh dan teruji. Helmy layak karena memiliki pengalaman di eksekutif, karena pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) periode 2009-2014 (Adnan, 2018)

Selain pernah jadi menteri, Helmy dinilai punya beberapa pengalaman cukup menunjang yakni pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2014-2019. Helmy dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PBNU periode 2015-2020 dan memiliki latar belakang keluarga santri yang merepresentasikan sebagai muslim moderat. Adnan menilai, poin-poin itu sangat cukup sebagai modal Helmy bertarung di Pilkada Jabar 2018. Helmy Faisal juga merupakan aktivis dan tokoh muda Sunda yang berkiprah di tingkat pusat. Dikatakan demikian, karena Helmy Faisal setelah menyelesaikan S1 di Universitas Daarul Ulum Jombang, pada

tahun 1996 hijrah ke Jakarta untuk ikut dalam barisan proreformasi. Sementara, Hasim menilai Desi Ratnasari merupakan figur cocok untuk berpasangan dengan Helmy. Kecocokan itu berdasarkan representasi dari dua wilayah yang akan saling memperkuat. Helmy Faisal representasi wilayah pantura Jawa Barat, sementara Desi Ratnasari representasi wilayah Selatan. []

Didukung Nasdem, Ridwan Kamil Kemungkinan Masuk Jebakan

PEMINAT calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Jawa Barat 2018 hendaknya dapat mengambil pelajaran dari ajang Pilkada DKI Jakarta 2017. Di mana, masyarakat pemilih tidak menyukai figur atau partai politik yang mendukung penista agama.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon gubernur Jabar. Apalagi sudah mendapat dukungan dari Partai Nasdem yang di Pilkada DKI mendukung gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Poltracking, 2018).

Ridwan Kamil nampaknya harus berhati-hati. Jang-jangan dukungan dari Nasdem seperti masuk jebakan betmen atau Ridwan Kamil justru sedang menggali kuburnya sendiri di Pilkada. Menurutnya, Nasdem yang menyatakan siap mengusung Ridwan kamil di Pilkada Jabar sudah dicap sebagai partai pendukung cagub penista agama pada Pilkada DKI. Akan lebih berat lagi kalau nanti partai pendukung Ahok-Djarot juga mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar. Hal ini akan membuat peluang menang Ridwan Kamil tipis.

Ridwan Kamil hendaknya melihat langkah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara tegas tidak akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2018. Jika benar partai pendukung Ahok-Djarot berkumpul di Pilkada Jabar kemungkinan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) muncul kembali. Hal tersebut akan digunakan oleh lawan untuk mengalahkan Ridwan Kamil.

Mungkin isu SARA akan bergeser dari Jakarta ke Jawa Barat. Karena bagaimanapun salah satu faktor kekalahan Ahok-Djarot adalah karena kasus penistaan agama. Jika isu SARA berkembang di Pilkada Jabar, maka salah satu yang sangat dirugikan adakah Ridwan Kamil.[]

Konstalasi Pilgub DKI Jakarta 2017 Jokowi dan JK Terbelah

PILGUB DKI Jakarta sudah mulai ‘merasuk’ kepemimpinan tinggi negara. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dinilai sudah terbelah menyikapi Pilgub DKI tahun depan (Fernandes, 2019).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, sikap politik Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah mulai berbeda. Saat menghadiri Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu, Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Jokowi, Ahok dan Megawati satu mobil.

Meski, Jokowi lewat jubarinya, Johan Budi menyatakan, netral di Pilgub DKI, tapi, publik juga tidak melupakan adanya dugaan Jokowi mendukung Ahok. Sementara, Wapres Jusuf Kalla dalam acara peringatan ulang tahun emas (50 tahun) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Rabu (28/9) lalu, mendukung Anies Baswedan dan Sylviana Murni.

Saat itu, JK mendoakan agar dua kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yakni Anies dan Sylviana menang Pilgub DKI. “Kita yang hadir di sini, sama dengan (calon) gubernur DKI, pokoknya pilih saja, mudah-mudahan salah satunya (yang menang),” kata JK.

Ujang menduga, antara Jokowi dan JK memiliki pilihan sendiri di Pilgub DKI. Sejak awal publik menilai, antara Jokowi dan JK sudah terbelah. Dwi tunggal pemerintahan republik ini memang sudah terpecah. Jika Pilgub DKI ini sudah merembet hingga Presiden dan Wapres, lanjut Ujang, itu artinya pertarungan pesta demokrasi lima tahunan di Ibukota ini sangat keras.

Pilkada DKI adalah miniatur pertarungan politik nasional atau Indonesia. Jadi siapa pun yang menangkan Pilkada DKI, maka diyakini atau hampir dipastikan akan menang secara nasional dalam

pileg, mapupun pilpres mendatang. Walaupun terkadang hal itu tidak selalu sejalan. Pilkada DKI merupakan pertarungannya hidup mati partai dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Seandainya Ahok memang, maka akan memberi jalan bagi Jokowi untuk maju dan menang pada priode berikutnya, di Pilpres 2019. Sebaliknya jika dua calon lain kalau menang, itu sama memberikan 'jalan tol' bagi keduanya untuk menuju ke kancah politik lebih tinggi.

Meski demikian, Ujang berharap sikap terbelah antara Jokowi dan JK ini tidak membuat kinerja kabinet jadi kendur, apalagi menteri-menteri di kabinet juga memiliki dukungan berbeda di Pilkada DKI. Kinerja kabinet seharusnya tidak terganggu walau Presiden Jokowi dan Wapres JK beda dukungan. Apalagi menteri-menteri sekarang ini representasi partai, tentunya beda dukungan juga. Sesungguhnya dalam politik, tidak ada yang netral, pasti ada sikap tegas.

Di tempat terpisah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsudin menilai, suhu politik di Pilgub DKI Jakarta 2017 terus memanas. Kampanye-kampanye hitam yang menyinggung sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) mulai bermunculan.

Din Syamsudin berharap, ada kekuatan penengah yang bisa memadamkan isu negatif tersebut dan meredam sentimen primordial agar tidak merambat luas. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, tokoh yang tepat untuk menjadi mediator adalah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Presiden dan Wapres justru terbelah di Pilgub DKI. Seharusnya ada kekuatan penengah yang netral. Tapi, yang terjadi malah Presiden dan Wapres kita saja terbelah. Selain itu, Din berpesan, agar para pasangan calon menjaga cara bicaranya. Jangan sampai ujaran-ujaran kebencian dan kata-kata kasar terlontar. Tindakan itu bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat.[]

Pengrusakan Atribut Calon Kepala Daerah Bisa Menyulut Konflik

KEPOLISIAN perlu mengantisipasi peristiwa pengrusakan atribut calon kepala daerah di Provinsi Aceh. Dikhawatirkan pengrusakan atribut calon kepala daerah bisa menimbulkan konflik serius (Kautsar, 2019). Pengrusakan atribut akan menjadi benih-benih konflik maka perlu ditangani segera sebelum meluas dan parah. Pihak keamanan, kepolisian harus mengantisipasi hal ini.

Aceh memiliki masalah serius terkait keamanan, apalagi provinsi berjuluk Serambi Mekkah ini sudah mengalami konflik cukup lama dan dalam. Karenanya polisi harus siap siaga dengan kondisi itu, bila perlu terapkan siaga satu di Aceh untukantisipasi dini.

Kepolisian perlu mengusut dan menindak pelaku perusakan atribut-atribut calon kepala daerah bukan hanya di Aceh saja tapi juga di daerah lain.

Jika polisi tidak bisa menindak tegas pelaku pengrusakan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Konflik adalah produk dari interaksi antar sesama masyarakat dan konflik bisa diselesaikan dengan konsensus. Jadi ada baiknya segera diselesaikan. Karena merusak atribut tidak diperbolehkan, apalagi saling merusak atribut setelah ada perusakan ratusan bendera partai dan atribut calon kepala daerah yang diusung Partai Aceh maupun Partai Golkar.

Mulai dikhawatirkan terhadap kondisi kemanan jelang Pemilukada 2017 ini karena mulai ada perusakan terhadap atribut kampanye calon kandidat dan bendera partai. Warga menduga persukaan itu sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana Pilkada 2017. Warga sejumlah desa di Kecamatan Pasie Raya berharap agar polisi dan penyelenggara pilkada dapat mengendalikan situasi. Warga

juga ingin mendapatkan rasa aman hingga menentukan pilihannya pada 15 Februari 2017.

Terpisah, Kapolres Aceh Jaya, AKBP Riza Yulianto menjelaskan, perusakan bendera dan atribut kampanye itu merupakan dampak dari perusakan serupa di Kecamatan Krueng Sabe pada Jumat (4/11). Kejadian dipicu adanya publikasi sejumlah bendera Partai Golkar satu pendukung yang diduga penyebab terjadinya perusakan itu.. Sejumlah posko pemenangan calon, baik Partai Aceh maupun Golkar masih dijaga ketat oleh polisi.[]

Gaet Pemilih Pemula, Calon Kepala Daerah Manfaatkan Medsos

CALON kepala daerah akan terus berlomba-lomba menarik simpati rakyat jelang pilkada serentak gelombang kedua tahun depan. Selain turun langsung ke bawah, tentunya, calon memanfaatkan media sosial (medsos) untuk mendulang suara, khususnya pemilih pemula atau kalangan muda (kompas.com).

Siapa pun calon yang piawai memanfaatkan medsos tentu bisa mendulang suara. Pasalnya, pengguna medsos sangat banyak, khususnya kalangan muda. Lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia saat ini sudah melek teknologi, bukan hanya kalangan tua, tapi pemilih pemula sudah paham menggunakan internet. Pemilih pemula kita dan bahkan yang belum punya hak pilih saja (anak di bawah umur) ada yang sudah pandai menggunakan medsos dan internet kok. Ini akan dimanfaatkan calon. Medsos sudah banyak digunakan para calon, namun masih sedikit yang bisa memaksimalkannya. “Pemanfaatan medsos belum maksimal, seperti dalam Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014 lalu. Jadi, calon harus pandai-pandai menggunakannya. Para calon agar menggunakan medsos tidak untuk menjatuhkan lawan politiknya, misalnya kampanye hitam. Kesalahan sedikit, pengguna medsos bisa dipidanakan atau ditangkap. Medsos saat ini “ngeri ngeri sedap” karena bagi yang melakukan kesalahan bisa ditangkap. []



BAB EMPAT

**Pemerintah dan Partai
Terbelah pada Pilkada 2017**

Lebaran Kurban Tidak Boleh Dirusak Politik Transaksional

KANDIDAT calon kepala daerah diingatkan supaya tidak menjadikan lebaran Idul Adha sebagai ajang berkampanye, menarik simpati pemilih. Walaupun kandidat calon kepala daerah mau berkorban, sebaiknya jangan berharap pamrih. Lebaran Kurban tak boleh dirusak menjadi sarana politik transaksional (Fatimah, 2019).

Menjelang Pilkada, semua perayaan dijadikan momentum untuk mendekati pemilih. Di Lebaran ini sebaiknya jangan aji mumpung. Rakyat sudah pintar tidak bisa dibujuk dengan rayuan gombal. Seharusnya, lebaran ini dijadikan momen para kandidat calon kepala daerah untuk belajar. Bahkan, pengorbanan itu merupakan perintah dari ajaran setiap agama. Dalam konteks kepemimpinan, pengorbanan itu harus dimaknai memberi bukan mengharapkan sesuatu.

Banyak kepala daerah yang ketika kampanye mendekati rakyat dan berjanji mensejahterakan mereka. Namun yang terjadi sebaliknya. Kepala daerah banyak yang ingkar janji lalu meninggalkan rakyat yang telah memilihnya. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron menegaskan bahwa perayaan Hari Raya Kurban tidak boleh ditunggangi kepentingan politik pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam Pilkada. Menurutnya, perayaan Hari Raya Idul Adha ini hendaknya dinaknai untuk beribadah tanpa maksud dan tujuan tertentu.

Ketika diserahkan, tidak boleh ada titipan, kalau iya merusak ibadahnya. Pernyataan Daniel itu menyusul potensi disalahgunakan momen hari raya ini untuk celah politik. Ia juga mengatakan, Bawaslu siap menindaklanjuti laporan jika ditemukan dugaan tersebut. Namun panwas sendiri tidak akan terlalu dalam pelaksanaan tersebut karena bukan pengawas kurbannya, ketika

ada laporan, ini persoalan ibadah, mereka tidak masuk terlalu dalam, tapi tinggal kita pastikan ada laporan, akan di proses.

Hal sama juga diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay yang mengatakan ibadah tidak boleh dicampurkan dengan kaitan politis. Menurutnya, perlu diawasi jika terdapat upaya-upaya politik tersebut oleh paslon untuk kemudian ditindaklanjuti. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai perlu kewaspadaan masyarakat dalam mengawasi upaya oknum yang memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha tersebut. Momentum hari raya sering disalahgunakan sebagai ajang politik transaksional, yakni dengan memakai atribut kampanye lengkap disertai kalimat ajakan mencoblos. “Jelas tindakan berkorban dengan cara seperti itu dilarang agama dan Undang-undang Pilkada,” ujarnya. []

Pengamat Ingatkan Setnov Tak Ulangi Kesalahan Pendahulu

KETUA Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto agar tidak mengulangi kesalahan pendahulunya yang melakukan “sapu bersih” terhadap rivalnya dalam penyusunan kepengurusan karena akan mengakibatkan konflik. Sebagai Ketua Umum Golkar yang baru hendaknya Setya Novanto tidak mengulangi tindakan ‘basmi bersih’. Seorang pimpinan semestinya mengayomi semua faksi dan mengeliminasi sekat-sekat politik yang ada, bukan malah menegaskan keberadaannya.

Sebelumnya, Setya Novanto unggul dengan perolehan 277 suara, mengalahkan Ade Komarudin dengan 173 suara dalam munaslub Partai Golkar di Bali, 14-17 Mei lalu (Republika, 2016).

Meskipun secara teknis, pemilihan belum selesai, namun pemilihan dihentikan. Dengan perolehan suara kedua kandidat yang mencapai lebih dari 30 persen tersebut, baik Setya Novanto maupun Ade Komarudin berhak melaju ke putaran kedua.

Di luar dugaan, Ade Komarudin memilih untuk mundur sehingga pertarungan berhenti di satu putaran saja. Adalah sebuah keniscayaan bagi pemenang untuk mengakomodasi para pihak yang telah mendukungnya dalam suksesi kepemimpinan sebuah organisasi. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemenang bersikap kepada pihak yang kalah. Indikator awal yang dapat dilihat adalah bagaimana pemenang, Setya Novanto, menyusun dan menata personelnya, baik di kepengurusan partai maupun konfigurasi di luar partai.

Sampai dengan hari ini, Setya Novanto baru mengumumkan penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum Robert Kardinal, Ketua Harian Nurdin Halid, di samping itu penetapan posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Langkah Ade Komarudin yang kerap disapa Akom mundur

dalam pencalonan diambil untuk menghindari peningkatan eskalasi friksi yang dapat berpotensi meruncingkan konflik, sebagaimana preseden pascasukses kepemimpinan sebelumnya. Yang paling ekstrem, beberapa konflik internal Golkar berujung pada lahirnya partai baru. Tercatat ada empat partai politik yang masih eksis hingga kini lahir dari Golkar, yakni PKPI (berdiri tahun 1999), Hanura (2006), Gerindra (2008) dan NasDem (2011).

Bila dicermati, perpecahan ini diakibatkan karena faktor yang serupa, yakni rekonsiliasi yang tidak berjalan mulus yang variabel utama mengapa rekonsiliasi tidak berjalan dengan baik adalah gagalnya kepengurusan baru dalam mengakomodasi aspirasi pihak yang berseberangan. Rivalitas berlarut-larut antara kepengurusan Munas Bali dengan Munas Ancol merupakan contoh nyata, residunya juga masih hangat.[]

Siswono Gabung ke NasDem, Partai Golkar Kembali Ditinggalkan Seniornya

PERINGATAN HUT Golkar ke-52 mendapat kado pahit. Satu persatu kader dan pengurus Golkar memutuskan hengkang dari partai berlambang pohon beringin (Kompas.com).

Kali ini, giliran Siswono Yudo Husodo dikabarkan bergabung ke Partai NasDem. Jika benar pak Siswono keluar dari Partai Golkar, kepemimpinan Setya Novanto semakin ditinggalkan. Keluarnya para tokoh beringin akan membuat Partai Golkar merugi karena dukungan berkurang, sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua umum kurang mengayomi. Lebih jauh, jika di internal Partai Golkar tidak harmonis dan terjadi perselisihan di antara para elitnya. Perselisihan terjadi antara Setya Novanto dengan Sekjen, Idrus Marham. Begitu pula Setya Novanto dengan Aburizal Bakrie. Masalah dari perselisihan di internal banyak faktor seperti urusan pilkada dan lainnya.

Jika Novanto tidak segera berbenah maka bisa ribut lagi”, kata Ujang. Dia melanjutkan, keluarnya Siswono dari Partai Golkar harusnya menjadi alarm bagi Novanto untuk memperbaiki diri. “Sangat disayangkan Pak Siswono keluar Golkar.

Siswono ketika dikonfirmasi mengakui dirinya diajak oleh Surya Paloh untuk bergabung bersama NasDem. Menurut Siswono, antara Partai Golkar dengan NasDem memiliki kesamaan ideologis, sehingga dia tidak keberatan untuk menerima ajakan Surya Paloh. “Kedua partai ini secara ideologikan sama ya. Saya melihat Partai NasDem mempunyai peluang untuk menjadi partai yang besar. Keberadaannya di Partai Golkar, Siswono mengungkapkan, belum memberikan pengunduran diri di partai beringin tersebut.

Terkait dengan jabatan apa yang akan diberikan NasDem kepada dirinya telah resmi bergabung, Siswono mengaku belum mengetahuinya. []

Nurdin Ketua Mahkamah Golkar, Masalah *Cincai*

POSISI Ketua Mahkamah Partai di DPP Partai Golkar tak layak diisi oleh Nurdin Halid. Sebab, Nurdin termasuk orang yang bermasalah (Mahaens, 2017).

Mahkamah partai itu harusnya diisi oleh orang yang mengerti hukum buka yang pernah bermasalah hokum. Mahkamah Partai di tangan Nurdin tidak akan beres. Nanti masalah partai bukannya beres malah cincai. Maka Nurdin tak layak jadi ketua MPG. Ini kan tidak elok dan Nurdin jadi terkesan rakus jabatan, yang baik itu jabatan terbagi habis kepada kader-kader yang berkompeten di bidangnya. Masih banyak kader-kader senior atau junior yang bisa menduduki posisi terhormat sekelas Mahkamah Partai. Masih banyak kader partai Golkar yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kenapa harus Nurdin? Kayak nggak ada yang lain saja. Ada glagat yang tidak baik dari penempatan posisi orang-orang yang menduduki kepengurusan DPP Partai Golkar.

Ini sudah tidak bener dan pasti kinerjanya nggak beres juga. Ada aroma tak sedap dalam susunan kepengurusan dan ada kesan melanggengkan kekuasaan suatu kelompok. Artinya Golkar sedang tersandra kelompok tertentu. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto juga telah membatah dengan tegas bahwa posisi ketua Mahkamah Partai belum tentu di jabat Nurdin Halid, Meski Nurdin Halid ngotot ingin menjabat sebagai ketua MPG. Belum lagi saat kepengurusan selalu minta masukan-masukan dari seluruh pengurus yang ada dan akan diumumkan jika saatnya tiba.[]

Gerindra Sindir Kubu Djan Faridz *Carmuk* Ke Jokowi

LANGKAH Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok-Djarot tidak hanya mendapatkan kritikan dari internalnya sendiri. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga ikut mengkritik sikap PPP Djan Faridz (Permadi, 2017).

Partai Gerindra malah menduga keputusan PPP Djan Faridz mendukung Ahok karena ingin mencari muka (*carmuk*) ke Presiden Jokowi. Diduga Djan Faridz ini lagi usaha untuk mendapatkan simpati dan dukungan Jokowi. Dengan situasi PPP yang sedang konflik dualisme kepengurusan, kubu Djan membutuhkan pengakuan dari pemerintah sebagai PPP yang sah karena selama ini hanya PPP Romy yang disahkan.

Jika saat ini, Jokowi mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu, Djan pun mendukung Ahok dengan harapan pihaknya mendapat pengakuan dari pemerintah. Hal ini dinilai sikap PPP kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok dinilai cuma untuk mencari sensasi dan nyari muka (*nyarmuk*) ke Jokowi.

Dikatakan dia, kubu Djan Faridz mengambil langkah berseberangan dengan PPP kubu Romahurmuziy justru semakin memperburuk citra PPP Djan Faridz. Dianggap motifnya hanya untuk mencari perhatian Jokowi semata. Karena jika dikalkulasikan dengan fatsun politik sangat bersebrangan dengan nilai-nilai partai berlambang kabah dan keislaman. Akibat sikap Djan Cs, bisa jadi kader PPP di akar rumput semakin marah dengan sikap yang dilakukan oleh Djan.

Kader bisa marah dan semakin antipati dengan PPP Djan, efeknya Djan semakin ditinggalkan kadernya sendiri. Pasca gugatannya ditolak pengadilan, PPP Djan Faridz yang tidak dianggap sah oleh pemerintah memilih bergabung dengan koalisi partai-partai pendukung pemerintah yaitu PDIP, Hanura, Nasdem dan

Golkar. Keputusan mendukung Ahok diambil berdasarkan rapat pleno DPP PPP yang dilaksanakan 4 Oktober lalu. Pertimbangan ini sesuai hasil silaturahmi nasional yang dihadiri seluruh pengurus wilayah PPP se-Indonesia termasuk Ketua DPW DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Padahal selama ini Lulung adalah tokoh politik yang selalu bertentangan dengan Ahok. Tak jarang Lulung dan Ahok terlibat perang urat saraf yang sengit.

Sikap DPW PPP untuk mempertimbangkan dan mendukung pasangan Ahok-Djarot dilandasi semata-mata untuk kemaslahatan umat dan toleransi umat beragama. PPP sebagai partai besar ingin menjadi jembatan antar umat, saya lihat pasangan Ahok-Djarot ketika memimpin Jakarta, kepentingan-kepentingan umat Islam terpenuhi.[]

Indonesia Harus Mencetak Habibie-Habibie Muda untuk Masa Depan Bangsa yang Cemerlang

HABIBIE merupakan tokoh besar yang dimiliki oleh Indonesia yang harus menjadi panutan generasi sekarang dan yang akan datang. “Beliau tokoh besar bangsa ini. Dan menjadi Panutan bagi generasi kini dan akan datang. Bangsa Indonesia harus mencetak Habibie-Habibie muda yang cerdas dan visioner demi masa depan Negara yang lebih cemerlang. Kita tau sendiri bagaimana prestasi dan kiprah beliau (Habibie) di Negeri ini, bahkan menjadi inspirasi dan tokoh yang berpengaruh secara Internasional. Tentunya, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan di segala bidang. “Pendidikan yang berkarakter dan selalu menumbuhkan semangat perjuangan dan prestasi, harus selalu menjadi pekerjaan utama pemerintah saat ini.

Presiden Republik Indonesia ke 3, Baharuddin Jusuf Habibie tepat pada Tanggal 25 Juni 2016 masuk pada usia 80 tahun. Namun, Habibie menggelar acara syukuran atas bertambahnya usianya tersebut di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (2/8/2016). Acara syukuran tersebut digelar Selasa (2/8/2016) Malam (Okezone.com).

Hadir dalam acara syukuran ini sejumlah pejabat negara dan pimpinan partai politik, seperti Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DPD RI Irman Gusman. Mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi.[]



BAB LIMA

Kontestasi Menuju Pemilu 2019

Anies-Sandi Menang Posisi Prabowo Makin Kuat di Pilpres 2019

KEMENANGAN pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua versi quick count merupakan warning bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demikian pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Ujang Komarudin kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Menurut Ujang, dengan kemenangan Anies-Sandi menunjukkan posisi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto semakin kuat sekaligus ancaman bagi Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 (Irzal, 2018).

Kemenangan Anies-Sandi bisa jadi tanda kemenangan Prabowo 2019 nanti. peta dan kekuatan politik Prabowo sudah diperlihatkan saat para elite dan ketua partai hadir pada konferensi pers di rumah Prabowo usai pencoblosan Pilgub DKI pada Rabu (19/4) lalu.

Kekuatan Prabowo sudah terlihat. Ada Sohibul Iman (Presiden PKS), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Hary Tanoë (Ketum Perindo), Aburizal Bakrie, dan elite lainnya. Itu semacam konsolidasi KMP (Koalisi Merah Putih) untuk 2019.

Untuk itu, sebaiknya Jokowi mulai berhati-hati dan mengantisipasi hal itu. Jokowi harus susun strategi mulai sekarang, karena ancaman itu nyata. Semua pendukung hadir dan mendukung Anies-Sandi bukannya tidak mungkin akan membangun kekuatan besar dan melawan Jokowi di 2019.

New KMP akan terbentuk dan bisa jadi Golkar akan digerogoti kehadiran beberapa kadernya yang mendukung pasangan Anies-Sandi. Apalagi, saat ini Prabowo sedang mendengungkan kepada semua calon dalam pilkadanya, bahwa pilihannya pada kader dan jika terpilih akan membesarkan peluang Prabowo maju Pilpres 2019.

Kampanye Pilkada DKI saja Prabowo meminta masyarakat agar memilih Anies-Sandi jika ingin dirinya maju kembali menjadi Capres 2019. Bukannya tidak mungkin hal sama akan dilakukan dalam kampanye pilkada 2018 yang didukung Gerindra.

Diketahui, enam lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat memastikan pasangan Anies -Sandi jadi pemenang Pilgub DKI 2017.

Ke enam lembaga survei itu adalah Polmark Indonesia, Charta Politika, Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator, Voxpol Center.

Polmark Indonesia mencatat, pasangan Anies-Sandi memperoleh 57,57 persen, sementara pasangan Ahok-Djarot 42,43 persen. Charta Politika 57,87 persen suara untuk Anies-Sandi, 42,13 persen untuk Ahok-Djarot.

Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mencatat 55,41 persen untuk Anies-Sandi dan 44,59 persen untuk Ahok-Djarot. Sementara, SMRC merilis 58,04 persen suara untuk Anies-Sandi, Ahok Djarot 41,96 persen. Indikator mencatat, Anies-Sandi memperoleh 57,93 persen, Ahok-Djarot 42,07 persen. Terakhir Voxpol Center mencatatkan perolehan Anies-Sandi paling tinggi yakni 59,40 persen, Ahok-Djarot 40,20 persen.[]

Ketidakjelasan *Reshuffle* akan Berdampak pada Tidak Kondusifnya Kondisi Ekonomi dan Politik

ISU *reshuffle* kabinet semakin mencuat dan menjadi pembicaraan utama di kalangan publik. Ketidakjelasan sikap pemerintah terkait isu ini dinilai akan berdampak pada tidak kondusifnya kondisi ekonomi dan politik nasional (Hasanah, 2016).

Presiden Joko Widodo harus segera melakukan *reshuffle* Kabinet, karena justru ketidakjelasan *reshuffle* akan berdampak pada tidak kondusifnya kondisi ekonomi dan politik. Jika melihat kondisi riil terkait ekonomi Indonesia yang melambat, banyaknya hutang negara, pengangguran, dan lain sebagainya, maka *reshuffle* jilid II kabinet kerja harus dilakukan oleh Presiden.

Tentu Presiden akan mencari pembantu yang terbaik, dan yang harus diperhatikan adalah keterwakilan Kader Partai pendukung. Selain itu, dia menyarankan bahwa Presiden harus mencari pembantu yang bisa diterima oleh pasar. Hal itu penting dikarenakan dapat mempengaruhi sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perlu diketahui, Presiden Jokowi dalam sepekan belakangan ini rajin memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara. Padahal mengacu jadwal dari Biro Kepresidenan tertulis agenda Jokowi bersifat internal.

Hal itu menguatkan isu adanya *reshuffle* kabinet jilid II dalam waktu dekat. Apalagi, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) semakin mantap menyatakan dukungannya untuk Pemerintahan Jokowi-JK. []

Soal *Reshuffle* Kabinet Jilid II

RESHUFFLE kabinet yang telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi hari ini, tidak terlepas dari bagi-bagi jatah politik bagi Parpol pendukung pemerintah. Yang terjadi kan tetap memperhatikan peta dukungan ke pemerintah. Masuknya Menteri dari PAN dan Golkar memperlihatkan hal itu.

Catatan untuk roda pemerintahan ke depannya, jangan sampai terjadi kegaduhan antara menteri satu dengan menteri yang lainnya, apalagi sampai membangkang terhadap Presiden. Membiasakan diri dengan budaya malu. Jadi jika ada Menteri atau pejabat yang walaupun hanya terindikasi masalah harus mundur, seperti di Jepang dan menghargai prestasi. Tata kelola politik Indonesia harus berdasar merit system. Hilangkan budaya politik the winner takes all. Harus ada keseimbangan dan rival politik harus dirangkul.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan *reshuffle* kabinet jilid II di Istana Negara, Senin (27/7/2016). Tercatat ada 9 nama baru yang masuk dalam kabinet kerja, sedangkan 3 menteri digeser ke kementerian lainnya (Hasanah, 2016). []

Suara Golkar Belum Tentu Naik Meski Dukung Jokowi dan Ahok

KEPUTUSAN Partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk diusung kembali sebagai calon Presiden pada pemilu presiden (pilpres) 2019 masih menyimpan sejumlah pertanyaan. Apa sebenarnya target yang ingin dicapai Partai Golkar sehingga sejak dini mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. Padahal pilpres 2019 masih sekitar 3 tahun lagi. Apakah ini merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas dengan cara ‘mendompleng’ popularitas Jokowi semata? Belum lagi soal dukungan yang diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Berikut petikan wawancara wartawan SoksineWS, Sunardi Panjaitan, Melly Kartika Adelia serta fotografer Lukman Haqim Naba dengan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Dr. Ujang Komarudin, Jum’at (4/8).

Dalam Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu, Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk kembali diusung sebagai capres pada Pilpres 2019 mendatang. Bagaimana anda melihat hal ini? Apakah ini tidak terlalu dini bagi partai sebesar Golkar?

Partai Golkar adalah partai yang rasional dan partai yang menjadi rujukan bagi perpolitikan nasional (Ridha, 2016: 160-180). Tentu sangat disayangkan keputusan Golkar yang sejak dini sudah mendaklarasikan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres 2019. Kenapa? Pertama, ini sudah tidak rasional. Kita tidak tahu ke depan Pak Jokowi akan menghadapi lawan politik yang tangguh. Kedua, seandainya terjadi gejolak ekonomi yang dahsyat, itu juga dapat mengubah peta perpolitikan nasional. Itu juga bisa berbahaya bagi Golkar.

Mungkin positifnya adalah, dengan mendukung Jokowi, Golkar bisa ‘mendompleng’ popularitas Jokowi, sehingga suara Golkar terkatrol di 2019. Apalagi selama konflik internal Golkar berlangsung, popularitas Partai Golkar menurun drastis. Bisa jadi, pengurus Golkar berharap pada 2019 nanti suara Golkar akan kembali naik dengan mendukung Jokowi.

Golkar juga memutuskan mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta?

Iya. Ini juga merupakan strategi mendompleng popularitas kandidat. Ahok bagi Golkar, secara popularitas dan elektabilitas dianggap yang akan menang. Meski hal itu belum dapat dipastikan. Nah, karena dianggap sebagai calon yang tingkat popularitasnya tinggi, maka Golkar juga ‘mendompleng’ Ahok. Karena inilah cara termudah untuk meraih kekuasaan dan mengembalikan popularitas Golkar. Partai politik berdiri kan untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, cara yang paling gampang adalah mendukung yang diprediksi akan menang.

Apakah keputusan Golkar sejak dini mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019, dapat dikatakan sebagai strategi untuk menghadapi Pemilu 2019 yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak (pileg dan pilpres dilaksanakan bersamaan)?

Bisa juga seperti itu. Namun perlu diingat bahwa eksperimen pemilu serentak ini tidak bisa hanya menggunakan strategi ‘mendompleng’ tadi. Harus ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh partai politik khususnya Partai Golkar. Belum tentu juga, dukungan yang diberikan kepada Jokowi akan berimbas pada naiknya suara Golkar. Bisa jadi Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden pada pilpres 2019 tapi suara Golkar justru menurun. Oleh karena itu, sebenarnya yang harus dilakukan oleh Golkar adalah melakukan penguataan

di tingkat bawah, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Golkar harus mampu mencetak kader-kader baru yang berkualitas mulai dari tingkat bawah. Selain itu, membuat program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. Tanpa itu, suara Golkar tidak akan mengalami kenaikan.

Bicara soal pemilu 2019, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pemilu. Beberapa partai menginginkan kembali ke sistem proporsional tertutup. Bagaimana anda melihat hal ini?

Sebagai langkah penguatan demokrasi, sebaiknya kita tidak melihat kembali ke belakang. Pada masa lalu, penentuan caleg ditentukan melalui mekanisme proporsional tertutup. Dan ini menghambat partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota DPR. Dengan proporsional tertutup, maka partai akan lebih memilih orang-orang tertentu untuk ditempatkan di nomor urut 1 dan 2. Sehingga caleg dengan nomor urut di bawahnya enggan melakukan kerja-kerja politik karena merasa tidak akan terpilih.

Oleh karena itu, sebaiknya sistem proporsional terbuka yang digunakan. Biarkan rakyat menentukan pilihannya dan memilih calegnya. Siapa caleg dengan suara terbanyak dia yang akan menang meskipun dia berada di nomor urut terakhir.

Memang sistem proporsional terbuka ini akan membuat ongkos politik lebih mahal karena sesama caleg partai juga harus bersaing. Belum lagi dengan caleg dari partai lain. Namun, kita harus ingat teori demokrasi yang menyebutkan untuk memperkuat demokrasi, maka pendidikan harus baik, ekonomi harus baik. Jadi, selama pendidikan dan ekonomi kita belum baik, maka cost politik pun akan besar.

Ini adalah biaya untuk penguatan politik. Kita sekarang masih dalam masa transisi demokrasi. Setidaknya, agar demokrasi kita kuat, kita membutuhkan 5-6 kali pemilu. Ini yang harus kita dorong, bagaimana demokrasi kita semakin kuat. Karena jika nanti kita sudah menyelenggarakan pemilu 5-6 kali selama periode transisi ini, tapi tidak menghasilkan demokrasi yang baik, maka dikhawatirkan akan kembali ke masa otoritarianisme. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi, dalam jatuh bangun demokrasi itulah, kita menemukan demokrasi yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana menentukan capres jika dilakukan pemilu dilakukan serentak. Sementara selama ini, penentuan capres berdasarkan presidential threshold ?

Ada usulan bahwa presidential threshold 2019 dapat merujuk ke perolehan kursi pada pemilu sebelumnya, tahun 2014. Tapi logika ini kiranya kurang dapat terima, sebab kondisi ruang-waktu 5 tahun lalu (yang pastinya telah mengalami perubahan) tidak layak untuk dijadikan syarat aturan permainan masa kini.

Apakah mekanisme presidential threshold masih relevan jika pileg dan pilpres dilaksanakan serentak?

Secara politis, kongruensi pihak eksekutif dan legislatif adalah alasan di balik dimunculkannya *presidential threshold*, sebuah istilah yang sebenarnya tidak dikenal dalam kosakata politik internasional secara umum. Merujuk UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Persyaratan ini masih relevan jika waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres berlangsung secara terpisah.

Menurut saya, secara teknis mekanisme presidential threshold menjadi tak lagi relevan bila Pileg dan Pilpres berlangsung secara

bersamaan. Basis argumennya juga kuat, yaitu Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Secara logika, ambang batas (threshold) telah termanifestasi dalam persebaran suara yang tercantum di dalam pasal tersebut.

Terkait penguatan demokrasi, kini dalam pilkada, sudah dilaksanakan secara serentak. Pada pilkada serentak pertama Desember 2015 lalu, apa yang harus dievaluasi?

Pada pilkada serentak tahap pertama lalu, tidak diakomodirnya calon tunggal menjadi permasalahan utama. Permasalahan calon tunggal ini membuat pilkada di beberapa daerah ditunda. Jadi, pilkada serentak tapi tidak serentak. Sampai akhirnya MK memutuskan bahwa calon tunggal diperbolehkan. Pada pilkada serentak berikutnya, ini menjadi salah satu hal yang mesti diantisipasi oleh KPU.

Regulasi-regulasi yang terkait dengan pilkada, harus diselesaikan dengan tuntas sejak awal. Sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti pilkada serentak sebelumnya. Jika undang-undangnya baik, tentu pilkadanya akan baik.

Apakah tahapan pilkada serentak tahap kedua ini sudah sesuai dengan arah penguatan demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional.

KPU sudah belajar banyak dari pilkada serentak tahap pertama. Kini, setiap PKPU yang dikeluarkan oleh KPU, harus di konsultasikan

ke DPR. Ini salah satu bentuk adanya komunikasi antara pembuat undang-undang dengan pihak yang menjalankan undang-undang.

Kalan bicara Pilkada, tentu barometernya adalah Jakarta. Bagaimana anda melihat dinamika pilkada di Jakarta ini?

Semua orang, mulai dari Presiden, partai politik, pengamat hingga masyarakat mencurahkan perhatiannya pada pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional. Pertarungan sesungguhnya ada di Jakarta.

Partai politik harus memunculkan figur yang seimbang dengan Ahok. Karena berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, masih menempatkan Ahok sebagai calon dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ibu Risma mungkin bisa menjadi pembanding bagi Ahok.

Pembanding?

Iya. Saya lebih menyebutnya pembanding, bukan lawan. Karena jika ada lawan yang sepadan, incumbent bisa kalah. Namun, jika tidak ada figur yang elektabilitasnya sama dengan Ahok, maka Ahok dapat terpilih kembali untuk periode berikutnya. Politik selalu berubah, tergantung momentum. Bisa jadi, jika ada lawan yang sebanding, incumbent (Ahok) bisa kalah.

Idealnya berapa pasang cagub-cawagub?

Idealnya empat pasangan sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan.

Kalan head to head?

Head to head menarik secara kontestasi politik, tapi tidak menarik dari sisi pendidikan politik. Karena *head to head* ini menunjukkan bahwa tidak ada kader bangsa ini yang baik. Dan tidak ada pilihan, hanya dua pasangan itu.[]

Anies Wins, Warning for Jokowi in 2019 Presidential Election?

THE VICTORY of the candidate for governor and vice governor Anies Baswedan - Sandiaga Uno over incumbent candidate Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat in the second round of Jakarta Regional Head Elections (Pilkada), according to some parties, cannot be separated from involvement of Gerindra Party Chairman Prabowo Subianto (Permadi, 2019).

Political observer from Al Azhar Indonesia University (UAI) of Jakarta Ujang Komarudin said that Anies - Sandi’s victory shows Prabowo’s stronger position, so it can be a warning for President Joko “Jokowi” Widodo in 2019 presidential election.

Anies - Sandi’s victory could be a sign of Prabowo’s victory in 2019 later. The Executive Director of the Indonesia Political Review added that Prabowo’s political map and strength had been demonstrated when the elite and party leaders were present at a press conference held at Prabowo’s house on Wednesday (04/19/2017) or after voting yesterday. Look, Prabowo’s power has been visible. There are Sohibul Iman, Zulkifli Hasan, Hary Tanoë, Aburizal Bakrie, and other elites. It is sort of consolidation for 2019 later. Previously, in the second round of Jakarta Pilkada held on Wednesday (04/20) yesterday, based on quick count results of a number of survey agencies, Anies - Sandi duet excelled Ahok - Djarot. The difference in their votes far enough, which is about 16 percent.[]

Anies Menang, Peringatan bagi Jokowi di Pilpres 2019?

KEMENANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan - Sandiaga Uno atas pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI putaran kedua, menurut sejumlah pihak, tak lepas dari turun gunungnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Fernandes, 2019).

Kemenangan Anies-Sandi menunjukkan posisi Prabowo yang semakin kuat, sehingga bisa menjadi peringatan atau warning bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang.

Kemenangan Anies-Sandi, bisa jadi tanda kemenangan Prabowo 2019 nanti. Peta dan kekuatan politik Prabowo sudah diperlihatkan saat para elit dan ketua partai hadir pada konferensi pers yang dilakukan di rumah Prabowo pada Rabu (19/4/2017) atau usai pencoblosan kemarin. Kekuatan Prabowo sudah terlihat. Ada Sohibul Iman, Zulkifli Hasan, Hary Tanoë, Aburizal Bakrie, dan elit lainnya. Itu semacam konsolidasi untuk 2019 nanti.

Untuk itu sebaiknya Jokowi mulai berhati-hati dan mengantisipasi hal tersebut. Jokowi harus susun strategi mulai sekarang, karena ancaman itu nyata. Sebelumnya, pada Pilkada DKI putaran kedua yang digelar pada Rabu (19/4/2017) kemarin, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, pasangan Anies-Sandi unggul Atas Ahok-Djarot. Selisih suara mereka cukup jauh, yakni sekitar 16 persen.

Adapun beberapa lembaga survei yang melakukan quick count, yakni Polmark Indonesia, Charta Politika, Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator, dan Voxpol Center.

Polmark Indonesia mencatat, pasangan Anies-Sandi memperoleh 57,57 persen, sementara pasangan Ahok-Djarot

mendapatkan 42,43 persen suara pemilih. Sementara itu Charta Politika, 57,87 persen suara untuk Anies-Sandi, selebihnya, 42,13 persen untuk Ahok-Djarot. Lingkaran Survey Indonesia menunjukkan, 55,41 persen suara untuk Anies-Sandi, 44,59 persen untuk Ahok-Djarot. SMRC merilisi 58,04 persen suara untuk Anies-Sandi, sementara Ahok Djarot 41,96 persen.

Tak beda jauh dengan lembaga survei lainnya, Indikator mencatat, suara yang diperoleh Anies-Sandi dalam pilkada DKI Putaran dua sebanyak 57,93 persen sisanya 42,07 persen milik Ahok-Djarot. Terakhir dalam quick count Voxpol Center, Anies-Sandi paling tinggi yakni 59,40 persen. Sementara Ahok-Djarot 40,20 persen.[]



BAB ENAM

Serba Serbi Politik Indonesia

Penangkapan Putu Sudiartana Kembali Coreng DPR

WAJAH DPR kembali tercoreng dengan tertangkapnya anggota dewan I Putu Sudiartana dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Selasa (28/6/2016) (Himawati, 2018: 20-39).

Tertangkapnya anggota DPR dari Komisi III (I Putu Sudiartana) kembali mencoreng institusi DPR yang saat sedang menata perbaikan.

Lebih lanjut, publik akan kembali menilai negatif DPR dengan adanya penangkapan tersebut. Saat ini ditambahnya DPR sedang mendapatkan sorotan publik karena beberapa anggota DPR ditangkap KPK dalam kasus korupsi.

Oleh karena itu, Ujang menyarankan agar masing-masing pimpinan fraksi di DPR mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat korupsi. Yang memiliki kewenangan langsung itu pimpinan dan fraksi. Mereka yang bisa mengatur anggotanya. Sudah menjadi kewajiban setiap pimpinan fraksi di DPR untuk mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam Korupsi. I Putu Sudiartana menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Bali setelah memperoleh 73,348 suara. Putu Sudiartana merupakan seorang pengusaha sukses dan petinggi Partai Demokrat di Bali. Saat ini Putu Sudiartana menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali.[]

Jokowi Didesak Ganti Nusron Wahid

KINERJA Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid terus mendapat sorotan. Terbaru, Nusron disentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kinerjanya jeblok (Republika, 2016).

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, banyaknya kritikan yang dialamatkan ke Kepala BNP2TKI harusnya sudah menjadi bukti bagi Presiden Jokowi untuk mengganti Nusron.

Harusnya Jokowi mengganti atau Nusron-nya mengundurkan diri dari posisi kepala BNP2TKI. Sebagai pejabat publik, Nusron sudah berjanji untuk konsentrasi menangani permasalahan TKI di luar negeri. Tapi, fakta yang ada, Nusron malah sibuk sebagai Ketua DPP Partai Golkar dan juga ketua timses Ahok. "Bagaimana mau mengurus TKI, sekarang aja sibuk jadi Timses. Daripada dikritik terus, lebih baik legowo dengan jantan mengundurkan diri.

Senada, Pengamat Perburuhan dari FEB UNPAD AK Supriyanto menilai, kinerja Nusron dianggap tidak fokus karena lebih sibuk menjadi tim sukses Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketimbang mengurus permasalahan TKI yang kian pelik.

Urusan TKI memerlukan orang yang jiwa dan badannya memang di situ. Ia harus memiliki keakraban dengan isu perlindungan tenaga kerja Indonesia atau perburuhan. Ada 27 TKI kita asal NTT meninggal di Malaysia selama Agustus 2016, ada pula persoalan rental TKI di Saudi Arabia yang disebabkan penutupan pengiriman TKI informal sehingga terjadi kelangkaan pekerja dalam sektor tertentu. Hal-hal tersebut nyaris tidak direspons dengan sigap oleh BNP2TKI. Karena itu, jabatan Kepala BNP2TKI lebih baik diisi figur non partai sehingga lebih fokus.[]

Tito Karnavian Dipilih untuk Amankan Pemilu 2019

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR dinilai merupakan skenario Jokowi untuk mengamankan pemilu 2019

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, Presiden Jokowi ingin memastikan pemilu 2019 berjalan aman dan Jokowi kembali sukses untuk menjadi Presiden untuk kedua kalinya. “Menurut saya, ditunjuknya Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri merupakan bagian dari skenario Jokowi untuk mengamankan pemilu 2019. Dengan rekam jejak yang dimilikinya, Tito sangat layak dan pantas untuk menjadi Kapolri. Apalagi, terang Ujang, Tito juga lama berkarir di Densus 88 serta BNPT, sehingga diharapkan mampu meredam aksi teror yang biasanya akan meningkat jelang pemilu 2019 nanti. Jadi, Presiden Jokowi ingin memastikan pemilu 2019 berjalan aman tanpa gangguan. Saya kira itu hal yang wajar, karena Tito Karnavian juga punya kapasitas.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi mengajukan mantan Kapolda Metro Jaya yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Penunjukkan nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri pertama kali disampaikan oleh Ketua DPR Ade Komarudin (CNN Indonesia, 2016).

Jadi tadi saya sebelum kemari, saya menerima Menteri Sekretaris Negara dan beliau menyampaikan surat kepada DPR. Surat tersebut berisi keputusan Presiden meminta Komjen Tito Karnavian menjadi satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.[]

Maraknya Pekerja RRC di Indonesia Bagian dari Imperium China Raya

KONDISI pembangunan nasional Indonesia dalam era diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin memprihatinkan, terutama jika dicermati membanjirnya pekerja asing asal Republik Rakyat Cina (RRC) di Indonesia saat ini (Sa'adah, 2018).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, 'Tak bisa dipungkiri bahwa 'impor' tenaga kerja asal negeri Tirai Bambu itu menimbulkan kegelisahan dari rakyat pribumi. Kita harus meningkatkan kewaspadaan nasional dengan fenomena membanjirnya tenaga kerja asal RRC di Nusantara, karena mereka masuk dengan terorganisir, dibukakan pintu oleh pemerintah dengan berkedok investasi dan celaknya sebagian besar unskill (tidak memiliki keahlian).

Lebih lanjut, Dia menegaskan bahwa para tenaga kerja asal China ini menguasai semua proyek infrastruktur di Indonesia mulai dari tingkatan General Manajer hingga kuli bangunan. Diskusi bertema "Banjir Pekerja Tiongkok, Ada Apa?" yang dihadiri para aktivis pemuda dan mahasiswa itu juga menyoroti mengenai pergeseran penguasaan sumber daya alam Indonesia yang kaya ini antara kekuatan Amerika yang kemudian secara perlahan diambil alih China, karena kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sekarang.

Kondisi ini jika dibiarkan akan terjadi hal yang dikuatirkan Bung Karno, yakni bahwa bangsa Indonesia akan menjadi kuli bangsa asing. Hal ini harus diantisipasi. Seperti di Arab Saudi misalnya, semua proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh para pemodal asing silahkan saja menggunakan pekerja asal negara tersebut, tetapi pucuk pimpinan proyek harus orang Arab Saudi.

Dalam berbagai kesempatan berkunjung ke berbagai daerah sering menjumpai langsung fakta maraknya pekerja asal China. upaya penguasaan ekonomi China di negara kita ini dalam bidang infrastruktur, perbankan, properti, minerba, media massa, pengecer produk massal hingga penyelundupan narkoba akan berujung pada ambisi hegemoni imperium China Raya dengan jalan penguasaan politik Indonesia dengan memanfaatkan kondisi demokrasi yang kebablasan.

Kondisi ini jelas akan menjerumuskan Indonesia dalam keterpurukan yang fatal sebagai sebuah negara bangsa. Untuk itu, menurut dia, solusinya adalah Bangsa Indonesia harus memperkuat diri dengan upaya realistis dengan mengembangkan pendidikan yang maju dan upaya pengembangan ekonomi. Karena terus terang, masalah pokok yang dihadapi bangsa kita ini adalah kebodohan dan kemiskinan. Maka, adalah suatu keniscayaan bagi kita untuk menyelamatkan generasi kita dengan pendidikan yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.[]

Ini Kata Pengamat Soal Kudeta Gagal di Turki

UPAYA kudeta yang dilakukan oleh Militer Turki terhadap pemerintahan Recep Tayyip Erdogan yang akhirnya gagal menjadi perhatian dunia dan menjadi perbincangan utama di media-media internasional (Junaidi, 2016: 142-170).

Upaya kudeta di Turki merupakan yang kesekian kalinya. Sejarah selalu berulang, percobaan kudeta yang selalu berulang, fenomena yang terjadi di Turki tersebut sangat unik. Bila dibandingkan dengan negara lain, ketika terjadi kudeta rakyat tidak pernah membela pemimpin yang akan dikudeta tersebut, justru di Turki berbeda.

Upaya kudeta di Turki sangat unik. Ketika terjadi kudeta, rakyat membela pemimpinnya bahkan menjadi garda terdepan melawan militer. Sedangkan di mesir misalnya, ketika terjadi kudeta rakyatnya diam saja. upaya kudeta tersebut hanya dilakukan oleh segelintir tentara yang mencoba untuk mengembalikan Turki menjadi negara sekuler ala Kemal Ataturk.

Bila dibandingkan dengan Indonesia, Ia menilai bahwa Indonesia tidak memiliki tradisi Kudeta. Militer di Indonesia masih taat asas dan konstitusi. Indonesia perlu mencontoh Turki dalam pembangunan ekonominya. Yang harus dicontoh adalah Turki menjadi negara yang disegani di Eropa bahkan di dunia, dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara membangun kekuatan ekonomi.[]



BAB TUJUH

**Demokrasi
Sistem yang Tidak Sempurna**

Demokrasi

JACK Lively sebagaimana mengutip Lord Bryce, mendefinisikan demokrasi sebagai “Government in which the will of the majority of qualified citizens rules” (Lively, 1997:9). Jadi, demokrasi yang paling baik yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip mayoritas. Dalam prinsip mayoritas, bukan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi mayoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang dapat menentukan maju mundurnya pemerintahan. Prinsip mayoritas tidak hanya diukur dengan banyaknya jumlah suara yang diperoleh, tetapi prinsip mayoritas harus memperhatikan orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk memimpin pemerintahan.

Jika demokrasi diukur berdasarkan suara mayoritas rakyat, maka demokrasi itu hanya seperti paduan suara yang hanya mementingkan mayoritas orang berkuasa. Lalu dimanakah minoritas rakyat ditempatkan. Prinsip mayoritas ini memang menggambarkan demokrasi yang sesungguhnya karena berdasarkan pada suara banyak orang, tetapi prinsip demokrasi berdasarkan mayoritas ini tidak menjawab masalah yang dihadapi minoritas. Minoritas hanya akan menjadi second line/masyarakat kelas dua dalam demokrasi yang berdasarkan prinsip mayoritas.

Dalam demokrasi yang berdasarkan prinsip mayoritas, yang akan terjadi adalah seleksi kepemimpinan dalam pemerintahan tidak akan didapatkan oleh orang yang terbaik, karena dalam hal ini semua rakyat memiliki hak yang sama untuk jadi pemimpin. Penulis sepakat dengan pendapat almarhum Nurcholis Majid, ketika beliau diwawancarai SCTV sebagai calon kandidat calon presiden pada konvensi calon presiden dan Partai Golkar. Dia mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi yang berdasarkan prinsip mayoritas seperti sekarang ini, setan gundul pun bisa menjadi presiden, artinya sistem demokrasi mayoritas hanya akan menghasilkan suara bulat

yang akan memilih orang yang tidak jelas, tetapi tidak bisa memilih pemimpin yang terbaik.

Demokrasi yang berdasarkan mayoritas juga akan menghasilkan konflik-konflik politik. Konflik tersebut terjadi karena mayoritas rakyat yang memerintah hanya menekankan pada kalkulasi jumlah suara terbanyak dan mengesampingkan suara minoritas kelompok-kelompok lain. Suara minoritas ini akan menuntut haknya sehingga sejajar dengan yang mayoritas, jika hak ini tidak dapat diperoleh oleh minoritas, maka konflik-konflik politik tidak bisa terhindarkan.

Cara pemecahan atas problem tentang ketidakbebasan kaum minoritas dan dominasi kaum mayoritas terdiri dari dua jenis. Pertama adalah mengubah prinsip mayoritas dan yang lainnya memberi tingkat otonomi yang lebih besar bagi kaum minoritas. Kedua jenis pemecahan ini secara timbal balik tidak bersifat eksklusif. Di negara-negara yang mengalami konflik kultural yang mendalam keduanya digunakan untuk menciptakan sistem poliarki konsosiasional, bukannya poliarki mayoritas (Dahl, 1985:139).

Sudah tentu modifikasi penguasaan mayoritas kontradiktif dengan argumen yang menyatakan bahwa prosedur demokrasi secara khusus menetapkan prinsip mayoritas, tetapi argumen itu masih diragukan. Karena tidak semua prinsip mayoritas akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi rakyat. Jika prinsip mayoritas tersebut dilaksanakan dalam suatu negara yang demokratis, kemudian mayoritas itu menyimpang dari prosedur demokrasi, maka yang terjadi adalah penindasan mayoritas terhadap minoritas.

Dalam prinsip mayoritas yang mementingkan suara terbanyak, demokrasi akan mengalami dilema dan konflik. Seperti yang dikatakan oleh Maswadi Rauf, bahwa demokrasi ditandai oleh maraknya konflik. Hal ini disebabkan oleh pikiran bahwa kebebasan dan persamaan adalah nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh demokrasi di dalam masyarakat, karena nilai-nilai tersebut

dianggap sebagai syarat bagi terjadinya kemajuan masyarakat. Kemajuan masyarakat diawali oleh kemajuan individual. Kebebasan dan persamaan menuntut adanya kemerdekaan berfikir, berpendapat, bersuara dan berorganisasi. Dengan adanya nilai persamaan dan kebebasan memberikan hak kepada setiap individu untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, bagaimana mewujudkan atau memperjuangkan kepentingannya, baik secara individu maupun secara kelompok (Rauf,2002).

Walaupun dalam prinsip mayoritas bisa memunculkan konflik, tetapi prinsip tersebut masih dianggap yang terbaik, karena bagaimanapun suara yang lebih banyak akan lebih unggul dan yang sedikit. Namun, prinsip mayoritas akan sulit menghasilkan sistem demokrasi yang terbaik, karena bisa saja mayoritas masyarakat yang berkuasa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan demokrasi.

Hal terpenting yang menjadi poin dari tulisan ini adalah bagaimana suara minoritas diberikan otonomi dan kebebasan yang luas untuk terlibat dalam pemerintahan dan politik, karena setiap individu dalam demokrasi diberi hak yang sama seperti halnya suara mayoritas. Individu-individu dalam komunitas minoritas bukan hanya menjadi objek tetapi menjadi subjek dan pengembangan demokrasi yang berdasarkan suara mayoritas.

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya *Dilema Demokrasi Pluralis*, mengatakan bahwa proses demokrasi yang ideal akan memenuhi lima kriteria. Pertama, persamaan hak pilih; kedua, partisipasi efektif; ketiga, pembeberan kebenaran; keempat, kontrol terakhir terhadap agenda; dan kelima, pencakupan (Dahl,1985). Kelima kriteria ini setidaknya menjadi batasan bahwa apakah demokrasi yang berdasarkan mayoritas tersebut ideal atau tidak.

Jika mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl, maka harus ada persamaan hak antara hak minoritas dengan mayoritas. Mayoritas boleh berkuasa, tetapi jangan meninggalkan

atau menindas yang minoritas, minoritas harus diberi peran dan akses yang sama. Karena dalam demokrasi suara individu mempunyai peran yang menentukan, dan individu-individu itulah yang akan menggerakkan mayoritas, tidak ada mayoritas jika tidak ada individu yang menggerakkan atau berhimpun di dalamnya.

Suara rakyat adalah suara Tuhan, jadi sekecil apapun suara rakyat yang minoritas tersebut memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan bersama dengan mayoritas. Namun tetap saja suara mayoritaslah yang akan didengar dan diperhatikan. Jika kita memperhatikan sejarah Islam, tidak hanya suara mayoritas yang dikembangkan, tetapi juga syura (musyawarah), musyawarah dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak hanya melulu dengan menggunakan prinsip mayoritas yang berdasarkan voting, tetapi juga demokrasi bisa dilakukan dengan cara musyawarah antar sesama rakyat.

Demokrasi yang berdasarkan mayoritas akan mengalami kemajuan, jika semua komponen masyarakat baik minoritas yang jumlahnya sedikit dapat terayomi oleh mayoritas masyarakat yang berkuasa dan mayoritas rakyat berkuasa tidak menyimpang dan demokrasi yang sudah disepakati. Prinsip mayoritas akan menghasilkan pemimpin yang didukung oleh kebanyakan masyarakat, walaupun terkadang pemimpin tersebut bukan yang terbaik.

Kekurangan dari prinsip mayoritas adalah karena banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pemerintahan, maka pemerintahan tidak akan berjalan secara stabil. Pemerintahan akan mengalami guncangan-guncangan dan konflik-konflik politik yang akan berimbas pada perpecahan dikalangan masyarakat. Tidak selamanya suara mayoritas itu baik, tetapi jika suara mayoritas itu bisa dikelola dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan antara yang mayoritas dan minoritas.

Suara minoritas tidak harus terjun dipemerintahan dan terlibat langsung dengan mayoritas, yang terbaik adalah suara minoritas ini menjadi oposisi yang konstruktif terhadap mayoritas agar terjadi keseimbangan dalam mengelola pemerintahan. Karena jika mayoritas rakyat berkuasa dan tidak ada yang mengontrol, maka yang akan terjadi yaitu abuse of power dan korupsi yang merajalela, karena kekuasaan itu akan cenderung korup, maka kekuasaan harus dikontrol oleh sebagian masyarakat. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Lord Acton, seorang ilmuwan politik dari Inggris bahwa *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak, maka akan korup secara mutlak pula.[]

Demokrasi dan Keadilan

A. Pendahuluan

KEADILAN merupakan kebajikan utama. Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kebajikan. Keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan “pelaksanaan aktif”, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.

Hal terpenting dan demokrasi yaitu terciptanya keadilan dalam masyarakat. Keadilan sangat indah diucapkan tetapi sangat sulit untuk direalisasikan. Dengan keadilan, maka demokrasi menemukan bentuknya yang sempurna, keadilan tidak hanya memberikan harapan-harapan tetapi keadilan juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh hak yang sama dalam semua bidang kehidupan. Namun dalam menerapkan prinsip keadilan, banyak kendala yang dihadapi, kendala tersebut terutama datang dan pemerintah atau bahkan dan rakyat sendiri.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas dengan singkat gagasan teori keadilannya John Rawls, pluralisme dan keadilan oleh Michael Walzer, dan keadilan dan demokrasi Iris Marion Young dalam hubungannya dengan keadilan yang terjadi di Indonesia. Apakah keadilan sudah terimplementasikan di Indonesia? Setidaknya pertanyaan tersebut akan menjadi titik tolak dalam tulisan singkat ini.

B. Pembahasan

ADA tiga gagasan umum tentang teori demokrasi John Rawls, yaitu pertama, menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan berhak untuk memimpin. Dalam hal ini

Rawls menekankan pentingnya “nilai fairness dalam kebebasan berpolitik”. Kedua, kebebasan dasar dimana masyarakat harus memilih. Dan ketiga, berharganya prinsip mayoritas. Karya Rawls dalam *A Theory of Justice*, sering menekankan bekerja berdasarkan moral dan filosofi politik. Rawls juga menekankan tentang hak, hak menurut pandangan Rawls merupakan bagian dan keadilan.

Gagasan pokok dari John Rawls yaitu teori keadilan di mana Rawls mengatakan keadilan adalah kebajikan utama dalam situasi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Karena itu dalam masyarakat yang adil, kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.

Rawls menyebut teorinya dalam “*a theory of justice*” dengan “*justice as fairness*”. Rawls menyebutkan bahwa ada dua prinsip keadilan yaitu; prinsip pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas seluruh sistem yang luas dan sama dalam kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang. Prinsip kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: (a) memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi kesempatan yang *fair*.

Teori keadilan yang digagas oleh Rawls sangat penting dan sangat cocok untuk kondisi Indonesia. Sebagai negara yang sedang mengalami demokratisasi, Indonesia meski menerapkan nilai-nilai demokrasi yang salah satunya yaitu keadilan. Keadilan harus berlaku bagi semua warga negara, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Keadilan jangan hanya menjadi jargon semata, tetapi harus direalisasikan dengan cara-cara yang diinginkan oleh rakyat.

Rakyat tidak semata-mata hanya menjadi objek dari politik, tetapi rakyat harus menjadi subjek dan sekaligus menjadi objek bagi keadilan. Masalah yang berkembang di Indonesia yaitu terlalu banyak kesenjangan yang terjadi antara orang miskin dengan orang kaya. Yang terjadi bahwa orang miskin tidak pernah mendapatkan keadilan yang nyata, keadilan hanya menjadi angan-angan dan utopis. Menjadi angan-angan karena keadilan tidak pernah didistribusikan kepada orang yang miskin, sedangkan utopis karena keadilan itu susah dan tidak akan terealisasikan untuk rakyat. Tetapi keadilan itu hanya untuk orang-orang kaya.

Biasanya prinsip keadilan disandingkan dengan prinsip persamaan. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk ambil bagian dalam pemerintahan, dan untuk determinisme mengatasi proses konstitusional yang hukumnya sudah establish. Semua warga negara dewasa memiliki hak memilih dengan fair, bebas dan secara teratur dalam mengikuti pemilu. Masyarakat harus diberi kebebasan untuk memilih partai politik, dan ide tentang oposisi loyal-partai oposisi untuk siapapun adalah merupakan bagian yang belum ada dalam lingkaran kekuasaan yang menerima dan menghormati konstitusi dan proses politik.

Tiga poin penting yang menjadi perhatian yaitu nilai keadilan untuk kebebasan berpolitik, memilih dan memotivasi, dan hakekat versus instrumen membenaran dan demokrasi. Keadilan tidak hanya menjadi instrumen, tetapi keadilan harus nyata dan dapat

dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sulit memang menerapkan keadilan bagi semua warga negara, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk menerapkan keadilan di Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang rakyatnya makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh UUD.

Ide nilai keadilan dalam kebebasan berpolitik bertitik tolak bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses, paling tidak pada hak formal ke kekuasaan publik. Hak untuk mendapatkan hak formal sama halnya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berdiri untuk memerintah. Rawls percaya bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Tetapi Rawls juga konsen terhadap ketidaksamaan dalam kekayaan, dalam prakteknya menunjuk pada ketidaksamaan dalam memperoleh akses kekuasaan politik.

Rawls memberikan prioritas pada persamaan dalam kebebasan dasar, termasuk hak untuk mendapatkan kekuasaan politik, dan Rawls memperkenalkan bahwa ketidaksamaan dalam ekonomi dapat menunjukkan pada ketidaksamaan dalam hak partisipasi politik. Ini merupakan pemikiran yang radikal dan jalan yang dramatis dalam menentukan bahwa kebebasan politik memiliki hak yang sama bagi semua orang.

Keadilan dapat juga di realisasikan dengan cara memberikan hak kepada mayoritas dan apa yang menjadi keinginan mayoritas adalah hak. Lalu kelompok mayoritaslah yang menentukan dalam pembuatan keputusan. Namun juga ada alternatif lain yaitu minoritas juga bisa melakukan pembuatan keputusan. Bahwa prinsip minoritas akan kembali pada pandangan Rawls yang mengklaim bahwa tujuan dari demokrasi adalah efisiensi legislasi.

Sebagai negara yang mengalami transisi menuju demokrasi, Indonesia sudah dan sedang menerapkan prinsip mayoritas. Dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik dalam pemerintahan, panlemen atau dilingkungan rakyat, prinsip mayoritas selalu dipakai

untuk mengatasi kebuntuan politik. Seolah-olah prinsip mayoritas sudah menjadi kebiasaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun prinsip mayoritas ini bukanlah yang terbaik, tetapi bisa diterima oleh rakyat Indonesia.

Rawls menolak pendapat Plato yang anti terhadap prinsip mayoritas. Bahkan Rawls mengatakan bahwa pembuatan keputusan secara mayoritas merupakan prosedur untuk mengumpulkan informasi yang mengambil tempat untuk suatu kelompok mendapatkan keputusan kolektif. Perbedaan individu menghasilkan perbedaan pengalaman, keahlian, pandangan dan suatu kelompok membuat keputusan yang lebih dapat diterima. Kemudian untuk lebih efisien dalam pembuatan keputusan, maka suara mayoritas merupakan pilihan yang terbaik.

Untuk mempertahankan argumen prinsip mayoritas. Pengambilan keputusan dalam legislatif atau parlemen. Contohnya pada kongres. Ide ini berdasarkan bahwa jalan untuk berprestasi dan efisiensi legislasi adalah untuk menghasilkan keputusan kelompok yang mendukung rakyat yang berbeda latar belakang dan pengalaman. Sekarang ini tidak ada negara yang tidak menerapkan prinsip mayoritas, kecuali negara komunis atau fasis yang diktator.

Rawls mendukung konsep demokrasi perwakilan karena demokrasi keterwakilan menjadi jalan bagi keadilan. Tirani mayoritas yang dikhawatirkan banyak orang, dalam pandangan Rawls tidak akan pernah terjadi. Karena hak konstitusi telah melindungi prinsip kebebasan. Jadi penguasa tidak mungkin berbuat seenaknya, karena ada kontrol dan undang-undang terhadap penguasa tersebut. Dalam prinsip mayoritas, keadilan sudah dilaksanakan karena mayoritaslah pemegang hak untuk mengatur kelompok masyarakat yang lainnya.

Teoretisi kedua yaitu Walzer. Walzer sangat konsisten terhadap teori politik. Salah satu gagasannya yaitu Theory of Complex Equality. Inti dari ide Walzer adalah bahwa pokok atau inti dan ketidakadilan sosial itu masih dominan. Salah satu contohnya

yaitu uang dapat membeli suara. Kunci dari keadilan sosial, pada dasarnya tidak ada prinsip tunggal tentang pembagian atau prinsip yang tunggal, tetapi agak kompleks dan sangat interpretatif, Teori Walzer tentang keadilan pada saat yang sama bisa disebut Teori Demokrasi Sosial

Di Indonesia. ketidakadilan itu masih nampak jelas dan bahkan cenderung terstruktur. itu terjadi pada rakyat kelas bawah. Uang juga masih memiliki kuasa besar yang mampu membeli apa saja dan siapa saja. Indonesia masih menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ketidakadilan sosial. Ketidakadilan itu membawa malapetaka bagi rakyat karena yang diuntungkan dari ketidakadilan yaitu segelintir orang saja.

Michael Walzer rnenghabiskan energinya untuk mewujudkan pergerakan sosial baru, Walzer mendemonstrasikan pemikirannya yang berkaitan dengan kebebasan bagi perempuan, persamaan hak kulit hitam, respek terhadap kaum gay dan lesbian. Pemikirannya memang terbatas dan lokal, demokrasi partisipatori pada dasarnya dapat dilakukan kapan saja. Walzer juga menekankan pentingnya ide partisipasi politik.

Walzer mengungkapkan ide tentang 'complex equality'. Dua pemikir besar yang menjadi contoh yaitu Blaise Pascal dan Marx, berkesimpulan bahwa untuk memperoleh kekuasaan bisa dengan melakukan tirani, karena tirani merupakan karakter alamiah. Namun Walzer menolak pandangan Pascal dan Marx. karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam demokrasi. Demokrasi tidak mengenal tirani, baik secara alamiah ataupun disengaja.

Bahwa prinsip keadilan bentuknya sangat plural, bahwa perbedaan barang-barang sosial didistribusikan dengan alasan yang berbeda, prosedur yang berbeda dan oleh agen yang berbeda dan bahwa semua perbedaan dalam memahami sosial goods merupakan produk sejarah dan budaya partikularisme. Dalam pluralisme juga akan dikenal dengan istilah monopoli dengan mendominasi.

Monopoli merupakan ide bahwa diharapkan barang-barang terkumpul dan berada ditangan kelas tertentu. Bahwa penguasaan barang-barang oleh individu merupakan ketidakadilan

Agar terjadi keadilan di Indonesia, setidaknya gagasan Michael Walzer menjadi pertimbangan untuk pemerintah Indonesia yaitu dengan cara melakukan desentralisasi ekonomi, negara kesejahteraan yang kuat, campur tangan terhadap pasar, terbukanya kebebasan masyarakat sipil. Sekolah publik yang independen, pembagian kerja, perlindungan terhadap agama dan kehidupan keluarga, sistem penghargaan publik terbebas dan kepentingan kelas, kontrol terhadap perusahaan, partai politik, perpindahan, pertemuan dan dimungkinkannya debat publik.

Walzer menekankan pentingnya hubungan antara keadilan dan demokrasi. Tidak ada alternatif lain bagi demokrasi. Bahwa prinsip petunjuk bagi distribusi sangat penting karena complex equality berada dalam bidang politik, bukanlah kekuasaan yang harus dibagi, tetapi kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Setiap warga negara sangat potensial untuk berpartisipasi dan potensial untuk menjadi politisi.

Dalam hal ini Walzer mengemukakan betapa pentingnya partisipasi politik yang kuat dan desentralisasi dalam gagasan kekuasaan politik, dia melangkah secara langsung mengembangkan deliberatif teori, salah satu teori yang dikemukakan oleh Habermas, Walzer dipengaruhi oleh ide komunikasi aktif, aturan yang ideal dalam perjanjian, dan petunjuk dalam dialog politik antara orang bebas dengan warga negara yang sama. Demokrasi merupakan jalan atau cara untuk mengalokasikan kekuasaan dan alat legitimasi

Teori complex equality diperlukan untuk memperkuat teori demokrasi warga negara bahwa ini sangat sensitif antara komunitas atau kelompok dengan individu. Seharusnya jangan mendikotomi antara kelompok dari individu karena hanya akan menimbulkan perbedaan tajam dalam politik. Pada prinsipnya demokrasi memberi

kebebasan pada individu atau kelompok untuk berkembang dengan melakukan persaingan yang *fair*.

Pemikir ketiga yang dibahas dalam makalah ini yaitu Iris Marion Young. Young mengemukakan ide tentang emansipatori. Dia juga mengemukakan argumen tentang partisipatori demokrasi dan untuk representasi politik secara langsung untuk menekan kelompok sosial. Dia memberikan saran yang spesifik pada reformasi institusi. Sebagian konsep Young dipergunakan untuk mengembangkan konsep demokrasi deliberatif yang digagas oleh Habermas.

Analisa penting dan Young yaitu persepsi dia tentang adanya ketidakadilan struktural, yang didefinisikan dengan dominasi dan tekanan. Dalam pandangan Young, negara kapitalis mungkin saja lebih manusiawi dan konsep lainnya, tetapi ketidakadilan berlanjut menjadi terstruktur, dan pembuatan keputusan berdasarkan partisipasi dihilangkan. Oleh karena itu, dia mengembangkan konsep demokrasi sebagai partisipatori. Demokrasi partisipatori bertujuan untuk meningkatkan individu untuk mengontrol ekonomi dan institusi sosial.

Demokrasi partisipatori setidaknya memunculkan dua kesimpulan yaitu kebutuhan akan demokrasi yang kuat dan kebutuhan agar demokrasi berbeda berdasarkan pada partisipasi kelompok. Demokrasi tanpa partisipasi, seperti sayur tanpa garam, artinya demokrasi tanpa partisipasi hanya akan menjadikan demokrasi tanpa makna dan hambar.

Ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia memang diakibatkan oleh ketidakadilan struktural, jadi struktur pemerintahan terlalu banyak mendominasi dan menghegemoni rakyat, sehingga rakyat tidak mampu berbuat apa-apa. Rakyat ditindas dan didholimi dengan berbagai macam cara, jika pemerintah mau, sebenarnya ketidakadilan itu sedikit demi sedikit akan bisa teratasi. Yang perlu dibenahi yaitu melakukan reformasi kelembagaan atau reformasi

strukturalis, agar lembaga negara selalu pro pada rakyat yang tertindas.

Young juga berpendapat bahwa dasar persamaan bagi setiap orang yaitu nilai moral. Bahwa terdapat ketidakadilan yang dalam dimasyarakat dan dapat dirubah dengan cara merubah dasar institusional, karena secara struktural sudah ada yang mendominasi. Young mempertimbangkan keadilan dan perspektif apa yang masyarakat lakukan lebih dan yang mereka miliki, dalam term hubungan masyarakat dengan alat produksi lebih simpel dan term distribusi.

Dia menolak pandangan Nozick bahwa mengatasi masalah itu tidak penting, masyarakat membutuhkan sedikit hal untuk bisa hidup survive dan untuk berpartisipasi, tetapi menurut Young, bahwa dia mempertimbangkan proses merupakan bagian penting. Young mengenalkan kebutuhan untuk umum dan pendistribusian sumber-sumber untuk demokrasi partisipatori agar kerja lebih efektif.

Menurut Young bahwa keadilan tidak identik dengan kehidupan yang baik. Karena kehidupan yang baik itu harus memenuhi kriteria (1) pengembangan dan pelatihan untuk menambah kapasitas dan (2) partisipasi untuk menambah determinasi orang melakukan aksi. Bagi Young ketidakadilan itu berupa dominasi dan penindasan. Ketidakaadilan dapat diidentifikasi dengan lima cara yaitu eksploitasi, marginalisasi, hilangnya kekuasaan, budaya imperialisme, dan kekerasan

Ada tiga ciri gagasan dan Young tentang demokrasi partisipatori yaitu pertama, masyarakat harus memiliki hak bicara dalam menjalankan tugas kerja dan dalam memutuskan hubungan dengan pemilik. Prosedur pembuatan keputusan ditempat kerja atau di birokrasi harus dengan cara demokratis. Kedua, partisipatori harus dilakukan oleh kelompok sosial atau bisa juga oleh individu. Dalam teori keadilan yang berkembang di Barat memfokuskan

individu lebih dari pada kelompok. Jadi dalam pandangan Young, kelompok lebih diutamakan dari individu. Ketiga, pendekatan terhadap demokrasi komunikatif,

C. Penutup

GAGASAN tentang demokrasi yang berhubungan dengan prinsip keadilan yang dikembangkan oleh ketiga pemikir tersebut di atas, merupakan gagasan yang sesuai dengan kondisi dimana para pemikir tersebut berada. John Rawls yang membahas tentang teori keadilan. memang merupakan gagasan yang cemerlang, namun gagasan tersebut jika diterapkan di Indonesia mengalami banyak benturan dan kendala. Benturan dan kendala tersebut datang dari pemerintah yang tidak pernah pro terhadap rakyat, Karena pemerintah Indonesia hanya mendukung pada pengusaha kaya yang sebenarnya banyak merugikan negara, Jadi teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls jika diterapkan di Indonesia bagaikan panggang jauh dari api artinya prinsip keadilan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang abstrak dan jauh dari konkret.

Oleh karena itu, agar di Indonesia menjadi lebih adil, setidaknya gagasan Michael Walzer menjadi relevan, bahwa desentralisasi ekonomi sosial meski dikembangkan, negara kesejahteraan yang kuat, campur tangan terhadap pasar, terbukanya kebebasan masyarakat sipil, adanya sekolah publik yang independen, pembagian kerja yang jelas sesuai kemampuan, perlindungan terhadap agama dan kehidupan keluarga, sistem penghargaan publik terbebas dan kepentingan kelas, kontrol terhadap perusahaan, partai politik, perpindahan, pertemuan dan dimungkinkannya debat publik.

Sedangkan Iris Marion Young mengemukakan konsep demokrasi partisipatori yang memberikan kesempatan kepada setiap kelompok atau individu untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini penting, karena demokrasi yang tanpa melibatkan masyarakat,

merupakan demokrasi yang menyimpang. Letak keadilan dalam demokrasi partisipatori adalah setiap orang diberikan kebebasan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seluruh bidang kehidupan. []

Demokrasi dan Para Pengkritiknya

SELAIN memiliki kekurangan, demokrasi juga memiliki keunggulan. Diantara keunggulan proses demokrasi yaitu: Pertama, proses demokrasi meningkatkan kebebasan dalam bentuk yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain manapun. Kebebasan dalam bentuk penentuan nasib sendiri secara individu dan secara bersama. Kedua, proses demokrasi itu meningkatkan pengembangan manusia, tidak kurang dalam kemampuannya untuk melaksanakan nasib sendiri, otonomi moral, dan pertanggung jawaban terhadap pilihan yang dilakukan. Ketiga, proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti (meskipun bukan yang paling sempurna) yang dapat digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang-orang lain (Dahl, 1992:168).

Ideologi demokrasi memang sudah merambah kesemua penjuru dunia. Namun dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh demokrasi, tentu terbuka untuk dikritik dan diperbaiki. Kritik orang terhadap demokrasi yaitu demokrasi hanya menjadi jargon sekelompok orang yang berkuasa, dengan cara mengatasnamakan rakyat. Sekelompok orang yang berkuasa tersebut pada akhirnya akan terjadi oligarki politik.

Dalam demokrasi, rakyatlah yang berdaulat, bukan orang tertentu atau sekelompok orang. Namun pada kenyataannya, dalam demokrasi penguasaan sekelompok orang atas kekuasaan tidak dapat dihindari. Terkadang demokrasi juga hanya menjanjikan sesuatu yang utopis, karena demokrasi belum tentu akan mampu mensejahterakan rakyat. Demokrasi menjual rakyat sebagai objek, padahal rakyatlah yang harus menjadi subjek dalam kekuasaan.

Di negara-negara yang sudah maju, demokrasi berjalan paralel dengan kesejahteraan rakyat. Tetapi di negara-negara dunia ketiga, salah satunya seperti Indonesia, demokrasi hanya menjadi

kedok bagi segelintir orang berkuasa untuk membodohi rakyat yang sudah bodoh dan miskin. Dalam teori demokrasi disebutkan, bahwa faktor ekonomi suatu negara akan menentukan suatu kualitas demokrasi.

Jadi, jika negara dan rakyatnya miskin, maka demokrasi akan berjalan lambat dan cenderung akan mandek. Oleh karena itu, jika demokrasi ingin terlaksana secara fair di Indonesia, maka ekonomi rakyat meski dikembangkan dan penciptaan lapangan kerja harus dibuka untuk menentaskan rakyat miskin yang jumlahnya banyak. Karena tidak mungkin, demokrasi dipimpin oleh kebanyakan orang yang miskin, karena akan mengakibatkan demokrasi yang dipenuhi oleh korupsi dan kecurangan.

Di Indonesia, demokrasi memang sedang menjalalani proses transisi menuju demokrasi. Namun proses ini meski dikawal dan dikontrol, karena jika transisi demokrasi berjalan apa adanya, maka yang akan terjadi adalah kita akan kembali ke otoritarian. Jangan heran, pada suatu saat nanti Indonesia akan kembali pada otoritarian, jika kita tidak mampu mengawal transisi demokrasi menuju demokrasi yang sesungguhnya.

Kehidupan politik Indonesia memang sudah mengalami perubahan pasca Orde Baru. Dengan dibukanya kesempatan kompetisi pemilu bagi partai politik dan dilaksanakannya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengalami demokratisasi. Tapi jangan bangga dulu, karena dibalik hingar-bingarnya politik kepartaian dan pemilu tersebut, tidak merubah nasib rakyat miskin menjadi lebih baik.

Demokrasi hanya menjadi alat untuk justifikasi pemimpin untuk mengelabui rakyat. Tetapi sebenarnya dalam demokrasi, rakyat diberi kebebasan untuk mengontrol pemimpinnya, melalui wakil-wakilnya yang ada di parlemen, kalau merasa tidak tersalurkan aspirasinya, rakyat bisa langsung mengontrol sendiri. Dengan

berbagai macam cara, baik melalui cara yang halus ataupun dengan cara turun ke jalan.

Walaupun demokrasi memiliki kelemahan, namun sampai hari ini tidak ada ideologi alternatif yang mampu menyaingi demokrasi. Diantara sistem yang sudah pernah dicoba di dunia, demokrasilah yang terbaik, walaupun bukan yang paling sempurna. Menurut hemat penulis, tidak peduli system apa yang dipakai Indonesia, demokrasi atau non demokrasi sama saja, asalkan mampu mensejahterakan rakyat, Jadi, yang menjadi titik tolak adalah kesejahteraan bagi rakyat. []

Demokrasi *ala* Rousseau

A. Pendahuluan

MENGENAL tentang demokrasi memang sangat menarik, sebagai sebuah ideologi terbuka yang datang dari Barat, demokrasi mengalami masa-masa kejayaan dan mengalami puncaknya pada masa Yunani dan Romawi. Dalam tulisan singkat ini, penulis hanya akan membahas demokrasi dan seorang filsuf besar abad pencerahan yaitu Jean Jaques Rousseau (dan sedikit membandingkannya dengan pemikir modern).

Sebelum membahas tentang Rousseau, penulis akan sedikit memberikan gambaran tentang demokrasi yang penulis kutip dari Maswadi Rauf. Menurut Maswadi Rauf, ada dua konsep dasar yang menjadi prioritas di dalam mendefinisikan demokrasi, yakni kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Dua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun tegaknya demokrasi (Dahl,1997:5).

Konsep kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan beberapa persyaratan yang penekanannya pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar manusia, persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan pengadilan bebas.

Demokrasi diyakini sebagai sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas pada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasan. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga

kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

B. Kontrak Sosial Menurut Pendapat Rousseau

SALAH satu karya besar Rousseau yaitu *The Social Contract*. Mendapatkan apresiasi yang sangat besar di dunia, karena kontrak sosial yang digagas oleh Rousseau sangat berbeda dengan para pemikir sebelumnya, salah satunya yaitu Tommas Hobbes. Jika Hobbes mengatakan bahwa kontrak sosial yang dilakukan oleh individu merupakan penyerahan secara total kepada negara, sehingga negara dapat berbuat sekehendaknya pada individu tersebut.

Sedangkan kontrak sosial Rousseau menawarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kontrak sosial yang dilakukan individu dalam menyerahkan haknya kepada negara, tidak membuat individu tersebut lemah. Tetapi, justru negaralah yang harus dikendalikan oleh individu-individu yang melakukan kontrak sosial. Dalam hal ini negara tidak menindas seenaknya, dan negara dapat menjaga kebebasan sipil dan politik rakyat sebagai individu (Rousseau, 1986:102).

Menurut Rousseau negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atau istilah-istilah lain yang identik dengannya. Dengan menyerahkan hak-hak kita, individu-individu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Mereka tetap dalam keadaan seperti sedia kala (Suhelmi, 2001:251).

Negara berdaulat karena kehendak rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi, dan menjaga keamanan maupun harta benda mereka. Kedaulatan negara akan

tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum. Bila menyimpang dan kehendak rakyat atau kemauan umum, keabsahan kedaulatan negara akan mengalami krisis. Dari segi ini, teori negara berdasarkan kontrak sosial merupakan antitesis terhadap hak-hak ketuhanan raja. Dalam teori hak-hak ketuhanan raja, kekuasaan dan legitimasinya diperoleh dari Tuhan. Dengan teori kontrak sosialnya, Rousseau mengembalikan sumber kekuasaan dan legitimasinya, dari Tuhan ke manusia.

Rousseau mengumpamakan negara memiliki sepuluh ribu warga. Kekuasaan negara yang merupakan manifestasi dan penyerahan hak, kebebasan dan kekuasaan serta kemauan individu haruslah dilihat secara kolektif dan sebagai suatu lembaga politik yang utuh. Meskipun demikian, setiap individu masyarakat yang merupakan subjek harus dilihat sebagai suatu entitas individual. Bukan sebagai entitas kolektif. Maka setiap orang memiliki akses sepersepuluh ribu dan kekuasaan negara, walaupun ia menyerahkan semua haknya pada lembaga politik itu.

Di sini letak perbedaan pandangan Rousseau dengan Thomas Hobbes, Hobbes berpendapat bila negara telah terbentuk, sebagai akibat dan adanya kontrak sosial, maka negara memiliki kekuasaan penuh yang tidak terikat lagi dengan individu-individu yang melakukan kontrak sosial. Yang terkait dengan kontrak itu adalah individu-individu itu, bukan negara. Jadi, setelah terbentuk, negara dapat berbuat apa saja terhadap individu-individu itu. Dalam pemikiran Hobbes, tidak ada pertanggung jawaban negara terhadap individu.

Kontrak sosial yang digagas oleh Rousseau merupakan pemikiran yang dahsyat pada jamannya dan tentu hingga saat ini masih diagung-agungkan oleh banyak pemikir. Kelebihan kontrak sosial Rousseau terletak pada begitu berdaulatnya rakyat dihadapan

negara. Walaupun rakyat sebagai individu-individu melepaskan hak-haknya pada negara, tetapi rakyat masih tetap memiliki kebebasan untuk mengatun negara.

Kekurangan kontrak sosial Rousseau terletak pada seolah-olah hanya rakyat yang berdaulat. Padahal jika melihat fenomena sekarang, rakyatlah yang banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan negara yang tidak menguntungkan. Di Indonesia saja, rakyat dalam posisi lemah dan sangat tertindas, sehingga rakyat secara individu belum berdaulat, karena masih berada dibawah bayang-bayang negara.

C. Kedaulatan Rakyat

PEMIKIRAN Rousseau yang lainnya yaitu tentang kedaulatan rakyat. Ada hal yang menarik dan perlu dikaji lebih dalam tentang pendapat Rousseau yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Rousseau membatasi demokrasi pada kepemimpinan langsung oleh masyarakat, tidak dipimpin oleh wakil tetapi dilakukan oleh setiap orang. Jika demokrasi dilakukan melalui perwakilan, maka demokrasi tersebut sudah tidak asli lagi (Lipson, 1964:20).

Dalam *Du Contract Social*, Rousseau mendambakan suatu negara atau sistem pemerintahan yang memberlakukan demokrasi secara langsung, yaitu suatu sistem kenegaraan dimana setiap orang atau warga negara, yang jumlahnya tidak terlalu banyak menjadi pembuat keputusan dalam suatu wilayah yang tidak terlalu luas. Rousseau mendambakan negara-negara kota seperti zaman Romawi kuno, atau sistem pemerintahan di desa-desa di Swiss ketika ia masih anak-anak. Di Negara-negara kota seperti itu, rakyat dapat menjadi subjek pemerintahan sekalipun berada dibawah kekuasaan negara. Dengan kata lain, rakyat diperintah dan pada saat yang sama juga rakyat memerintah. Gagasan Rousseau ini sangat menarik, tetapi juga sekaligus menafikan kenyataan

perkembangan penduduk dan semakin kompleksnya struktur sosial politik. Semuanya ini menyebabkan negara yang didambakan Rousseau sulit terwujud dalam kenyataan sejarah. Negara kota akan hanya menjadi khayalan (Suhelmi : 253).

Gagasan Rousseau tentang demokrasi langsung dan tidak mengakui system keterwakilan, merupakan gagasan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Pertumbuhan jumlah penduduk dan kompleksnya perkembangan politik, memiliki konsekuensi bahwa demokrasi bisa dilakukan dengan cara perwakilan. Karena tidak mungkin, dalam suatu negara yang jumlah penduduknya 200 juta melibatkan diri secara langsung dalam membuat kebijakan negara. Maka, jalan yang ditempuh yaitu adanya perwakilan masyarakat yang duduk di dewan perwakilan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak.

Salah satu pemikiran Rousseau yaitu tentang kedaulatan rakyat. Rakyat itu berdaulat dan karena itu negara harus menjadi urusan seluruh rakyat, sebagaimana halnya dalam Republik klasik di Roma dulu. Dalam pandangan Rousseau, kedaulatan rakyat mengimplikasikan dua anggapan. Di satu pihak, penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat. Di lain pihak, tuntutan agar segala kekuasaan yang ada meski identik dengan kehendak rakyat. Jadi negara tidak berhak untuk meletakkan kewajiban atau pembatasan apapun pada rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya sendiri, maka tidak ada pihak manapun yang mempunyai wewenang terhadap rakyat (Suseno, 2003:241).

Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan (*irrepresentability*). Setiap perwakilan yang misalnya melalui pemilihan umum sudah mencampuri identitas antara rakyat dan kehendak negara dan dengan demikian merupakan keterasingan. Maka, Rousseau merupakan pendukung demokrasi langsung.

Penolakan terhadap lembaga perwakilan semacam DPR/MPR tergambar jelas lewat pernyataan sebagai berikut “Tidak seorang pun dapat berbicara atas nama rakyat, menganggap mewakilinya. Utusan hanyalah mandataris rakyat”. Kekuasaan legislatif bukan lagi urusan utama bagi warga. Otoritas Souverain tidak dapat diwakili dan dengan alasan yang sama otoritas itu tidak dapat dialienasi. Jadi otoritas Souverain hanya ada di dalam kehendak umum, sedangkan keendak umum tidak mungkin terwakili; kehendak umum ada atau tidak ada, tidak mungkin setengah-setengah. Anggota majelis perwakilan rakyat, bukan dan tidak dapat menjadi wakil rakyat, mereka hanya mandataris rakyat. Jadi tidak berwenang menetapkan apapun secara definitive (Rousseau, 1989:90-91).

Jika kita bandingkan dengan pemikir-pemikir modern, maka demokrasi langsung yang dikemukakan oleh Rousseau akan sulit dilaksanakan. Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi yaitu suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuanan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Beetham, 2000:5).

Secara konvensional dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik, dimana hak-hak politis dan sipil dijamin oleh hukum.

Pemikiran Rousseau tentang demokrasi langsung hanya angan-angan belaka, karena seperti kita ketahui bahwa demokrasi hanya dipandang dan dinilai serta adanya pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum inilah yang akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan mewakili aspirasi rakyat pemilih. Disinilah letak tidak relevannya pemikiran Rousseau tentang demokrasi langsung. Kebanyakan negara-negara di

dunia, melakukan pemilu sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi yang dilakukan secara tidak langsung.

D. Penutup

PEMIKIRAN Rousseau tentang kontrak sosial dan kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang menarik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala keterbatasan, penulis hanya membahas topik secara singkat tentang kontrak sosial dan kedaulatan rakyat saja. Mohon maaf, jika dalam penulisan makalah ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. []

Dilema Demokrasi

DEMOKRASI selain memiliki kelebihan dan keunggulan, tetapi juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan demokrasi sebagai sebuah ideologi yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia, memunculkan dilema tersendiri bagi demokrasi. Demokrasi tidak hanya disanjung, diagungkan bahkan dimitoskan oleh kebanyakan orang, tetapi demokrasi juga banyak menuai kritik, cercaan, dan olok-olok dari sebagian orang, karena ternyata demokrasi terkadang hanya memihak pada orang dan golongan tertentu.

Walaupun Francis Fukuyama dalam bukunya *The end of History and The Last Man* mengatakan bahwa tidak ada lagi ideologi yang mampu menandingi demokrasi pada saat ini bahkan pada masa yang akan datang. Tapi tetap saja dengan demokrasi, tidak semua orang bisa mendapatkan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi. Jika pernyataan Fukuyama tersebut benar, demokrasi tetaplah bukan sebuah ideologi Barat yang sempurna dan tidak bisa dikritik. Sehebat apapun demokrasi yang dikembangkan akan tetap memunculkan dilema-dilema yang akan mengiringi kebesaran dan kekurangan demokrasi.

Menurut Lipson, ada tiga (3) dilema dan demokrasi yaitu tirani mayoritas, menempatkan orang bodoh dalam kekuasaan dan bahwa filosofi dari demokrasi hanyalah ilusi belaka. Ketiga dilema ini, merupakan kekurangan dan demokrasi yang harus dijawab oleh para pro demokrasi, karena hal ini hanya akan menjadikan demokrasi sebagai ideologi yang cacat, sehingga banyak dari masyarakat akan antipati terhadap demokrasi, yang pada akhirnya demokrasi tidak akan berjalan sesuai yang diinginkannya.

Konsep tirani mayoritas memang sangat menakutkan, karena dalam tirani mayoritas, orang yang memiliki kekuasaan akan menindas yang minoritas dan hal ini sangat bertentangan dengan

demokrasi di mana setiap orang baik mayoritas ataupun minoritas mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan. Dalam demokrasi yang mayoritas, tidak menjamin kelompok yang minoritas mendapatkan hak yang sama dengan mayoritas, bahkan kelompok minoritas bisa saja menjadi kelompok yang termarginalkan dan hanya menjadi pelengkap penderita saja.

Kekuasaan mayoritas juga akan cenderung mempertahankan kekuasaannya dengan hanya memperhatikan kelompoknya tanpa memperhatikan yang lainnya. Dan setiap tipe masyarakat atau pemerintahan membutuhkan kekuasaan dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas akan menyebabkan dan terjadinya tirani mayoritas. Seperti dikemukakan oleh Lord Acton, seorang ilmuwan dari Inggris bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang besar akan korupnya pun besar.

Karena dalam demokrasi semua orang diberi kebebasan yang sama, maka demokrasi juga akan memunculkan orang-orang yang bodoh dapat berkuasa. Jika orang-orang bodoh tersebut berkuasa yang akan terjadi adalah hancurnya sistem demokrasi yang ada, karena orang yang berkuasa tapi bodoh tersebut akan cenderung seenaknya dan tidak mengerti apa-apa. Hal inilah yang menjadi dilema tersendiri bagi demokrasi, disatu sisi demokrasi memberikan peluang yang sama bagi masyarakat, disisi yang lain akan muncul pemimpin yang bodoh yang dihasilkan oleh demokrasi tersebut.

Penulis teringat dengan pernyataan Nurcholis Madjid, ketika diwawancarai setelah gagal dalam mengikuti konvensi capres tahun 2004 dan Partai Golkar, dia mengatakan bahwa dalam demokrasi “setan gundulpun” bisa berkuasa. Karena demokrasi memberi peluang yang sama pada setiap orang, yang akan terjadi adalah orang yang bodoh yang memiliki uang, maka dialah yang akan mendapatkan kekuasaan itu. Begitu juga sebaliknya, orang besar, hebat, dan pintar tidak akan berkuasa jika dia tidak memiliki uang.

Dalam kasus konvensi tersebut, Nurcholis Madjid, orang yang pintar tapi tidak memiliki uang, maka dia dapat dikalahkan oleh orang yang biasa tetapi memiliki uang, ya itulah konsekuensi dari demokrasi.

Dalam demokrasi juga terdapat dasar filosofi demokrasi yang kabur dan hanya sebagai ilusi. Dasar filosofi yang ilusi tersebut memberi peluang pada ideologi alternatif untuk menyerang dan merapuhkan demokrasi. Menurut hemat penulis, karena landasan filosofi demokrasi itu muncul di Barat, maka akan menjadi rapuh jika dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara berkembang di seluruh dunia, karena landasan demokrasi Barat belum tentu cocok dan bisa diterapkan di negara-negara berkembang, yang akan terjadi adalah dilema. Karena demokrasi adalah hasil ideologi impor dari Barat yang dipaksakan ke negara lain.

Kita lihat Irak, bagaimana Irak dipaksa untuk menerapkan dasar demokrasi Amerika dan Irak tidak mau melakukannya, pada akhirnya Irak diserang Amerika dan sekutunya sehingga Irak menjadi negara yang hancur dan tercerai berai hingga saat ini. Dengan landasan demokrasi Baratnya dan alasan demokrasi, Amerika menyerang Irak dan negara lainnya hanya demi kepentingan ekonomi yang dalam hal ini minyak yang dimiliki Irak dan negara lainnya.

Penulis sepakat dengan Malaysia, walaupun Malaysia tidak menerapkan demokrasi, tetapi Malaysia mampu menjadi negara makmur yang menjadi daya tarik tersendiri bagi WNI untuk menjadi TKI disana. Masyarakat Malaysia sangat tegas, ketika diberi pilihan apakah memilih “demokrasi” atau “roti”, maka masyarakat Malaysia memilih roti sebagai lambang kemakmuran dan kelimpahannya. Masyarakat Malaysia sangat cerdas, untuk apa berdemokrasi kalau tidak makmur dan melarat, lebih baik tidak demokrasi tetapi hak rakyat terjamin dan terpenuhi.

Lain halnya dengan Indonesia, walaupun negara ini sedang mengalami krisis yang tidak kunjung selesai, dengan banyaknya

pengangguran, kemiskinan, sekolah mahal, minyak langka, banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme tetap saja memilih demokrasi sebagai ideologi yang dikloning dari Barat. Dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini, tetap saja masyarakat Indonesia masih miskin dan banyak yang hidup tidak layak. Apakah masih perlu demokrasi diterapkan di Indonesia, jika rakyatnya masih miskin dan terbelakang, bukarikah dengan demokrasi yang kita agungkan sekarang rakyat diberi hak yang sama, namun kenyataannya yang terjadi adalah rakyat termarjinal tanpa masa depan yang jelas dan harapan hidup orang Indonesia ini sangat memprihatinkan.

Demokrasi bukan hanya sebagai ideologi yang hanya menjanjikan sesuatu yang ideal saja, tetapi demokrasi harus mampu meyakinkan dan mensejahterakan rakyat. Apa gunanya jika demokrasi yang kita agungkan hanya sebagai konsep yang ideal dan tidak mampu membawa kita pada perubahan untuk mendapatkan kelayakan dan kemakmuran hidup. Bukankah tujuan dan demokrasi adalah terjaminnya setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama, hak hukum, ekonomi, politik, agama, sosial dan lain-lain.

Dilema demokrasi yang ada hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para pro demokrasi untuk tetap meyakinkan setiap orang bahwa demokrasi masih yang terbaik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak mudah memang untuk menjelaskan hal ini, karena sehebat apapun ideologi tetaplah ada kelemahan dan kekurangannya, termasuk dengan demokrasi. Sehebat apapun demokrasi dikembangkan tetaplah memiliki kelemahan, kekurangan, dan dilema yang mengiringinya.

Tetapi dilema demokrasi bisa diatasi, jika memberikan sesuatu yang nyata bagi masyarakat yaitu terjaminnya hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan seperti yang dijanjikan demokrasi. Jika tidak, maka demokrasi tetaplah akan menjadi dilema dan dilema tersebut akan menjadi perdebatan tanpa akhir bagi yang pro dan kontra demokrasi. []

Kelemahan Demokrasi

DEMOKRASI merupakan sistem terbaik yang belum adaandingannya. Dan semua sistem politik yang pernah diuji coba dan diterapkan di dunia, demokrasi tetaplah merupakan sistem politik terbaik dari yang terburuk (Lipson, 1964:251). Menurut Francis Fukuyama, tidak ada ideologi yang dapat menandingi demokrasi dan tidak ada ideologi alternatif lain yang mampu mengalahkan demokrasi (Fukuyama,1992:xi). Dengan kapitalismenya, demokrasi menjadi icon dalam mensejahterakan rakyat dengan konsep welfare statenya.

Selain memiliki kelebihan, demokrasi memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak sesuai dengan nilai pokok demokrasi. Di antara kelemahan demokrasi yaitu kekhawatiran akan terjadinya tirani mayoritas. Karena model demokrasi Westminster menekankan pentingnya suara mayoritas dalam setiap menentukan kebijakan politik. Kekhawatiran tirani mayoritas pernah diungkapkan oleh Tocqueville. Tocqueville mengatakan bahwa dalam demokrasi terbuka kemungkinan akan terjadinya kekuasaan pada mayoritas dan mayoritas tersebut berkuasa dan memerintah dengan jajarannya sendiri (Tocqueville, 2005:392).

Ada tiga keberatan terhadap sistem demokrasi. Pertama, adanya potensi tirani mayoritas terhadap kelompok minoritas. Bahwa tirani terkait dengan tindakan brutal dari kelompok kecil masyarakat dalam kelompok mayoritas dan penyangkalan terhadap hak-hak kaum minoritas. Kemungkinan tirani mayoritas dapat terjadi, setiap tipe pemerintahan memiliki kekuasaan dan kekuasaan dapat disalahgunakan, baik oleh minoritas ataupun mayoritas.

Kedua, demokrasi cenderung untuk menempatkan orang-orang bodoh ke tampuk kekuasaan. Didasarkan pada konsep bahwa hanya sebagian kecil manusia yang mampu memimpin dan bahwa rakyat jelata harus dipimpin, serta benar bahwa seni

pemerintahan memerlukan seseorang yang ahli dan mengerti secara teknis mengenai pemerintahan. Meskipun benar bahwa sebagian besar kasus dominasi pemimpin yang superior akan menimbulkan masalah pada rakyat. Ketiga, demokrasi paling hanya berupa ilusi, kalau bukan kebohongan. Demokrasi hanya utopi belaka atau bahkan lebih buruk adalah suatu kepalsuan demokrasi, menurut argumentasi ini adalah suatu yang berpura-pura membantu dan melindungi minoritas.

Namun tirani mayoritas yang dikhawatirkan oleh Tocqueville dibantah oleh Leslie Lipson. Lipson mengatakan bahwa tirani mayoritas itu tidak akan terjadi, pertama, karena sistem perundang-undangan sudah mapan, dengan sistem undang undang tersebut maka tirani mayoritas bisa dibatasi; kedua, adanya kontrol yang kuat dari masyarakat, masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk mengkritik dan mengontrol penguasa yang memerintah; ketiga, adanya pemimpin yang punya malu atau punya hati nurani.

Perbedaan sederhana antara mayoritas dan minoritas adalah dalam jumlah kuantitas suara dan dapat dipahami bahwa mayoritaslah yang mempunyai jumlah lebih banyak dan lebih besar dan minoritas. Oleh karena itu dalam prinsip mayoritas yang berkembang sekarang ini cenderung mengesampingkan standar kualitas etika sehingga kekuasaan ditangan mayoritas dikhawatirkan terjadi tirani. Dalam prinsip mayoritas setiap dan semua orang bisa menjadi penguasa asalkan didukung dan dipilih oleh mayoritas, karena setiap orang bisa berkuasa, maka orang bejat dan jahatpun bisa menjadi penguasa.

Kelemahan lain dari demokrasi liberal (Model Westminster atau Concensus) yaitu dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Sebagaimana dikutip oleh Leslie Lipson, Rousseau menolak demokrasi yang menerapkan demokrasi sistem perwakilan (indirect democracy). Rousseau beralasan bahwa demokrasi sistem perwakilan yang tumbuh dan berkembang merupakan demokrasi yang tidak asli, demokrasi yang asli adalah demokrasi langsung seperti yang

pernah diterapkan di Athena. Rousseau juga mengatakan bahwa demokrasi perwakilan akan merugikan rakyat, karena rakyat tidak merasa terwakili oleh wakilnya yang ada diparlemen. Wakil rakyat di parlemen memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing dan tidak mungkin bekerja untuk kepentingan rakyat.

Aplikasi empiriknya tirani mayoritas dalam hal ini terjadi pada kasus pengesahan undang-undang partai politik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dimana partai-partai besar yang menguasai suara mayoritas di DPR seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyetujui ambang batas 3 % bagi partai politik untuk mengikuti pemilu 2009. Jadi, partai mayoritas tidak pernah memikirkan partai-partai kecil (minoritas) yang tidak mendapat suara di bawah 3 %.

Keputusan mayoritas partai politik besar untuk memutuskan electoral threshold 3 % merupakan bagian dari keputusan mayoritas yang tiranik. Karena tidak pernah memikirkan apakah keputusan tersebut baik atau tidak dan tidak mendengar suara minoritas partai-partai kecil seperti Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan lain-lain (Nasution, 2006:50). Resiko dan demokrasi berdasarkan mayoritas adalah bahwa keputusan suara mayoritas itu final dan mengikat bagi minoritas.

Contoh empirik lain dan tirani mayoritas adalah terjadi pada sekup pemerintahan. Pemerintah melakukan tirani mayoritas dengan cara membiarkan kasus Lapindo menjadi terlunta-lunta tanpa ada penyelesaian yang konkret terhadap rakyat kecil Sidoarjo. Rakyat kecil Sidoarjo yang terkena lumpur Lapindo sangat tertekan

dan tertindas karena tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dan suara mayoritas di DPR tetap saja tidak mendukung minoritas rakyat Siduarjo.

Tirani mayoritas memang bagian dari kelemahan prinsip pokok demokrasi, demokrasi akan pincang tanpa prinsip mayoritas. Sehebat apapun demokrasi, demokrasi tetaplah memiliki ruang untuk dikritik dan diperbaiki. Tirani mayoritas akan bisa diatasi jika pemimpin yang terpilih secara mayoritas mampu meyakinkan minoritas bahwa pemimpin tersebut memang untuk semua kalangan, bukan untuk kalangan mayoritas saja, tetapi juga untuk kalangan minoritas. Minoritas juga memiliki hak untuk mengontrol yang mayoritas. Agar sistem politik berjalan dengan jalurnya, maka harus ada checks and balances.

Jadi, jika mayoritas yang berkuasa, maka minoritaslah yang harus mengontrol minoritas. Namun terkadang teori tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, terkadang penguasa hanya mementingkan kelompoknya sendiri, sedangkan kelompok lain yang minoritas hanya dijadikan objek penderita saja. Tirani mayoritas juga bisa diatasi bila pemimpin yang terpilih tersebut memiliki hati nurani untuk berdiri dibelakang semua golongan, baik yang minoritas ataupun mayoritas.

Demokrasi juga memberi kesempatan pada orang bodoh yang mayoritas untuk berkuasa. Jika pemerintahan dipimpin oleh orang bodoh yang mayoritas, maka pemerintahan tersebut akan mengalami guncangan-guncangan, karena orang bodoh yang mayoritas tersebut tidak mengerti apa yang harus dilakukannya untuk mensejahterakan rakyat. Contoh konkretnya yaitu orang kaya yang bodoh, tapi memiliki uang banyak, mereka akan terpilih menjadi pemimpin. Contoh ini terjadi di banyak lembaga negara di Indonesia ini. Demokrasi seperti ini adalah demokrasi yang mendewakan uang. Jadi siapapun orangnya, pintar atau bodoh, baik atau buruk, mereka yang memiliki uanglah yang akan selalu

terpilih menjadi pemimpin. Padahal orang yang menjadi pemimpin tersebut tidak mampu melakukan apa-apa alias bodoh. Demokrasi juga menekankan kebebasan individu, tetapi jika individu diberi kebebasan tanpa batas, maka yang akan terjadi adalah *homo homini lupus*. []

Model-Model Demokrasi

DEMOKRASI sebagai ideologi memiliki berbagai macam model. Menurut Arend Lijphart ada dua model demokrasi. Pertama, Westminster democracy dan kedua, model consensus. Kedua model tersebut memiliki keunggulan dan kurangan. Dalam model Westminster democracy yang diunggulkan dalam model ini adalah demokrasi yang berdasarkan prinsip mayoritas. Jadi, mayoritaslah yang berkuasa dan berhak untuk menentukan jalannya pemerintahan.

Kekurangan dan model Westminster ini yaitu kekhawatiran akan munculnya tirani mayoritas. Karena yang berkuasa itu mayoritas, maka kelompok minoritas akan termarginalisasikan. Namun kekhawatiran tersebut dibantah oleh Leslie Lipson, tirani mayoritas itu tidak mungkin terjadi dikarenakan. Pertama, adanya oposisi, dengan oposisi yang kuat, maka penguasa yang mayoritas tidak akan sewenang-wenang menindas yang minoritas. Kedua, adanya partai politik membuat kontrol terhadap penguasa yang mayoritas akan berjalan efektif sesuai dengan mekanisme demokrasi. Ketiga, sistem hukum sudah berkembang, dengan berkembangnya sistem hukum, maka sistem hukum tersebut akan mengatur dan membatasi kekuasaan mayoritas.

Namun pada kenyataannya Westminster democracy yang mengagungkan prinsip mayoritas tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Bahkan kekuasaan mayoritas tersebut, terkadang dipegang oleh segelintir orang. Jadi, pada dasarnya prinsip demokrasi yang berdasarkan mayoritas akan menghasilkan oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang, sekelompok orang tersebut akan berkuasa dan akan mengatasnamakan rakyat.

Model yang lain dan demokrasi yaitu konsensus demokrasi. Kelebihan dan konsensus demokrasi mampu mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat atau partai politik dalam koalisi

untuk membentuk kekuasaan. Pada dasarnya konsensus demokrasi sangat kontras dengan Westminster democracy. Konsensus akan menghasilkan koalisi besar yang akan menghasilkan kestabilan pemerintahan. Dalam model konsensus tidak peduli mayoritas atau minoritas, tidak peduli partai besar atau kecil, tidak peduli miskin atau kaya, semuanya melakukan konsensus politik untuk menghasilkan tata kekuasaan bersama.

Kekurangan dari model konsensus ini adalah tidak menghargai yang mayoritas, karena baik minoritas atau kelompok mayoritas dipandang sama. Hal ini akan mudah menyulut perpecahan dan ketidak stabilan, karena jika dalam konsensus tersebut terjadi konflik, maka yang akan terjadi adalah ketidak kompakkan dan kehancuran. Kekurangan demokrasi model konsensus juga minoritas dapat memveto peraturan perundangan-undangan yang sudah dibuat.

Model konsensus terlalu memikirkan grand koalisi bersama dalam eksekutif. Padahal koalisi yang dibangun, jika tidak sesuai dengan ideologi dan kepentingan antar partai politik akan menimbulkan gesekan-gesekan sehingga akan memunculkan konflik kepentingan. Pembagian kekuasaan juga menjadi penting dalam konsensus demokrasi dan juga dapat menghasilkan kekuasaan politik yang stabil.

Kekurangan dan kelebihan dan model Westminster dan konsensus adalah merupakan bukti bahwa tidak ada model demokrasi yang sempurna, sehingga konsep yang satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Menurut hemat penulis, model demokrasi yang baik adalah model demokrasi yang mampu mensejahterakan rakyat. Karena percuma saja dengan konsep dan model demokrasi yang dipilih, jika tidak mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, model demokrasi yang paling cocok diterapkan dari kedua model di atas yaitu Model Westminster

Democracy karena mengacu pada kekuasaan berdasarkan prinsip mayoritas. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dan beragam suku, ras, dan agama. Jadi, yang mayoritaslah yang berhak untuk berkuasa di Indonesia. Kenapa harus mayoritas? Karena dengan beragamnya suku, ras, dan agama tersebut, diharapkan yang mayoritas akan mampu melindungi minoritas.

Lain halnya jika minoritas berkuasa, maka yang akan terjadi adalah kongkalingkong kekuasaan yang akan merugikan rakyat. Namun penulis juga sepakat dengan model demokrasi konsensus, ada elemen-elemen penting yang bisa dilaksanakan di Indonesia. Seperti mengakui adanya multi-party system. Hal ini sangat cocok dengan budaya politik Indonesia yang majemuk. Namun kita tahu, ada yang tidak cocok dan model konsensus diterapkan di Indonesia, karena dalam model konsensus kelompok yang minoritas bisa memveto undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat secara bersama.[]

Perkembangan Demokrasi

Asal Usul Demokrasi Yunani

DASAR demokrasi diletakan di negeri Yunani Kuno. Bukan hanya sebagai kata, tetapi demokrasi Yunani sebagai suatu sistem dimana pemerintahan pertama diletakan atau didirikan di Yunani antara abad 4 dan 6 Sebelum Masehi, khususnya di negara kota Athena. Sebenarnya Negara lain memiliki gambaran demokrasi yang sudah eksis sebelum Athena. Tetapi 2,5 abad aturan demokrasi di Athena lebih terkonstruksi dan teroperasi dengan baik yang melengglapi suatu pemerintahan yang demokratis, lalu dikenal di negara-negara lain sejak abad 17 Setelah Masehi.

Analisis Tentang Demokrasi di Athena

PADA abad 4 Sebelum Masehi Plato dan Aristoteles mengingatkan dan memanfaatkan observasi pengamatan tentang sejarah Herodotus dan Thucydides. Pertama Sejarah tentang Herodotus, yang mana berisi penjelasan dan evaluasi tentang tiga bentuk pemerintahan, berdasarkan satu pertanyaan, Di manakah kekuasaan tertinggi dilaksanakan? Dia menjawab bahwa kekuasaan tertinggi berada dalam negara, mungkin milik seseorang, sedikit orang, atau bahkan banyak orang atau biasanya disebut monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ada tiga prinsip demokrasi. Pertama, semua orang dipandang sama dihadapan hukum; kedua, partisipasi warga negara dalam membuat hukum; dan ketiga, kesamaan atau kebebasan berpendapat. Sedangkan Herodotus salah seorang intelektual Yunani memiliki argumen yang bertentangan dengan demokrasi, dia simpatik dan memiliki pilihan yang jelas terhadap bentuk demokrasi pemerintahan.

Thucydides sejarawan pada Perang Peloponesia yang terjadi pada 431 - 404 Sebelum Masehi. Perang Peloponesia terjadi sangat sadis antara Athena dan Sparta. Dalam sejarah, Thucydides

menggambarkan keruntuhan dan demokrasi Athena. Pujian tentang esensi demokrasi didasarkan atas laporan dari pidato yang dibuat oleh Pericles, salah satu negarawan terbesar yang dimiliki Athena, pada tahun 431 Sebelum Masehi. Pericles mengidentifikasi demokrasi sebagai pemerintahan oleh beberapa orang sebagai pengganti pemerintahan dibawah sedikit orang.

Setelah Pericles meninggal dunia, kepemimpinan Athena turun dari peradaban puncak jatuh ke level paling rendah dari talenta dan karakternya. Sebenamya Athena hancur atau rusak karena perang. Kehancuran Athena dihasilkan dari kesalahan dan kebanggaan, lalu kekuatan atau kebaikan musuh mereka. Dan penghukuman kehancuran Athena datang dari filsuf besar Plato.

Asumsi dasar dari Plato sangat simple dan penting. Dia mengatakan bahwa kita punya orang-orang perusak di kota, lalu merenggut dan memisahkannya dan membuat pengganti dari beberapa orang ke satu orang? Atau seorang yang baik yang mengikatkan secara bersama-sama dan membuat kesatuan? Tidak, kita tidak dalam demokrasi, kondisi kesatuan tidak dapat dicapai disebabkan prinsip-prinsip berdasarkan sistem. Sebagai contoh pusat dan demokrasi adalah prinsip kebebasan. Dia berargumen bahwa, karena semuanya demi kebebasan, setiap tipe dan pola personality akan berkembang. Keberagaman ini atau variasi dan divisi akan bertemu dalam politik, dengan hasilnya bahwa kesatuan tidak akan dicapai.

Plato lebih lanjut menjelaskan bahwa demokrasi dipengaruhi oleh hal yang merusak persamaan. Prinsip persamaan akan memiliki arti bahwa orang miskin akan membunuh beberapa orang kaya. Sesuai dengan sejarah, beberapa masyarakat dalam demokrasi Yunani muncul pemikiran menentang keamanan oligarki.

Plato menerima pembagian atau klasifikasi pemerintahan dan Herodotus yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Namun Aristoteles murid dari Plato itu menambahkan bahwa kekuasaan

tertinggi meski dipegang oleh suatu komunitas. Aristoteles menambahkan bahwa ada 6 klasifikasi sistem politik, tiga yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi, dan yang ketiga lagi yaitu penyimpangan.

Bentuk yang benar menurut Aristoteles yaitu monarki, aristokrasi, dan polity, atau pemerintahan yang konstitusional. Sedangkan bentuk yang menyimpang atau yang lainnya yaitu tirani dan oligarki. Demokrasi merupakan bentuk kesalahan dari polity. Karena aturan dilaksanakan oleh kelas bawah yang berkuasa berkepentingan pada kelas bawah yang lain. Dengan kata lain kelas bawah yang dominan akan mengangkat mayoritas, bentuk supremasi seperti ini adalah bukan yang ideal karena sedikit orang yang memiliki kemurahan hati mengeksploitasi yang lain, maka oleh karena itu demokrasi akan terjadi penyimpangan.

Hal penting yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu dia memperkenalkan faktor ekonomi dapat juga menjadi kontroversi. Tidak hanya beberapa orang yang membuat aturan dalam demokrasi, tetapi juga orang miskin harus dilibatkan. Karena demokrasi sangat bertentangan dengan oligarki yang mengakui orang miskin dan orang kaya, Aristoteles dapat menunjukkan bagaimana pengaruh dasar lembaga pada pemerintahan demokrasi. Sedangkan dalam oligarki penyaluran hak bagi warga negara berdasarkan basis kekayaan, dan hanya orang kaya yang diijinkan yang menguasai politik, sedangkan demokrasi adalah kebalikan dan oligarki.

Dalam konteks ekonomi dan sosial. Aristoteles ingin menempatkan demokrasi secara ideal. Apa yang menjadi istimewa dan sistem ini? Yaitu bahwa supremasi kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. Siapakah rakyat itu? Rakyat disini adalah orang-orang miskin. Nilai baik apa yang terkandung di dalamnya? Persamaan, kebebasan, dan diakuinya hak mayoritas. Mengapa bisa begini? Persamaan, karena secara materi mereka berada pada level yang sama dalam kepemilikan harta benda. Kebebasan, karena mereka

adalah orang yang bebas (bukan budak), mereka memiliki kebebasan yang khusus. Diakuinya bak mayoritas, karena kelas miskin yang berkuasa jumlahnya banyak dan solidaritas diantara mereka akan dapat menciptakan kekuasaan.

Setelah Aristoteles, spekulasi pemikiran tentang demokrasi berakhir di Yunani. Maka disinilah muncul penulis-penulis pasca Aristoteles yang membahas tentang kriteria demokrasi. Semua penulis Yunani menganalisa bahwa ada tiga (3) hal yang membuat demokrasi di Yunani runtuh. Pertama, kontek sosial, sistem pemerintahan, dan cita-cita para filsuf. Ada tiga kriteria kejatuhan demokrasi di Yunani yaitu;

Tiga Kriteria Demokrasi Yunani

KONTEK sosial: Aturan dilaksanakan oleh orang-orang miskin, mengeksploitasi orang-orang kaya, mengeliminasi perbudakan dan hak milik dikuasai oleh penguasa, kesempatan mengembangkan talenta pribadi, tanpa menghormati status keluarga dan kekayaan.

Sistem pemerintahan: pertimbangan dilakukan oleh publik dan keputusan dilaksanakan oleh warga negara, menghasilkan aturan berdasarkan suara mayoritas, mayoritas kekuasaan diisi oleh orang banyak, atau berdasarkan kesempatan, semua penguasa bertanggung jawab, banyak warga negara yang menjadi juri.

Cita-cita filsuf: Persamaan, persamaan atau kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum, memandang secara negatif pada pemerintahan yang didominasi orang-orang bodoh, kebebasan dan penyesuaian; dipandang negatif sebagai kebebasan yang berlebihan dan kekacauan, kepatuhan pada otoritas hukum dan kepada pejabat resmi, terus-menerus berpartisipasi dalam aktivitas sipil.

Definisi Demokrasi Menurut Hobbes dan Rousseau

KONSEPSI tentang demokrasi mengalami perubahan pada 2000 tahun dan dapat dilihat dan dihubungkan dengan dua pemikir besar

abad 17 dan 18 yaitu Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris dan Jean Jacques Rousseau, seorang filsuf Perancis. Thomas Hobbes memberikan catatan singkatnya tentang demokrasi dalam *Leviathan*. Dia berpendapat bahwa kekuasaan itu mesti diberikan pada satu orang, artinya kekuasaan tidaklah dibagi-bagi, jika kekuasaan terpecah atau terbagi-bagi, maka kekuasaan itu akan hancur. Jika kekuasaan ada ditangan seorang raja, maka parlemen jangan berkuasa, begitu juga sebaliknya jika parlemen berkuasa, maka raja jangan berkuasa. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Dia menerima tiga dasar bentuk pemerintahan masa klasik tetapi terbatas pada definisi demokrasi pada situasi di mana pemerintahan dipimpin secara langsung oleh rakyat.

Munculnya Demokrasi Modern dan Otoritas Individu

PADA saat revolusi Amerika dan Perancis terjadi pada akhir abad ke 18, para pemikir menggagas ulang tentang konsep demokrasi, maka demokrasi digagas untuk merevisi kegagalan demokrasi pada masa klasik. Penggagasan konsep demokrasi ini memunculkan kelahiran konsep demokrasi modern.

Satu poin penting dalam demokrasi modern adalah menekankan pada otoritas individu, jadi individu diberi hak yang seluas-luasnya untuk berkembang. Pertimbangan analisisnya negara memberi hak yang sama pada individu; (a) bahwa masyarakat dalam suatu kesatuan pada dasarnya terdiri dan individu-individu sebagai bagian didalamnya, (b) bahwa individu merupakan bagian masyarakat yang kreatif yang mampu berkumpul bersama-sama.

Individualisme Menurut Pandangan Hobbes dan Rousseau

THOMAS Hobbes berkeinginan memiliki seorang raja yang kuat yang dapat menjaga hak milik dan mengendalikan warga negara. Pemerintahan yang dapat melindungi keberadaan warga negara,

dan tidak memproteksi individu yang tidak setia atau menentang. Hanya individu warga negara yang dapat membuat penentuan. Teori Hobbes dimulai dengan menegaskan kebutuhan pemerintah untuk mengontrol warga negara, dan diakhiri masyarakat meski memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.

Ada dua teori Rousseau yang memiliki dua interpretasi yang berbeda. Pertama, mengkonsentratsikan antara hubungan individu dengan masyarakat; kedua, hubungan individu dengan pemerintahan. Rousseau dengan jelas menyatakan bahwa individu menjadi subordinate dari kelompok. Penggabungan individu kedalam kelompok didukung untuk menghasilkan suatu kebersamaan yang memiliki banyak karakter, memiliki kepribadian umum, kehidupan, dan keinginan. Kedua pemikir tersebut setidaknya sudah menggagas tentang kedaulatan individu yang merupakan modal awal untuk kemajuan suatu peradaban dan bangsa.[]

Rezim Non Demokrasi

SEBAGAI sebuah ideologi yang tidak ada tandingannya, demokrasi menyebar secara massif hampir di seluruh penjuru dunia, sebagian besar negara di dunia mengalami perubahan ke arah demokratisasi. Namun dengan perkembangan dan pertumbuhan demokrasi tersebut, selalu memunculkan lawan dari demokrasi itu sendiri yaitu rezim-rezim non demokratik. Rezim non demokratik akan selalu ada, sebagai penyeimbang dari demokrasi, karena dalam hal apapun selalu ada anomali (kebalikan), begitu juga dengan demokrasi akan ada anomali yaitu non demokrasi.

Penulis coba mengutip pendapat Pierre Bourdieu, Bourdieu menjelaskan bahwa dimana ada afirmasi kekuasaan, maka disitu akan muncul anti kekuasaan. Begitu juga dengan demokrasi, dimana ada rezim demokrasi berkuasa dalam sebuah negara, maka akan selalu ada rezim yang anti demokrasi yaitu rezim non demokrasi. Jadi, sehebat apapun demokrasi, akan tetap ada ideologi penyeimbangannya. Tidak mungkin semua orang akan sepakat dengan demokrasi, oleh karena itu orang-orang yang tidak sepakat dengan demokrasi akan membuat kekuatan anti demokrasi.

Rezim non demokrasi akan muncul dalam partai politik tunggal, militer, dan seorang pemimpin yang dictator (Brooker, 2009:36). Indonesia mengalami masa-masa suram dan mengalami masa non demokratik rezim yaitu pada masa Orde Baru di bawah presiden Soeharto. Dilihat dan dinamika kepartaian, Orde Baru memiliki partai dominan yaitu Golkar yang siap dan selalu menang dan pemilu ke pemilu, sedangkan kedua partai lainnya PDI dan PPP hanya menjadi partai pendukung saja.

Sebagai partai yang dominan di masa Orde Baru, Golkar sangat mendominasi dalam setiap pembuatan kebijakan. Salah satu pendukung kuatnya Orde Baru adalah kuatnya Golkar dalam melakukan back up terhadap pemerintah. Ini sangat berbahaya

karena tidak memberikan peran kepada partai lain, dalam hal ini PDI dan PPP untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah, karena orang-orang dalam pemerintahan merupakan orang Golkar. Tidak adanya partai penyeimbang dalam Orde Baru, membuat Golkar menjadi otoriter dan tidak membuka ruang untuk membuat kekuatan oposisi.

Tipe kedua dan rezim otoriter Orde Baru yaitu kuatnya militer dalam urusan politik dan kenegaraan. Selain Golkar, Orde Baru juga dikuasai oleh militer, karena kita sama-sama tahu bahwa pemimpin Orde Baru Soeharto berasal dan kalangan militer. Militer yang seharusnya profesional dan hanya mengurus masalah-masalah pertahanan dan ketahanan negara, pada masa Orde Baru diberi kuasa lebih untuk terlibat dalam politik dan sangat dominan dalam menentukan setiap kebijakan publik. Dimanapun militer tidak pantas dan tidak tepat terlibat dalam dunia politik, karena militer cenderung otoriter. Oleh karena itu, militer harus dikembalikan ke barak.

Rezim non demokratik Orde Baru juga semakin menjadi-jadi karena ketokohan seorang Soeharto yang otoriter dan anti demokrasi. Pada masa Orde baru, tidak ada yang berani menantang seorang Soeharto, sedikit mengganggu kepentingannya nyawa akan menjadi taruhannya. Soeharto tidak memberi ruang gerak bagi demokrasi, demokrasi pancasila yang diagung-agungkannya hanya menjadi jargon politik semata dan tidak pernah diterapkan sama sekali dalam pemerintahan. Demokrasi Pancasila hanya menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk menindas lawan-lawan politiknya.

Demokrasi pada Orde Baru menjadi barang yang mahal yang sulit untuk direalisasikan. Orde Baru di bawah Soeharto merupakan bagian dan non demokratik rezim yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebagai bagian dan rezim non demokratik, Soeharto mendapatkan kritik tidak hanya dan lawan-lawan politiknya di dalam negeri, begitu juga dengan rezim

internasional di bawah komando Amerika menekan Soeharto untuk melakukan demokratisasi.

Teori non demokratik rezim hanya cocok untuk menjelaskan pemerintahan pada masa Orde Baru yang memang sangat anti demokrasi. Tetapi tidak bisa untuk menjelaskan keadaan Indonesia pasca kejatuhan Soeharto, karena pasca kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik menuju transisi demokrasi. Mudah-mudahan Indonesia kedepan tidak mengalami masa-masa suram di bawah rezim non demokratik yang pemerintahannya dipimpin dengan cara diskriminatif dan totaliter.

□



BAB **DELAPAN**

**Membangun
Indonesia yang Bermartabat**

Sisi Gelap Demokrasi

NEGARA-negara demokrasi modern, tidak hanya mengalami kejayaan demokrasi yang mencapai puncaknya. Puncak dan demokrasi tersebut ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya kapitalisme dunia. Dengan jayanya demokrasi dunia, maka jaya pula kapitalisme dunia. Puncak dan kapitalisme ditandai dengan banyaknya penguasaan ekonomi di tangan orang-orang kaya. Dalam dunia kapitalis yang menang dalam kompetisi akan menjadi kaya, sedangkan yang kalah akan menjadi miskin dan tertindas.

Selain kejayaan yang diperoleh demokrasi, ternyata demokrasi juga mengalami sisi gelap yang kelabu. Demokrasi tidak hanya menyumbangkan kesejahteraan bagi sebagian orang kaya saja, tetapi demokrasi juga memiliki sisi gelap yang tidak bisa dihapus sama sekali. Sisi gelap demokrasi merupakan suatu kewajaran, karena tidak ada ideologi yang sempurna, selalu ada sisi lain yang membuka ideologi tersebut untuk dikritik. Sisi gelap demokrasi tidak bisa dipisahkan dan perjalanan demokrasi itu sendiri, demokrasi berjalan bersama dengan sisi gelap yang dimilikinya. Karena untuk menegakkan demokrasi, meski ada yang dikorbankan.

Sisi gelap demokrasi yang melibatkan pembersihan etnis tertentu terjadi di banyak negara seperti Jerman, Ukraina, Spanyol, Amerika Serikat, Meksiko, Australia dan Afrika (Mann, 2005:70). Demokrasi modern tidak semata-mata menghasilkan negara kesejahteraan seperti yang dijanjikan demokrasi, demokrasi modern juga menghasilkan sisi gelap pembasmian etnis.

Di Jerman, pembasmian etnis Yahudi oleh pemerintahan Jerman merupakan episode perjalanan panjang dan sisi gelap demokrasi. Demokrasi tidak disukai oleh pemimpin Jerman di bawah Nazi, Nazi membasmi siapa saja yang pro terhadap demokrasi. Dengan tidak disukainya demokrasi, maka demokrasi memakan korban banyak orang, dalam sisi gelap dan demokrasi

ternyata demokrasi tidak mampu melindungi rakyat yang pro terhadap demokrasi.

Sedangkan di Indonesia, untuk mencapai demokrasi yang ideal, Indonesia mengalami masa-masa sulit yaitu dengan terjadinya reformasi yang banyak memakan korban anak bangsa, demi untuk mendapatkan hak berdemokrasi, masyarakat Indonesia mengalami masa-masa suram tahun 1998. Memang itulah harga yang harus dibayar untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis yang sesuai dengan cita-cita bersama rakyat Indonesia.

Kasus pembunuhan kiyai di Banyuwangi pada tahun 1999 merupakan bukti nyata bahwa sisi gelap demokrasi itu memakan korban pembasmian terhadap para kiyai. Kiyai dicari, diculik, dan dibantai di depan keluarganya oleh ninja-ninja yang tidak bertanggung jawab. Sampai hari ini kasus pembantaian kiyai di Banyuwangi tidak tuntas. Namun menurut analisa penulis, pembantaian kiyai tersebut dilakukan oleh aktor intelektual yang tidak senang dengan demokrasi yang akan tumbuh di Indonesia pasca reformasi.

Pembersihan etnis dan rakyat yang nyata juga terjadi di Palestina, dimana komunitas Islam dibasmi dan dibantai hingga saat ini. Negara-negara demokrasi Barat tidak ada yang membela terhadap Palestina yang dihancurkan leburkan oleh komunitas Yahudi. Di jaman demokrasi modern seperti sekarang ini, proses pembersihan etnis, pembantaian rakyat akan terus terjadi hingga terciptanya perdamaian yang adil bagi semua komunitas masyarakat.

Di Amerika sendiri, pembasmian etnik suku asli pernah terjadi di negeri kampion demokrasi tersebut. Sekarang walaupun pembantaian etnik sudah tidak ada lagi di Amerika, tetapi diskriminasi terhadap orang kulit hitam di Amerika masih terjadi dan akan selalu terjadi. Amerika yang mengaku sebagai embahnya demokrasi, ternyata dengan sengaja melakukan cara-cara pembantaian dan pembasmian etnik Islam kurdi dan si'ah di Irak.

Demokrasi yang begitu kuat di Amerika, tidak membawa negara tersebut menjadi contoh yang baik bagi negara-negara yang sedang mengalami demokratisasi seperti Indonesia. Justru Amerika sedang mempertontonkan sisi gelap demokrasi mereka dengan membasmi dan menjajah negara lain atas nama demokrasi yang keablasan dan seenaknya sendiri.[]

Mencari Ujung Drama Ahok vs BPK

BEBERAPA pekan ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama seolah tak pernah lepas dari sorotan media massa. Basuki atau lebih kerap disapa Ahok menjadi tajuk utama berita atas beberapa isu.

Yang paling santer adalah terkait Reklamasi Teluk Jakarta, penggusuran Pasar Ikan Luar Batang, serta pembelian lahan RS Sumber Waras. Isu yang terakhir tadi telah menjadi pemicu panasnya hubungan Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014 menyimpulkan bahwa pengadaan lahan RS Sumber Waras tidak melalui proses memadai sehingga berindikasi merugikan Pemprov DKI Jakarta karena kelebihan bayar sebesar Rp191,3 miliar.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah perbedaan persepsi NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) RS Sumber Waras yang sedianya akan dijadikan Rumah Sakit kanker dan jantung itu. BPK menilai NJOP yang telah dibayar Pemprov DKI Jakarta lebih tinggi dari nilai yang seharusnya.

Ini memang problematik, karena BPK mengalkulasi NJOP ini berdasar alamat di Jalan Tomang Utara, sedangkan Pemprov DKI mengalkulasi NJOP merujuk pada alamat di Jalan Kyai Tapa. Selisih NJOP kedua alamat tersebut menjadi pangkal polemik Ahok-BPK ini.

Ditambah dengan suhu politik yang menghangat jelang suksesi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Februari tahun depan, maka tak pelak kasus ini menjadi perbincangan publik. Namun mari kita telusuri dengan jernih, mendudukkan permasalahan secara obyektif tanpa sentimen tertentu.

BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK sesuai tugasnya membuat laporan dan temuan keuangan atas lembaga yang mengelola keuangan negara, lalu menyampaikan laporan dan temuan ke aparat penegak hukum (KPK, polisi, kejaksaan).

Mulanya, Ahok mengaku sudah pernah melaporkan hasil audit BPK ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK pada Agustus 2015 lalu. Namun hingga kini, Ahok mengaku tak ada tanggapan dari majelis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus tahun lalu menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK, dan hingga kini penyelidikan masih dilakukan oleh KPK.

KPK telah memeriksa Ahok (12/04) lalu. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 12 jam. Sampai dengan hari ini belum ada pernyataan dari KPK yang mengarah adanya unsur korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras.

Adalah mengaburkan masalah jika kita hanya berfokus pada argumentasi Ahok dengan BPK, dalam hal ini diwakili oleh Ketua BPK sendiri, Harry Azhar. Karena jika demikian, nuansa politis akan lebih mengental.

Pertanyaan yang perlu diungkap sebetulnya sederhana saja: apakah ditemukan pelanggaran secara hukum dalam selisih NJOP versi Ahok dengan versi audit BPK? Selanjutnya jika benar ada pelanggaran, ke mana aliran selisih dana tersebut? Ini yang harus menjadi fokus perhatian utama.

Cross-check kepada lembaga terkait perlu dilakukan. Untuk mengecek besaran NJOP dapat dilihat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, dapat dicek melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hukum harus menjadi pisau bedah yang mengurai anatomi sebuah polemik yang tidak akan pernah selesai dengan hanya

berargumen di media massa. Hukum juga tidak pilih-pilih, tidak ada unsur suka-tidak suka dalam menelaah persoalan.

Meminjam sebuah ungkapan lama, selalu ada tiga sisi dalam sebuah bangunan cerita: sisi saya, sisi Anda, dan sisi kebenaran. Inilah tugas utama hukum, mengungkap kebenaran.

Sementara bagi kedua pihak yang berseteru, yaitu Pemprov DKI dengan Ahok sebagai punggawanya, dan BPK dengan Harry Azhar sebagai pucuk pimpinannya, semoga keduanya tidak lagi mengumbar pernyataan-pernyataan kontra-produktif yang hanya akan memperkeruh situasi.

Ahok dan Harry Azhar sama-sama sebagai pejabat publik, keduanya bagian dari mesin pemerintahan yang seyogyanya saling bersinergi dalam menjalankan tupoksinya.

Akan lebih elok apabila Ahok maupun BPK dapat saling menahan diri, dan mempersilakan aparat penegak hukum menuntaskan tugasnya.[]

Sengkarut Data Kementerian

PRESIDEN Joko Widodo meradang. Dalam rapat koordinasi teknis (Rakornis) Sensus Ekonomi 2016 di Jakarta (26/04) lalu, Presiden mempersoalkan tentang tidak sinkronnya data antar Kementerian dan Lembaga.

Misalnya data seputar kemiskinan. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing memiliki data tersebut, namun data yang tercantum berbeda antara satu dengan lainnya. Akibatnya, pemerintah menjadi gamang dalam merespon permasalahan terkait.

Beberapa waktu sebelumnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bersilang pendapat mengenai rincian data ketersediaan pangan. Baik Kementan maupun Kemendag bersikukuh dengan data masing-masing.

Kasus lain adalah data tenaga kerja yang berbeda di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja. Kiranya, rentetan kejadian inilah yang memicu kekesalan Presiden Jokowi.

Untuk menghindari simpang siur data lebih lanjut, Presiden akhirnya memutuskan, semua data akan berpusat pada Badan Pusat Statistik (BPS) saja. Presiden menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga tak lagi mengurus data sendiri. Kelak, data yang dipakai harus seragam, yaitu dari BPS.

Tepatkah keputusan ini?

PEMUSATAN data kepada BPS sejatinya mengembalikan marwah BPS sebagai poros pusat statistik. Sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS adalah pihak utama yang menghimpun dan mempublikasikan data atas nama negara. Data dari lembaga/instansi lain hanya sebagai penunjang atau data sekunder saja.

Jika melihat tumpang tindih dan simpang siurnya data yang ada, keputusan ini menjadi semakin relevan. Namun kita juga harus mencermati dimensi persoalan yang melingkupinya. Ada beberapa plus dan minus yang setidaknya penulis lihat dalam persoalan pemusatan data ini. Kelebihan utama pemusatan data adalah hemat anggaran. Sebagaimana disebut sebelumnya, duplikasi data kerap terjadi antar Kementerian/Lembaga. Ketika BPS mengadakan sebuah survei, Kementerian A, B, atau C juga mengadakan survei serupa.

Sudah begitu, hasilnya berbeda pula. Jika hanya BPS yang ditugaskan melakukan survei tersebut, tentunya akan berdampak pada efisiensi anggaran.

Berikutnya adalah masalah kesanggupan BPS sendiri. BPS didirikan tahun 1960 dengan nama Biro Pusat Statistik sebagai lembaga yang mengemban tugas pemerintahan di bidang statistik data.

Pengalaman yang panjang dengan struktur organisasi yang terbentang luas sampai ke daerah-daerah menjadi modal utama BPS. Program pengumpulan data BPS juga sudah sangat established dan tertata. Sensus dan survei oleh BPS dilakukan secara berkala dengan jaringan yang luas, sehingga soal kelengkapan data, BPS masih belum tertandingi.

Pembenahan pelayanan BPS pun belakangan semakin gencar dilakukan. Antara lain dapat terlihat melalui website BPS, dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Tiap laman dibuat seragam dengan tampilan yang makin representatif. Kemudahan dalam mengakses data yang dipublikasikan juga semakin diperhatikan.

Sisi lain, terdapat implikasi yang membuat BPS harus semakin berbenah. Mengerjakan data seluruh Kementerian/Lembaga bukan sebuah tugas ringan. Dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni secara kuantitas dan kualitas, terutama di bidang Kementerian/Lembaga terkait.

Beberapa kementerian menyebut data BPS tidak selalu rinci, hanya mencakup permasalahan di permukaan saja. Di sinilah kolaborasi dan sinergi antara BPS dengan Kementerian/Lembaga mutlak diperlukan.

Yang paling berbahaya adalah intervensi politik, yaitu jika pengumpulan dan penyajian data dilakukan atas dasar selera penguasa saja.

Namun setidaknya Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan berulang kali bahwa ia hanya mau disuguhi data yang riil saja, entah itu kabar baik atau buruk.

Data yang baik adalah data yang strategis, akurat, dan berkualitas. Kuncinya ada pada integritas dan inovasi yang harus diterjemahkan secara sungguh-sungguh oleh BPS dengan bekerja secara cerdas, detail, dan teliti.

Segecap kementerian, lembaga, dan instansi terkait, serta pemerintah daerah juga harus mendukung penuh pergeseran paradigma data ini.

Bola kini berada di BPS. Kita tunggu apakah BPS mampu mengemban amanahnya, yaitu menyajikan data yang baik serta mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Jika tidak, pemusatan data hanya akan menjadi sumber masalah baru.

Pemanfaatan data sebagai acuan sebuah kebijakan memainkan peran yang sangat vital, terlebih di era persaingan global yang semakin kompetitif ini. Data dan informasi yang baik akan menjadi pondasi solid formulasi sebuah kebijakan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tepat sasaran. []

Quo Vadis Munaslub Beringin

AKHIR pekan ini, Partai Golkar menyelenggarakan hajatan besar, yaitu gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali. Terselenggaranya Munaslub Bali merupakan episode pamungkas pasca terbelahnya Golkar dengan dualisme kepengurusan yakni Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie dan Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono.

Munaslub Bali tersebut memiliki agenda utama suksesi pucuk kepemimpinan melalui pemilihan ketua umum partai yang baru. Tercatat 8 calon ketua umum (caketum) yang akan berlaga: Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto dan Syahrul Yasin Limpo.

Sukses tidaknya gelaran Munaslub Bali ini sangat bergantung pada jalannya prosesi pemilihan ketua umum yang baru. Di pundak ketua umum baru inilah, masa depan partai akan diletakkan. Untuk itu, Partai Golkar harus membuktikan bahwa kecakapan dan kepantasan seorang caketumlah yang akan menjadi pertarungan utama dalam kontestasi ini.

Selain cakap dan pantas, tiap caketum juga harus menunjukkan bahwa ia menempuh jalur yang fair dalam menapaki tujuannya. Cara-cara yang tak terpuji dalam menggalang dukungan harus dihindari. Para caketum harus tunduk dan patuh pada rambu-rambu yang telah disepakati.

Di sinilah kredibilitas dan integritas panitia penyelenggara Munaslub akan diuji. Panitia Munaslub hendaknya menjadi wasit yang baik sehingga menghasilkan sebuah kompetisi yang sehat dan demokratis.

Berbagai isu tak sedap mulai dari money politics hingga pertemuan tim sukses dengan pemilik suara di luar forum resmi telah berhembus cukup kencang. Sejumlah laporan pelanggaran

telah disampaikan kepada pihak paling berwenang, dalam hal ini Komite Etik Munaslub.

Komite Etik Munaslub harus menjadi pihak yang netral dan objektif, tidak memihak maupun mendeskreditkan pihak yang berkepentingan dalam munaslub, baik itu Steering Committee (SC), Organizing Committee (OC), pemilik suara (DPD tingkat I dan II, Ormas Golkar), dan terutama caketum Golkar.

Sementara pihak SC dan OC Munaslub juga sepatutnya tidak melakukan manuver tertentu demi kepentingan pribadi semata. Pihak SC sebagai pengarah dan OC sebagai pelaksana merupakan penanggung jawab utama mulus dan tidaknya perjalanan Munaslub Bali ini.

Tugas Berat Telah Menanti

SIAPAPUN yang terpilih menjadi ketua umum yang baru, ia akan mengemban tugas yang berat. Kerja politik yang berliku telah menanti. Sebagai sebuah organisasi, Golkar telah berhasil lepas dari ketergantungan pada sosok individu tertentu. Dan sebagai sebuah partai politik modern, regenerasi kepemimpinan di tubuh Golkar dilakukan dengan mekanisme yang demokratis. Namun, hal ini juga memiliki eksisnya sendiri. Melihat rekam jeaknya, suksesi di tubuh Partai Golkar kerap kali menimbulkan friksi yang berujung pada terbelahnya partai, bahkan sampai berujung pada lahirnya partai politik baru.

Maka dari itu, tugas pertama ketua umum terpilih nanti adalah melakukan konsolidasi internal secara gesit dan masif. Langkah ini merupakan tindakan preventif hadirnya ruang konflik baru. Komunikasi yang luwes dan sikap akomodatif perlu dijalankan, dari pusat sampai ke daerah.

Sebelumnya, dualisme kepemimpinan partai telah menggerus energi dan mengguncang soliditas internal partai. Kisruh ini tidak hanya terjadi di pusat, namun juga menjalar ke daerah-daerah.

Dalam gelaran Pilkada Serentak 2015 misalnya, di banyak daerah pengusungan calon kepala daerah dari Partai Golkar diwarnai dengan sengketa kedua kubu. Akibatnya, hasil yang dicapai Golkar secara keseluruhan tidaklah menggembirakan.

Munaslub Bali ini sendiri diselenggarakan oleh kepengurusan hasil sinergi antara dua kubu yang sempat bersengketa, menandakan bahwa kompromi politik dalam penyelesaian konflik merupakan sebuah keniscayaan. Adalah sebuah hal mustahil untuk menyenangkan semua pihak, namun dengan menyusun kepengurusan baru secara cermat dan representatif merupakan langkah awal yang bijak.

Jika konsolidasi internal ini dapat berjalan mulus, Golkar akan memiliki pondasi kokoh dalam menghadapi tantangan selanjutnya yaitu konsolidasi eksternal. Konsolidasi eksternal terutama berhubungan dengan kiprah Golkar dalam percaturan politik daerah dan nasional. Mesin politik yang solid adalah modal awal untuk menghadapi laga sesungguhnya melalui Pilkada, Pileg, maupun Pilpres pada tahun-tahun mendatang.

Relasi Golkar dengan Pemerintah

TERAKHIR namun tak kalah penting adalah sikap Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebagai partai terbesar kedua di parlemen, posisi Golkar sungguh strategis dalam mempengaruhi kebijakan eksekutif.

Reputasi Golkar sebagai partai politik paling matang serta sarat pengalaman masih menjadi penentu warna perpolitikan nasional. Menarik untuk ditunggu bagaimana pola relasi antara Golkar hasil Munaslub Bali dengan pemerintah yang tengah berkuasa.

Sempat beredar desas-desus bahwa pemerintah melalui berbagai perpanjangan tangan meng-endorse caketum tertentu.

Namun semoga saja itu semua isu belaka, karena intervensi kekuasaan terhadap internal partai politik tidak sesuai dengan kaidah demokrasi.

Presiden sendiri secara langsung maupun tidak telah menyatakan sikapnya untuk menyerahkan sepenuhnya mekanisme yang ada di Golkar, bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan biarlah menjadi konsumsi internal partai sendiri.

Dalam beberapa hari mendatang, kita akan disuguhi babak penting dalam perjalanan Golkar, sebuah penanda era yang akan menentukan arah Golkar selanjutnya.

Munaslub Bali merupakan pertarungan politik krusial, apakah Golkar mampu untuk mengembalikan kejayaannya sebagai partai besar, atau justru selangkah lebih dekat menuju jurang kehancurannya.[]

Refleksi Hari Lahirnya Pancasila

PRESIDEN Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan tiap tanggal 1 Juni untuk diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Mulai tahun depan, 1 Juni juga ditetapkan menjadi hari libur nasional.

Tanggal 1 Juni 1945 bermakna historis tinggi bagi perjalanan bangsa Indonesia. Itulah saat pertama kali kata ‘Pancasila’ berkumandang di sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam forum BPUPKI kala itu adalah, ‘jika menjadi negara merdeka, apakah dasar negara Indonesia?’

Adalah Soekarno, dua bulan sebelum memproklamkan kemerdekaan, yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Meski konsep usulan Soekarno saat itu tidak identik dengan Pancasila yang kita kenal hari ini, benih substansi falsafah bangsa ini mulai ditanamkan: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah falsafah negara kita, yaitu sebuah cara pandang terhadap kehidupan. Pancasila merupakan titik tolak arah pemikiran, sikap, dan perbuatan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai falsafah negara menjadikannya sumber nilai (value) dan keutamaan (virtue). Maka arah hukum, politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya kita digali dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sebuah rumusan yang merupakan buah pemikiran para founding fathers negara kita. Pancasila sebagai ideologi bersifat moderat, sebuah jalan tengah. Ibarat pendulum, ayunannya tidak terlalu kekanan, tidak pula terlampau kekiri. Ini merupakan konsekuensi logis dari karakter serta kemajemukan elemen bangsa Indonesia.

Relevansi Pancasila

MASIH relevankah Pancasila hari-hari ini? Jika kita melihat kondisi kehidupan saat ini, justru nilai-nilai Pancasila seharusnya semakin relevan.

Di tataran domestik, Reformasi 1998 telah membuka gerbang baru dalam arah perjalanan republik ini. Banyak perubahan mendasar pasca reformasi, utamanya dalam kehidupan berdemokrasi.

Di antara cirinya adalah, kebebasan warganegara dalam menyalurkan pendapat dan aspirasi, pemilu yang lebih demokratis, serta adanya *check and balances* kepada penguasa.

Namun harus kita akui juga adanya ekses-ekses negatif pasca reformasi yang berpangkal pada penyalahgunaan kebebasan dalam iklim demokrasi sehingga mengakibatkan menjauhnya masyarakat dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Salah satu yang menonjol dalam kehidupan pasca reformasi adalah tumbuh suburnya ruang bagi sejumlah ideologi yang sebelumnya tidak mendapat tempat sama sekali.

Beberapa di antaranya mengambil bentuk dalam radikalisme agama yang telah dengan terang-terangan menentang Pancasila seagai dasar negara kita.

Pada tataran global, era globalisasi dengan spirit keterbukaan dalam segala bidang juga telah menipiskan sekat-sekat yang dulu berfungsi untuk melindungi identitas nasional.

Dari mulai sekat ekonomi hingga budaya, semuanya kini bak selempar tipis daun bawang.

Dalam kondisi seperti inilah, value dan virtue Pancasila dapat menjadi pondasi dan perisai kokoh bangsa untuk menangkal gempuran ideologi lain, juga sebagai pegangan kuat agar kita tak hanyut terseret derasny arus globalisasi.

Berita baiknya adalah, mayoritas masyarakat Indoensia masih bersepakat dengan Pancasila. Survei BPS tahun 2011 (mengambil

sample 12.000 responden dari 181 kabupaten/kota di Indonesia) menunjukkan, 79,26% responden menyatakan Pancasila masih penting dipertahankan. Sementara 89% masyarakat berpendapat masalah yang dihadapi bangsa kita disebabkan kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Manifestasi Pancasila dalam Kehidupan Nyata

PANCASILA bukan untuk dihafal, melainkan dimanifestasikan dalam kehidupan nyata. Pengajaran nilai Pancasila dalam tataran teori, pembahasan dalam diskursus, seminar maupun simposium, semuanya hanya menjadi slogan kosong jika tak disertai dengan implementasi.

Yang kita butuhkan adalah keteladanan. Sebuah teladan yang baik adalah sumber inspirasi terbesar bagi masyarakat. Masih adakah keteladanan itu? Kiranya dengan penuh optimisme dapat kita jawab 'Iya'.

Di tengah hiruk-pikuk peradaban, pemberitaan negatif yang kerap menghiasi media, selalu ada saja sosok yang dapat menjadi teladan banyak orang.

Beberapa tahun ini contohnya, kita melihat munculnya pemimpin-pemimpin di daerah yang bekerja dengan baik dan menjadi inspirasi bagi masyarakatnya.

Tidak harus menjadi seorang tokoh publik atau pejabat tinggi untuk dapat menjadi inspirasi. Yang terbaru misalnya adalah Briпка Seladi, seorang polisi dari Malang yang menolak untuk mendapatkan nafkah dengan cara-cara tidak terpuji, meski kesempatan untuk itu sungguh terbuka lebar.

Juga Kerry Yarangga, staf pengajar Universitas Cenderawasih Papua yang berkeliling mendatangi rumah-rumah di Timika Papua untuk membantu memasang kelambu tanpa memungut bayaran. Hasilnya, penyebaran wabah Malaria di Kabupaten Timika turun hingga 70%.

Sosok inspiratif dengan sikap dan perilaku yang terbukti selaras dengan nilai Pancasila serta membawa kemaslahatan bagi orang banyak inilah yang harus selalu dikemukakan.

Orang-orang ini dengan nyata membuat Pancasila tidak hanya sebagai imaji, namun juga termanifestasi secara nyata.

Tiada jalan lain untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila kecuali dengan membumikannya. Tidak harus saling menunggu, tiap elemen bangsa memiliki obligasi moral untuk mengkonversi nilai-nilai Pancasila yang telah kita sepakati menjadi wujud nyata dalam perilaku sehari-hari.

Tidak perlu dengan satu langkah besar, lalu terhenti begitu saja. Yang dibutuhkan adalah memulai dengan langkah-langkah kecil namun berkesinambungan. Jika ini sudah menjadi kebiasaan, sebuah way of life, kita akan dapat melestarikan Pancasila secara riil, bukan sekadar hiasan di dinding atau kata-kata dalam buku yang kehilangan maknanya.[]

Menyoal UU Pemilu

PEMILU 2019 masih cukup jauh, tapi ibarat olah raga, gerakan peregangan awal sudah mulai dilakukan. Ini berkenaan dengan revisi Undang-undang Pemilu yang meski belum secara resmi dibahas di DPR, telah menjadi perbincangan cukup hangat. Draf atau rancangan revisi UU Pemilu telah dirampungkan oleh Mendagri dan tinggal menunggu persetujuan dari Presiden. Menurut perkiraan Mendagri, draf ini akan diserahkan ke DPR setelah 17 Agustus mendatang, yaitu setelah masa reses anggota dewan berakhir.

Spirit yang terlihat dari revisi UU Pemilu ini adalah penyederhanaan sistem pemilu. Langkah awalnya adalah rencana peringkasan tiga UU terkait Pemilu menjadi satu UU Pemilu. Ketiga UU tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu.

Kelak, hasil fusi ketiga UU tersebut akan dinamakan UU Penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara simultan pada tahun 2019 adalah sebuah hal baru yang kita sendiri masih gamang dalam mengantisipasi konsekuensi logis aturan mainnya. Ada begitu banyak ruang perdebatan di dalamnya.

Beberapa point utama yang berhembus kencang adalah seputar ambang batas suara parlemen, pencalonan presiden lewat partai politik, serta sistem pemilu legislatif (*proporsional terbuka/tertutup*).

Parliamentary Threshold

YANG pertama adalah wacana kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari angka 3,5% pada Pemilu 2014 lalu. Beberapa pihak menyebut, kenaikan *parliamentary threshold*

ini adalah upaya kongkret untuk menyederhanakan konfigurasi partai politik di parlemen. Satu sisi, pendapat ini sungguh masuk akal. Parliamentary threshold merupakan penyaring efektif jumlah parpol yang dapat melaju ke parlemen. Terlalu banyaknya jumlah parpol akan menjadikan konstelasi politik nasional terlalu terfragmentasi.

Pada sisi lain, jika ambang batas parlemen dikerek naik, ini akan mengecilkan peluang bagi partai baru untuk bisa lolos ke Senayan. Tapi jika menilik ke belakang, rasanya sudah cukup kita bereksperimen dengan jumlah parpol pada pemilu 1999, 2004, dan 2009.

Terlebih, bila dibedah lebih jauh, beberapa parpol yang kini berada di parlemen pun sebetulnya memiliki platform yang serupa tapi tak sama. Entah itu di spektrum nasionalis, religius, atau moderat, kiranya tiga corak itu yang selalu bertahan pada tiap *platform* parpol kita dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Jumlah parpol yang tidak terlampau banyak akan berdampak pada konsolidasi pemerintahan yang lebih efektif dan stabil. Tak salah memang jika menyebut muaranya adalah penguatan atau pemurnian sistem presidensial yang kita anut selama ini.

Pencalonan Presiden dari Partai Politik

ADA usulan bahwa presidential threshold 2019 dapat merujuk ke perolehan kursi pada pemilu sebelumnya, tahun 2014. Tapi logika ini kiranya kurang dapat terima, sebab kondisi ruang-waktu 5 tahun lalu (yang pastinya telah mengalami perubahan) tidak layak untuk dijadikan syarat aturan permainan masa kini. Selanjutnya, apakah mekanisme presidential threshold masih relevan?

Secara politis, kongruensi pihak eksekutif dan legislatif adalah alasan di balik dimunculkannya presidential threshold, sebuah istilah yang sebenarnya tidak dikenal dalam kosakata politik internasional secara umum. Muncul pertanyaan hipotesis, apakah

dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang serentak ini masih relevan untuk menetapkan ambang batas presiden?

Merujuk UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Persyaratan ini masih relevan jika waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres berlangsung secara terpisah.

Penulis berpendapat, secara teknis mekanisme *presidential threshold* menjadi tak lagi relevan bila Pileg dan Pilpres berlangsung secara bersamaan. Basis argumennya juga kuat, yaitu Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Secara logika, ambang batas (*threshold*) telah termanifestasi dalam persebaran suara yang tercantum di dalam pasal tersebut.

Sistem Pemilu Legislatif: Proporsional Terbuka atau Tertutup?

KELEBIHAN sistem tertutup adalah biaya politik yang dapat ditekan dalam kampanye, karena calon pemilih hanya memfokuskan pilihan pada partai politik, bukan calon secara langsung, yang di samping jumlahnya banyak, juga sarat akan politik transaksional. Permasalahannya, sistem proporsional tertutup hanya dapat diterapkan secara ideal jika transparansi mekanisme pencalonan anggota dalam partai politik telah dicapai. Jika menilai secara obyektif, partai politik di Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut.

Hemat penulis, meski memiliki kelemahan, sistem terbuka lebih mewakili spirit berdemokrasi dalam kerangka ruang dan waktu saat ini. Perbaikan secara gradual dapat dilakukan melalui

beberapa pendekatan seperti aturan yang lebih ketat dan edukasi politik kepada pemilih agar tak terjebak pada politik transaksional

Sistem terbuka memang memerlukan ongkos politik yang lebih tinggi, namun itulah harga yang harus kita bayar dalam pembelajaran kehidupan berdemokrasi. Kelak jika pemilih, sistem, serta peserta pemilu telah mencapai fase yang matang, sistem tertutup mungkin dapat dipertimbangkan.

Revisi UU Pemilu kali ini terasa istimewa. Peraturan perundangan ini kelak menjadi aturan main pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, yang untuk pertama kalinya diadakan secara serentak. Eksperimen politik terbaru dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini tentu menarik untuk diikuti.

Aturan yang baik akan ikut menentukan kualitas pemilu yang baik pula. Kualitas pemilu yang baik tentu akan berakibat semakin sehat dan majunya kehidupan berdemokrasi di negara kita.[]

Menagih Janji Nahkoda Baru Partai Golkar

PARTAI Golkar telah memiliki nahkoda baru. Melalui voting tertutup di Munaslub Bali pada Senin (16/5/2016) lalu, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menyisihkan 7 kandidat lainnya.

Berbagai drama politik mengiringi suksesi kepemimpinan di tubuh beringin ini. Mulai dari aroma intervensi kekuasaan yang menguat tajam, latar belakang calon yang diliputi berbagai kontroversi, hingga dugaan terjadinya transaksi politik uang dalam jumlah fantastis.

Namun semua drama tersebut dapat dilalui oleh Setya Novanto. Dalam pemilihan yang sempat diwarnai protes keras dari beberapa kandidat yang menolak mekanisme voting terbuka, Setya Novanto unggul dengan perolehan 277 suara. Menyusul di tempat kedua adalah Ade Komarudin dengan 173 suara.

Secara teknis, pemilihan belum selesai. Dengan perolehan suara kedua kandidat yang mencapai lebih dari 30% tersebut, baik Setya Novanto maupun Ade Komarudin berhak melaju ke putaran kedua. Di luar dugaan, Ade Komarudin memilih untuk mundur, sehingga pertarungan berhenti di satu putaran saja.

Langkah politikus yang kerap disapa Akom ini diambil untuk menghindari peningkatan eskalasi friksi yang dapat berpotensi meruncingkan konflik, sebagaimana preseden pasca suksesi kepemimpinan sebelumnya. Yang paling ekstrem, beberapa konflik internal Golkar berujung pada lahirnya partai baru.

Tercatat 4 partai politik yang masih eksis hingga kini lahir dari rahim Golkar: PKPI (berdiri tahun 1999), Hanura (2006), Gerindra (2008), dan NasDem (2011). Bila dicermati, perpecahan ini diakibatkan karena faktor yang serupa, yakni rekonsiliasi yang tidak berjalan mulus. Variabel utama mengapa rekonsiliasi tidak berjalan dengan baik adalah gagalnya kepemimpinan baru dalam

mengakomodasi aspirasi pihak yang berseberangan. Rivalitas berlarut-larut antara Kepengurusan Munas Bali dengan Munas Ancol merupakan contoh nyata, residunya juga masih hangat.

Adalah sebuah keniscayaan bagi pemenang untuk mengakomodasi para pihak yang telah mendukungnya dalam suksesi kepemimpinan sebuah organisasi. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana pihak pemenang bersikap kepada pihak yang kalah.

Indikator awal yang dapat dilihat adalah bagaimana sang pemenang, Setya Novanto menyusun dan menata personelnnya, baik itu dalam kepengurusan partai maupun konfigurasi di luar partai. Sampai dengan hari ini, Setya Novanto baru mengumumkan penunjukan Sekretaris Jenderal (Idrus Marham), Bendahara Umum (Robert Kardinal), Ketua Harian (Nurdin Halid), disamping juga penetapan posisi Ketua Dewan Pembina (Aburizal Bakrie) melalui aklamasi.

Daftar kepengurusan baru yang lengkap masih dalam proses. Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan tentunya membutuhkan waktu. Setya Novanto harus belajar dari pengalaman pendahulunya. Langkah-langkah politik yang hanya mementingkan syahwat kekuasaan sesaat, terbukti hanya semakin mengancam keutuhan partai.

Dalam hal konfigurasi para kader di Parlemen, tersiar kabar bahwa Setya Novanto telah melakukan kesepakatan dengan Akom selaku Ketua DPR saat ini. Isi kesepakatan tersebut adalah garansi bahwa Setya Novanto tidak akan mengutak-atik posisi Akom sebagai Ketua DPR. Selain itu, para loyalis Akom serta kandidat lain juga akan diakomodasi.

Jika kesepakatan ini dapat dijaga, kiranya ini kabar baik bagi proses rekonsiliasi. Namun bila kesepakatan tersebut hanya janji kosong politik, proses rekonsiliasi terancam kembali ke titik nadirnya.

Hal ini bukan tidak mungkin, karena sebelumnya ketika Setya Novanto bertukar posisi dengan Akom dari Ketua DPR menjadi Ketua Fraksi, juga diikuti perombakan konfigurasi dalam tubuh Fraksi Golkar serta alat kelengkapan DPR. Sejumlah pihak yang dianggap berseberangan dengan kubu Setya Novanto digeser posisinya, digantikan dengan kader yang dikenal sebagai loyalis Novanto.

Sebagai Ketua Umum Golkar yang baru hendaknya Setya Novanto tidak mengulangi tindakan berazaskan ‘basmi bersih’ ini. Seorang pimpinan semestinya mengayomi semua faksi dan mengeliminasi sekat-sekat politik yang ada, bukan malah menegaskan keberadaannya.

Masa bakti kepengurusan Munaslub Bali ini juga singkat, yaitu dari 2016 hingga 2019 saja. Sejumlah pekerjaan rumah telah menunggu untuk diselesaikan Setya Novanto, mulai dari mengkonsolidasikan kader dari pusat sampai daerah, hingga persiapan menghadapi Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden serentak.

Dalam waktu sekitar 3 tahun itu, hasil kerja politik yang optimal mustahil akan dicapai jika komponen dalam tubuh Golkar berjalan sendiri-sendiri. Jika ada perbedaan persepsi, itu sebuah hal lumrah dalam iklim demokrasi.

Alangkah bijak jika nahkoda Golkar yang baru merangkul semua awak kapalnya tanpa dilandasi sentimen tertentu. Dengan itu, kapal Beringin yang sempat nyaris karam terhantam badai konflik akan dapat terus melaju mengarungi samudera politik.[]



BAB SEMBILAN

Pro-Kontra

Pro-Kontra Perppu Kebiri

RABU, 25 Mei lalu Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Perppu tersebut merevisi Pasal 81 dan 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera serta belum mencegah secara signifikan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sebaliknya, secara statistik kekerasan pada anak mengalami kenaikan. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2015 terdapat 2.898 laporan kasus kekerasan anak yang mereka terima di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sebanyak 59,3 persen laporan berupa kekerasan seksual.

Angka tersebut naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 2.737 kasus kekerasan dan 52 persen berupa kekerasan seksual. Di sejumlah daerah lain, didapati trend serupa: angka laporan kekerasan terhadap anak cenderung meningkat di mana kekerasan seksual menjadi varian yang dominan.

Dampak dari kekerasan seksual pada anak ini sungguh merusak. Selain mengancam dan membahayakan jiwa anak, tindakan biadab tersebut juga merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak. Dampak sosialnya, rasa keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat turut terganggu.

Momentum perhatian publik terhadap isu kejahatan seksual kepada anak mencapai puncaknya ketika kasus pemerkosaan terhadap Yuyun (14 tahun) di Bengkulu terekspos. Tindak pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun telah menambah panjang daftar tindak kejahatan seksual pada anak. Kasus Yuyun merupakan puncak gunung es dari persoalan kekerasan pada anak. Kasus serupa yang tidak mengemuka atau menjadi sorotan nasional diduga masih banyak terjadi.

Pro dan Kontra

TERDAPAT suara pro dan kontra pasca penerbitan Perppu ini. Terlebih dengan penitikberatan hukuman yang dinilai tidak serta-merta menyelesaikan masalah.

Harus diakui bahwa akar masalah kekerasan seksual pada anak ini cukup rumit. Untuk kasus Yuyun di Bengkulu misalnya, kemiskinan diduga menjadi faktor dominan. Lokasi tempat kejadian perkara merupakan daerah yang dikenal minus secara ekonomi. Para pelaku merupakan remaja tanggung dan pengangguran.

Ketika melakukan perbuatan bejatnya, pelaku tengah berada di bawah pengaruh minuman keras lokal, dikenal dengan nama tuak. Tuak yang mereka konsumsi dijual bebas dan murah. Satu teko tuak yang berisi sekitar 2 liter hanya dihargai sebesar Rp 5000.

Selain itu, arus deras keterbukaan informasi juga dapat menjadi faktor pemicu lain. Tayangan kekerasan di televisi serta pornografi di internet misalnya, sedikit banyak turut mempengaruhi perilaku sejumlah masyarakat yang belum matang secara mental.

Dalam kasus lain yang melibatkan anak di bawah umur, pelaku merupakan para pedofil. Mereka ini pengidap kelainan orientasi seksual, dan secara klinis menderita penyakit kejiwaan. Menurut penelitian, lebih dari sepertiga pelaku pedofil juga mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya (Lakhani, 2010). Dalam konteks ini, motif psikologis lebih dominan.

Dilihat dari latar belakangnya, mengatasi akar permasalahan kejahatan terhadap anak ini akan memakan proses panjang. Ruang dan waktu yang dibutuhkan juga luas, sehingga keterlibatan segenap elemen masyarakat mutlak diperlukan.

Pendidikan sejak dini, dimulai dari keluarga merupakan pencegahan awal. Hubungan yang sehat, hangat, dan terbuka antara orang tua dan anak menjadi pijakan dasarnya. Berlanjut pada lingkungan sekitar rumah, sekolah hingga ruang publik.

Namun melihat urgensi penanganan, kiranya aspek hukum pada pelaku merupakan respon paling rasional dalam waktu dekat ini. Terkait konteks kegentingan situasi itulah, tindakan pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Pelindungan Anak tersebut rasanya cukup tepat.

Efek jera terhadap pelaku serta efek konsiderasi bagi calon pelaku diharapkan akan menekan angka kejahatan seksual pada anak. Penambahan dan pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan pada anak tentunya merupakan langkah awal.

Hukuman tambahan yang diberikan juga akan diikuti proses rehabilitasi terhadap korban, keluarga korban, serta para pelaku. Sebelumnya, pemberatan hukuman serta semua keputusan dipastikan setelah melalui proses persidangan. Artinya, peraturan ditegakkan tidak hanya menjangkau pelaku tanpa melupakan aspek pemulihan korban serta keluarga korban.

Tiap anak merupakan generasi penerus, yang laksana kertas putih bersih, lembaran-lembarannya harus diisi dengan coretan bermanfaat dan mencerahkan. Negara harus hadir untuk melindungi anak-anaknya dari ancaman coretan-coretan kelim dan buram.[]

Menyoal Revisi UU Pilkada

PADA 2 Juni 2016 lalu, rapat paripurna DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan UU Pilkada.

Cukup banyak pasal yang mengalami perubahan, mulai dari jadwal pelaksanaan hingga ke aspek teknis lain, seperti mekanisme kampanye, sanksi politik uang, larangan penggantian pejabat, pembatalan pencalonan, pelantikan bupati/walikota oleh Presiden, syarat dukungan, kewajiban cuti petahana, konflik internal partai politik, hingga penggunaan e-KTP.

Secara umum terdapat beberapa point revisi yang menjadi sorotan utama berbagai pihak. Di antaranya yaitu syarat dukungan bagi calon perseorangan, kewajiban mundur anggota DPR/DPD/ DPRD ketika maju menjadi calon kepala daerah, sanksi kepada Parpol yang tidak mengajukan calon, serta kewenangan KPU.

Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan

PADA point syarat dukungan bagi calon perseorangan, jumlah minimal syarat dukungan minimal 6,5 persen dan paling banyak 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan aspek verifikasi dukungan juga diperketat. Point inilah yang paling riuh dipersoalkan akhir-akhir ini.

Jika sebelumnya verifikasi dukungan calon perseorangan (melalui KTP) dilakukan dengan metode sampel, kini berubah menjadi metode sensus. Ini dilakukan untuk mencegah adanya dukungan manipulatif sebagaimana terjadi pada beberapa kasus Pilkada sebelumnya di mana diduga banyak terjadi pada calon-calon 'boneka'.

Selanjutnya timbul polemik bahwa Pasal 48 ayat (a) dan (b) tentang verifikasi administrasi itu menyebut KTP yang diperhitungkan hanyalah KTP yang terdaftar di DPT Pemilu

terakhir dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri.

Pendukung calon perseorangan menuding ini merupakan upaya penjegalan hak pemilih muda dalam memberikan suara bagi calon kepala daerah perseorangan. Sebab, banyak data KTP yang telah mereka kumpulkan berasal dari pemilih pemula.

Sementara itu, proses verifikasi administrasi yang disediakan selama 3 hari dan verifikasi faktual selama 14 hari juga dirasa memberatkan calon perseorangan. Untuk itulah, para pendukung calon perseorangan telah bersiap melakukan judicial review atas pasal verifikasi administrasi ini.

Menurut penulis, semestinya pendukung calon perseorangan tidak perlu terlalu reaktif atas verifikasi administrasi ini, karena untuk pemilih pemula sudah diwadahi melalui DP4 dari Kemendagri. Secara teknis, pemegang KTP baru otomatis terdaftar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan masuk dalam DP4.

Verifikasi administrasi selama 3 hari, dan verifikasi faktual selama 14 hari juga dirasa cukup bila benar-benar dipersiapkan secara optimal oleh seluruh pihak yang terkait.

Calon Berasal dari Anggota DPR/DPD/DPRD Wajib Mundur

REVISI lain yaitu bagi anggota DPR/DPD/DPRD yang mencalonkan diri wajib mundur setelah secara resmi ditetapkan oleh KPUD sebagai calon.

Sebelumnya, sempat terjadi tarik-ulur dalam pembahasan point ini. Terdapat perbedaan pandangan akan kewajiban mengundurkan diri bagi anggota parlemen dengan alasan tidak fair, karena petahana sendiri hanya diwajibkan untuk mengambil cuti.

Sebetulnya anggota DPR yang mundur tidak menjadi sebuah persoalan besar, karena toh sejatinya kursi dalam parlemen tersebut

milik parpol, bukan anggota pribadi. Kursi yang ditinggalkan akan ditempati oleh anggota lain dalam parpol tersebut. Mekanisme penggantian anggota DPR juga telah diatur dengan jelas. Artinya, tidak ada kursi yang benar-benar hilang.

Berbeda dengan anggota DPR, kepemimpinan petahana dalam konsistensi jalannya roda pemerintahan sangat dibutuhkan. Belum lagi jika terdapat masa jeda panjang dari proses pencalonan dengan masa berakhirnya jabatan petahana. Sementara itu mekanisme penggantian seorang kepala daerah lebih pelik secara politis dibanding pergantian seorang anggota DPR.

Sanksi kepada Parpol yang Tidak Mengusung Calon

PASAL lain yang menjadi perbincangan hangat adalah terkait sanksi kepada partai politik yang tidak mengajukan calon kepala daerah. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya calon tunggal yang sempat terjadi di sejumlah daerah pada pilkada serentak 2015 lalu.

Satu ayat dalam Pasal 40 UU Pilkada mengatur bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi ketentuan namun tidak mengusulkan pasangan calon, maka parpol atau gabungan parpol tersebut tidak boleh mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

Sanksi ini merupakan terobosan yang positif, karena dalam iklim demokrasi, kompetisi adalah sehat adanya. Jika hanya ada satu pasangan calon, masyarakat tidak akan memiliki opsi lain. Dalam banyak kasus, sebuah kompetisi diperlukan agar pemilih tidak 'terjebak' pada satu calon tertentu.

Kewenangan KPU

SELANJUTNYA adalah Pasal 9A yang mengatur bahwa KPU harus berkonsultasi dengan DPR ketika menyusun peraturan dan

pedoman teknis tahapan Pemilu. Hal ini dipermasalahkan oleh KPU karena forum konsultasi tersebut bersifat mengikat. KPU khawatir hal ini akan mempengaruhi independensi mereka sebagai penyelenggara Pilkada.

Bagian ini memang cukup kontroversial, karena sebagai sebuah lembaga mandiri, seyogyanya KPU sebisa mungkin diberikan keleluasaan penuh dalam membuat produk hukumnya. KPU juga telah menyatakan akan melakukan judicial review atas Pasal 9A ini.

Akan tetapi, rasanya kurang etis jika KPU sendiri yang melakukan judicial review mengingat sebagai lembaga negara, KPU bersama Pemerintah dan DPR pada dasarnya adalah mitra kerja. Akan lebih elok bila hal ini diserahkan kepada masyarakat sipil atau LSM, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendukung calon perseorangan.

Atas judicial review yang akan diajukan, kiranya itu sah-sah saja dan merupakan hak setiap warga negara. Tentunya ini menjadi domain Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berwenang memutuskan apakah peninjauan ulang beberapa Pasal UU Pilkada tersebut layak dilakukan.

Sebuah revisi peraturan perundangan merupakan langkah mencapai perbaikan tata cara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa bergerak dinamis. Kita harapkan, revisi UU Pilkada yang telah disahkan ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas Pilkada serta output yang dihasilkannya. Kualitas Pilkada yang semakin baik akan menjadi modal besar agar kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia menjadi semakin maju dan bermartabat.[]

Menanti Sepak Terjang Tito sebagai Kapolri

PRESIDEN Joko Widodo secara resmi telah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Badrodin Haiti yang dalam waktu dekat memasuki masa purnabakti. Kabar penunjukan Tito sebagai pengganti Badrodin ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin pada Rabu (15/06/2016).

Penunjukan Tito disambut dengan gegap gempita oleh mayoritas publik. Respon positif dari berbagai pihak mengindikasikan ekspektasi tinggi kepada Tito dalam mengemban amanah sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito telah dilaksanakan, disusul dengan pengesahan pencalonan melalui Paripurna DPR pada Senin (27/06/2016) lalu. Kedua proses tersebut juga dilalui Tito dengan mulus tanpa hambatan berarti.

Meski belum definitif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pelantikan Tito sebagai Kapolri akan dilakukan Presiden Jokowi setelah perayaan Hari Bhayangkara 1 Juli 2016.

Menarik sekali mencermati reaksi masyarakat serta politikus akan Komjen Tito. Puja dan puji dilontarkan kepada penerima Adhi Makayasa lulusan tahun 1987 ini, di antaranya bahkan berasal dari pihak yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Semua pujian itu memang beralasan. Tito seorang prajurit *par excellence*, salah satu putra terbaik yang kini dimiliki oleh Polri. Kecerdasan jauh di atas rata-rata, rangkaian prestasi gemilang, serta rekam jejak yang nyaris tak tercela menjadi buktinya.

Isu Senioritas

SATU hal yang menjadi perhatian berbagai pihak adalah mengenai perihal hierarki. Tito 'memotong' regenerasi dengan melompati

sejumlah angkatan di atasnya. Isu senioritas ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak internal dalam tubuh Polri. Beralasankah anggapan tersebut?

Kekhawatiran ini dapat dimaklumi. Sebagai bangsa yang dikenal memiliki kecenderungan kuat paternalistik, usia atau senioritas seseorang menjadi salah satu pertimbangan utama untuk dijadikan panutan atau pimpinan.

Fenomena ini tidak hanya berlaku di Polri, namun juga kerap kita temui pada himpunan lain dalam cakupan yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang lebih tua kita junjung tinggi, biasanya diikuti rasa sungkan untuk mendahului mereka dalam banyak hal.

Tapi dengan mengatakan isu hierarki ini akan menghambat tugas Tito sebagai Kapolri rasanya terlalu berlebihan. Selain memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni, Tito juga terlihat mempunyai pola komunikasi yang baik kepada semua pihak, termasuk pada seniornya.

Indikasi yang dapat menjadi preseden adalah, saat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sejumlah perwira tinggi Polri dari berbagai angkatan turut mendampingi Tito. Dari mulai angkatan tertua yang masih bertugas hingga rekan seusianya hadir untuk memberikan dukungan.

Sebelumnya, Tito mengaku telah sowan ke senior-seniornya, termasuk Budi Gunawan dan Budi Waseso, dua nama yang sempat mencuat ke permukaan sebagai calon kuat Kapolri. Bahkan, Tito juga menemui Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan dirinya.

Ini membuktikan Tito tidak memiliki masalah yang berarti dalam melakukan komunikasi internal, termasuk kepada para seniornya. Dengan gestur komunikasi Tito yang matang dan simpatik, riak-riak yang berpotensi timbul dalam internal Polri kiranya akan dapat diredam sehingga tidak akan menjadi persoalan besar.

Tantangan Terbesar: Reformasi Internal

TANTANGAN utama Tito justru dalam membuktikan visi misi yang diusungnya. Secara umum, rencana program kerja yang diungkap Tito menekankan proyeksi pembenahan internal Polri secara menyeluruh.

Program internal yang menjadi fokus Tito meliputi pembenahan postur organisasi dan sarana-prasarana, sumber daya manusia, kesejahteraan anggota, hingga pelayanan dan kepercayaan publik.

Harus diakui bahwa reformasi di tubuh Polri masih jauh dari optimal. Ini dibuktikan dengan kepercayaan publik yang masih rendah kepada Polri sebagai sebuah institusi penegak hukum. Berdasarkan survei Indo Barometer pada Oktober 2015, kepercayaan publik kepada Polri hanya sebesar 56 persen. Angka ini tertinggal jauh dengan tingkat kepercayaan kepada KPK yang mencapai 82 persen.

Korupsi dan pelayanan publik yang buruk masih menjadi isu negatif yang melekat kuat dalam persepsi masyarakat. Tito berjanji akan membenahi situasi ini dari hulu hingga ke hilir, diawali dengan perbaikan proses perekrutan anggota Polri.

Terkait perekrutan anggota, Tito menekankan evaluasi pengetatan rekrutmen berdasarkan kualitas dan rasio guna mengatasi budaya korupsi, hedonis, dan konsumtif. Adalah sebuah rahasia umum bahwa kultur korup di kepolisian kerap dimulai sejak pendaftaran anggotanya.

Tito juga berjanji akan menempatkan perwira yang berkompeten dan reformis untuk menguatkan proses reformasi internal, bukan sekadar faktor kedekatan tertentu sebagaimana yang lazim menjadi pertimbangan.

Pendekatan kesejahteraan dan pengetatan aturan serta implementasinya bagi anggota menjadi formula Tito untuk menekan korupsi. Ia berjanji akan menuntaskan tunjangan kinerja

remunerasi Polri yang hingga kini masih di angka 57 persen atau baru setengah dari target.

Remunerasi Polri ini terkait erat dengan anggaran, dan Tito memiliki pengalaman dalam bidang ini dengan pernah menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena). Tito juga menyatakan akan membuat Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur soal bisnis anggota Polri. Pasalnya, saat ini peraturan mengenai bisnis anggota Polri dinilai rancu. Tito mengatakan perlu ada mekanisme berupa uji kelayakan apakah bisnis tersebut melanggar atau berpotensi konflik atau tidak.

Mengenai pembenahan eksternal Polri, yang utama adalah penguatan sinergi dengan penegak hukum lain dalam hal ini adalah KPK dan Kejaksaan. Hubungan Kepolisian utamanya dengan KPK yang sempat naik turun, menjadi salah satu pekerjaan besar bagi Tito. Dalam hal ini, ia memang belum teruji.

Isu-isu mayor lain yang akhir-akhir ini mengemuka seperti terorisme, narkoba, intoleransi terhadap kaum minoritas, kekerasan kepada perempuan, hingga kelompok separatis di berbagai daerah seperti Poso dan Papua juga menanti tindakan penyelesaian.

Reformasi menyeluruh dalam sebuah institusi besar seperti Polri tentunya membutuhkan tahapan proses yang panjang dan berliku. Tito berkesempatan untuk menjalankannya, mengingat ia memiliki sebuah privilege yang jarang dimiliki Kapolri pendahulunya yaitu ruang-waktu yang lebih lebar, mengingat masa pensiunnya yang masih sekitar enam tahun lagi.

Rekam jejak fenomenal serta rencana formula kebijakan yang meyakinkan menjadi modal awal Tito menjadi Tri Brata-1. Sungguh tinggi harapan publik untuk Tito. Masyarakat menanti kepiawaian Tito Karnavian demi mewujudkan Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, berintegritas dan mengayomi tanpa diskriminasi.[]

Maju Mundur *Reshuffle* Kabinet

PASCA lebaran, isu *reshuffle* Kabinet Kerja mencuat kembali. Kabar ini merebak setelah Presiden Jokowi secara intens memanggil sejumlah menteri ke istana sepekan terakhir. Beberapa bulan lalu, rumor kocok ulang kabinet sempat mengemuka. Wacana tersebut menghangat pasca bergabungnya PAN dan Partai Golkar ke dalam gerbong koalisi pemerintahan. Seiring waktu, isu *reshuffle* meredup.

Memanasnya kembali isu perombakan kabinet ini menjadi akumulasi dari kasak-kusuk selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah analisis dan kalkulasi dikemukakan, mengapa kali ini *reshuffle* akan dilakukan dalam waktu dekat.

Yang pertama adalah pemenuhan akomodasi bagi PAN dan Partai Golkar yang telah resmi merapat ke Istana. Dukungan tambahan ini telah mengubah konfigurasi politik, utamanya komposisi parpol di parlemen. Tidak ada makan siang gratis, terlebih dalam politik. Jatah menteri dianggap sebagai ganjaran layak bagi kedua parpol tersebut. Selanjutnya, moment kali ini bertepatan dengan evaluasi setahun sejak *reshuffle* jilid I dilakukan pada Agustus 2015 lalu. Presiden tentunya memiliki catatan lengkap terkait kinerja para menteri. Durasi satu tahun dirasa cukup untuk memberikan penilaian dan tinjauan kembali.

Momentum lain adalah terkait pembahasan dan penyusunan APBN-P 2016, juga pidato kenegaraan serta nota keuangan 2017 yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Agustus 2016. Kedua peristiwa tersebut dapat menjadi penanda fase waktu, bahwa jika terdapat perubahan komposisi pembantu Presiden, awak baru dapat langsung mengikuti.

Sah-sah saja jika ada analisis latar belakang *reshuffle* tadi. Yang harus diingat, landasan utama perombakan kabinet hendaknya berkenaan dengan kinerja.

Dikotomi latar belakang parpol atau non-parpol menjadi tidak relevan jika kinerja menjadi pertimbangan utamanya. Jika memang performanya bagus, pertahankan. Bila berkinerja buruk, harus digeser atau diganti, apapun latar belakangnya.

Beberapa parameter 'buruk' yaitu menteri yang menghambat akselerasi kerja, yang lebih banyak kontroversi dibanding prestasi, atau yang bekerja namun tidak sejalan dengan Nawa Cita. Mengukur kerja kabinet hendaknya dilakukan secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan satu-dua variabel saja. Jika ada satu-dua kesalahan namun tidak fatal dan secara umum kinerjanya masih baik, tentu masih dapat ditolerir.

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan klise ini memuat kebenarannya. Sistem pemerintahan Presidensial yang kita anut memberikan wewenang penuh kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya.

Meskipun demikian, jika isu *reshuffle* kabinet terus bergulir liar tanpa kepastian, hal ini akan menciptakan turbulensi politik yang berimbas pada ketidakstabilan ekonomi. Tanpa iklim politik yang kondusif, pasar akan cenderung wait and see, para pelaku usaha tidak akan nyaman dalam menjalankan perannya. Selain itu roda pemerintahan juga tidak akan berjalan secara efektif. Rasa waswas dalam bekerja bukan sebuah situasi yang menguntungkan. Beberapa menteri mengklaim tidak terpengaruh dengan isu *reshuffle*, tapi rasanya itu hanyalah respon diplomatis. Padahal, setumpuk pekerjaan besar telah menanti.

Isu utamanya masih seputar ekonomi dan polhukam. Melambatnya perekonomian global, ancaman defisit anggaran, ketahanan dan harga pangan, serta lesunya sektor usaha di dalam negeri tentunya harus ditanggapi dengan sigap. Di sektor polhukam, isu terorisme, penyanderaan WNI di luar negeri, juga gerakan separatis Papua membutuhkan perhatian ekstra. Sementara itu,

evaluasi mudik maut, kasus vaksin palsu, dan berbagai dinamika permasalahan lainnya juga tak boleh dianggap enteng.

Mudah saja bagi semua pihak untuk mengklaim ‘memperoleh info A1’, atau ‘mendapat bocoran dari istana’, namun sampai Presiden sendiri yang mengumumkan secara resmi, info tersebut masih dalam taraf rumor belaka. Hendaknya semua pihak dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi lebih lanjut.

Meski berpenampilan sederhana, Presiden Jokowi merupakan sosok yang terkadang sukar ditebak. Berulang kali suara dan desakan yang datang dari berbagai penjuru terbukti membuatnya tak bergeming. Ini memberikan Jokowi sense of authority, sebagaimana ia dengan dingin menunjuk Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tunggal.

Reshuffle kabinet jilid kedua, jika memang benar akan dilakukan harus kembali kepada spirit namanya, Kabinet Kerja, di mana performa kerja, bukan kalkulasi lain yang menjadi pertimbangan utamanya. Menteri adalah jabatan politis berdasarkan konfigurasi politik dalam sebuah pemerintahan, namun mewujudkan Zaken Kabinet, yaitu pemilihan menteri sesuai kompetensi dalam bidangnya adalah sebuah hal yang tak dapat ditawar.[]

Birokrasi yang Tak Kunjung Rapi

TERUNGKAPNYA kasus 177 orang calon jemaah haji asal Indonesia yang mencoba berangkat ke Tanah Suci melalui Filipina menjadi keprihatinan yang mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Ke-177 orang itu merupakan korban penipuan biro perjalanan haji illegal yang tergiur saat dijanjikan dapat segera berangkat ke Tanah Suci, mengingat daftar tunggu jalur reguler dapat menembus 20 tahun bahkan lebih.

Daftar tunggu yang demikian panjang ini merupakan konsekuensi dari kuota haji yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Kuota haji Indonesia adalah sekitar 211.000 orang, sedangkan penduduk muslim Indonesia adalah 80% dari total penduduk yang diperkirakan sudah menembus 250 juta jiwa. Itu artinya kuota haji yang diberikan untuk Indonesia hanyalah sekitar 1% dari jumlah penduduk muslim kita. Alhasil, daftar tunggu yang sangat panjang menjadi sebuah keniscayaan.

Kuota haji yang belum memadai itu diperparah dengan adanya pengurangan kuota sebesar 20% menjadi 168.800 orang sejak tahun 2013 sebagai dampak dilakukannya renovasi besar-besaran terhadap kompleks Masjidil Haram yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Walaupun renovasi tersebut ditujukan demi kenyamanan jemaah haji, namun efek pahit yang paling terasa adalah semakin panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia. Padahal, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah mendapat kuota haji terbanyak.

Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji bukanlah mengenai kuota semata. Ditilik dari segi religi, sebagai rukun Islam ke-5, ibadah haji merupakan pengalaman spiritual seorang muslim yang mungkin tidak dapat ditukar dengan apapun sehingga setiap muslim berkeinginan untuk menunaikannya minimal sekali dalam hidupnya. Namun sebagai urusan birokrasi-administrasi,

persoalan haji merupakan urusan publik, dan di sinilah berbagai permasalahan muncul.

Misalnya permasalahan klasik seputar transparansi pengelolaan dana haji. Ongkos Naik Haji (ONH) reguler tahun ini rata-rata Rp 34 juta dan ONH plus berada di kisaran US\$ 8.000. Dengan jumlah calon haji 168.800 orang yang terbagi menjadi reguler sebanyak 155.200 orang dan Haji Plus 13.600 orang, bayangkan berapa banyak dana yang dikelola oleh Kementerian Agama? Belum lagi soal Dana Abadi Umat yang jumlah persisnya tidak diketahui secara luas, kemudian berapa banyak masyarakat umum yang mengetahui bagaimana dana-dana tersebut dikelola?

Padahal UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sudah mengamanahkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan pada 17 Oktober 2014. Sayangnya hingga kini pembentukan Badan yang dimaksud tidak jelas perkembangannya.

Masalah lainnya adalah mengenai visa haji. Terdapat kabar yang menyebutkan adanya kemungkinan calon jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa yang tidak kunjung keluar. Persoalan visa ini bukanlah hal baru sebab terjadi juga pada penyelenggaraan haji tahun 2015 lalu. Ini tentu mengundang pertanyaan bagaimana ketertiban administrasi dijalankan oleh penyelenggara haji? Tidakkah penyelenggara haji belajar dari pengalaman?

Permasalahan yang berulang terjadi dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa keberadaan badan khusus yang berfungsi menyelenggarakan ibadah haji semakin mendesak. Semangat baik ditunjukkan oleh DPR RI yang memasukkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam Prolegnas 2016. Dalam RUU tersebut diatur pemisahan antara regulator, operator dan pengawas. Kementerian Agama diposisikan sebagai regulator dan Majelis Amanah Haji akan berposisi sebagai

pengawas. Hal yang paling menarik untuk ditunggu adalah pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) sebagai operator atau pelaksana disamping perlunya desakan untuk segera membentuk BPKH.

Komposisi seperti di atas bila dapat berjalan sesuai rencana tentu menimbulkan harapan baru terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. BPKH diharapkan dapat mengelola keuangan haji secara profesional, transparan dan akuntabel. BPHI tentu diharapkan dapat membuat perencanaan yang matang, menyelenggarakan ibadah haji secara sungguh-sungguh dan membuat laporan pelaksanaan yang kredibel. Sementara Majelis Amanah Haji haruslah menjadi pengawas yang berintegritas tinggi dan intoleran terhadap segala sesuatu yang bersifat merugikan calon jamaah haji, mengingat penyelenggaraan ibadah haji melibatkan ratusan ribu orang dan penggunaan serta pengelolaan dana yang mencapai triliunan rupiah.

Permasalahannya adalah kapan RUU tersebut disahkan sebagai UU dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan hal-hal baik yang diatur dalam UU tersebut?

Khusus mengenai kuota haji, Presiden beserta para pembantunya wajib untuk menemukan formula terbaik dan melakukan pendekatan berkelanjutan kepada otoritas Arab Saudi hingga dicapai kesepakatan yang menguntungkan para calon jemaah haji supaya daftar tunggu keberangkatan calon jemaah haji dapat dipersingkat secara bertahap hingga ke batas minimal. Permintaan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat menggunakan kelebihan kuota haji yang dimiliki oleh negara lain dalam pertemuannya dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hangzhou, Cina pada 4 September 2016 lalu merupakan langkah positif sebagai upaya untuk mengurangi panjangnya daftar tunggu.

Daftar tunggu yang dapat ditolerir dan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional akan menimbulkan kepercayaan dari

masyarakat luas sehingga kejadian miris seperti yang dialami 177 orang calon jemaah haji pada tahun ini tidak terulang kembali. Perbaikan layanan jemaah haji dalam hal kenyamanan seputar akomodasi seperti kualitas transportasi, penginapan, dan logistik yang dikabarkan meningkat, merupakan hal yang menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Namun demikian, permasalahan lain yang bersifat mendasar dan tak kalah krusial harus segera ditemukan solusinya.[]



BAB SEPULUH

PENUTUP

Penutup

DARI apa yang telah penulis jelaskan di atas kesimpulan yang paling penting adalah terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada DKI Jakarta yang lalu merupakan Pilkada tersengit dan terseru sepanjang masa. Sejarah membuktikan, pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi Presiden Republik Indonesia seperti Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, hampir seluruh kekuatan politik dan energi bangsa dihabiskan dalam pertarungan tersebut.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 memiliki kesamaan dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Kita bisa melihat petahana (incumbent) baik di tahun 2017 atau pun 2012 mengalami kekalahan. Kekalahan incumbent tahun 2012, yaitu Foke-Nara oleh Jokowi-Ahok dikarenakan incumbent merasa kuat, dianggap “arogan”, dan kurang bisa mengontrol lisannya, sehingga dapat dikalahkan oleh pendatang baru Jokowi-Ahok. Begitu pula pada Pilkada 2017, pasangan incumbent Ahok-Djarot sesumbar akan memenangkan pertarungan dalam satu putaran, dianggap “sombong”, dan tidak mampu menjaga lisannya, lalu muncul kasus Al-Maidah ayat 51, yang akhirnya dapat ditumbangkan oleh Anies-Sandi sang kuda hitam.

Perbedaan kedua Pilkada di atas yaitu pada Pilkada 2017 isu SARA sangat terlihat dan menjadi isu yang sensitif yang digunakan untuk menjatuhkan lawan. Salah satu faktor yang menjadi kekalahan Ahok-Djarot adalah karena Ahok telah dianggap menistakan agama. Ahok yang pada awalnya memiliki elektabilitas tidak tertandingi dan dianggap sukses memimpin Ibu Kota, karena kasus Al-Maidah ayat 51 yang menimpa dirinya, harus mengakui keunggulan dan kemenangan pendatang baru Anies-Sandi. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menjaga dan mengontrol lisannya.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 juga banyak bertebaran berita hoax. Hal ini tentu berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Berita hoax tersebut digunakan untuk menyudutkan, memfitnah, menghancurkan, dan juga untuk mengalahkan lawan politik. Berita hoax dapat menjadi sumber bencana, karena isinya berita bohong, kotor, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk menuju kontestasi politik yang sehat dan bermartabat hendaknya masyarakat bijak dalam menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 juga ditandai dengan perang cyber atau perang medsos (media sosial). Para buzzer calon gubernur saling menyerang sehingga tidak terlihat lagi mana yang salah dan mana yang benar. Penggunaan medsos pada dasarnya untuk menaikkan dan meningkatkan citra dan elektabilitas calon gubernur, namun jangan sampai digunakan untuk saling memfitnah dan menebar kebencian. Sudah saatnya penggunaan medsos hanya digunakan untuk kampanye yang damai dan bermartabat.

Selain Pilkada DKI Jakarta, isu Pilkada Aceh yang rawan konflik menjadi perhatian dalam buku ini. Aceh harus kita jaga agar kondusif dan tanpa konflik, sehingga menjadi daerah yang aman, damai, dan menjadi tempat bersemainya persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Ulama dan tokoh-tokoh Aceh memiliki peran yang besar dalam menjaga Pilkada Aceh yang damai tanpa pertumpahan darah.

Provinsi Banten juga menjadi perhatian khusus, karena letaknya berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, di mana incumbent Rano Karno-Embay juga dapat dikalahkan oleh pendatang baru Wahidin Halim-Andika. Masyarakat lebih memilih Wahidin Halim-Andika, karena pasangan calon tersebut dianggap akan mampu membawa Banten ke arah yang lebih baik. Ini juga karena strategi dan kecerdikan Wahidin Halim memilih wakilnya yaitu Andika yang merupakan anak kandung Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten yang memiliki jaringan kuat dan mengakar di Banten.

Pilkada Jawa Barat tahun 2018 nanti sudah ditunggu-tunggu. Jawa Barat menjadi perhatian karena Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar dalam Pemilu. Dalam sejarah Pemilu dan kepartaian di Indonesia, siapa yang menang di Jawa Barat, maka menang secara nasional. Tahun 2004 Partai Golkar menang di Jawa Barat, maka menang juga di tingkat nasional. Tahun 2009 Partai Demokrat juga menang di Jawa Barat dan menang secara nasional. Begitu juga tahun 2014, PDIP menang di Jawa Barat, dan menang pula secara nasional.

Begitu strategisnya pertarungan politik nasional di Jawa Barat, tentu akan berdampak dalam Pilkada yang akan datang. Partai-partai politik akan menempatkan jago-jagonya untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Salah memilih pasangan calon yang diusung, risikonya akan besar. Untuk memenangkan pertarungan, tidak jarang partai politik memasang artis. Artis dalam Pilkada Jawa Barat masih menjadi idola dan menjadi vote getter (pendulang suara). Namun bukan sembarang artis, tetapi artis yang memiliki citra yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Pilkada Jawa Timur tahun 2018 juga tidak luput dari pengamatan. Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di Indonesia. Di Jawa Timur juga terdapat banyak pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama. Banyak lahir ulama dan tokoh nasional dari tempat ini. Pertarungan Pilkada 2018 yang akan datang juga akan diwarnai dengan pertarungan tokoh-tokoh nasional dalam memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. []

Wallahu 'alam bisshowab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Asriandi. *Konstruksi Pemberitaan Pencalonan Abok Sebagai Gubernur DKI JKT (Analisis Framing Detik.com dan Kompas.com Edisi 1-31 Agustus 2016)*. Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Aqsa, Alghifari dan Yunita. *Rekam Jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022*. Jakarta: LBH Jakarta, 2017.
- Bappenas. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP): Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017*. Jakarta: Bappenas, 2017.
- Beetham, David dan Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Brooker, Paul. *Non Democratic Regimes: Theory, Government and Politics*. New York: ST. Martin's Press, 2000.
- Chairiyah, S Zul dan Ujang Komarudin. *Demokratisasi dan Tantangan Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Suatu Analisa Politik Dalam Periode Pemilu Tahun 2009-2019*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2019.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid II* Terjemahan A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Fernandes, Arya. *Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 2019.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. England: Penguin Books, 1992.

- Hasanah, Uswatun P. *Berita Perombakan atau Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016.
- Irzal, Muhammad A. *Strategi Marketing Politik (Studi Atas Kemenangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno Pada Pilkada DKI Tabun 2017)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Kautsar, Ibnu dkk. *Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik Dalam Pemilu*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. London: Yale University Press, 1999.
- Lipson, Leslie. *The Democratic Civilization*. New York: Oxford University Press, 1964.
- Lively, Jack. *Democracy*. Oxford: Basil Blackwell, 1975.
- Macfarlan. *Modern Political Theory*. Norwich: Fletcher and Son Ltd., 1970.
- Marhaens, Danang. 2017. *Strategi Integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Pasca Konflik Dalam Rangka Sukses Pemilhan Kepala Daerah Tahun 2017*. Lampung: Unila.
- Mann, Michael. *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Nasution, Noviantika. *Bobolnya Kandang Banteng: Sebuah Otokritik*. Jakarta: Suara Bebas, 2006.
- Poltracking. *Rilis Survei Poltracking Indonesia: Peta Elektoral Pilkada Jawa Barat Menjelang Pencoblosan. Poltracking: Temuan Survei Periode 18-22 Juni 2018*
- Rauf, Maswadi. "Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal", makalah yang disampaikan dalam lokakarya dengan

tema Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Government Reform in Indonesia dan Universitas Diponegoro pada tanggal 25-27 Maret 2002 di Hotel Patra Jasa Semarang.

- Rawls, John. Dalam April Carter and Geoff Stokes (ed). *Liberal Democracy and its Crisis: Prespective in Contemporary Political Thought*. United Kingdom: Malden, MA: Polity Press, 1998.
- *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rousseau, Jean Jaques. *The Social Contract*. Maurice Cranston Translation. New Zealand: Penguin Books Canata Ltd., 1986.
- Rousseau, Jean Jaques. *Perihal Kontrakte Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Sa'adah, Imroatus. *Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Sanjaya, Andika dkk. Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos Dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika Dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur. *Jurnal Komunikasi Indonesia Volume VI Nomor 2*, Oktober 2017.
- Saphiro, Ian. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Freedom Institute, 2006.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Tocqueville, Alexis de. *Tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Jurnal

- Fatimah, Siti. Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi* Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.
- Hikmawati, Puteri. “Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case”. *Jurnal Negara Hukum* Volume 9 nomor 1 Juni 2018.
- Izad, Rohmatul. Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila. *Penangkalan: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Junaidi, Ahmad. “Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer”. *Jurnal Agama dan HAM* Volume 6 Nomor 1, 2016.
- Nurhasim, Moch. “Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi”, Jakarta: *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 No. 1 Juni 2013.
- Permadi, Bagus. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Studi Tentang Jejaring Mobilisasi Politik Pencalonan Ahok Djarot. *Jurnal Politik Muda* Volume 6 Nomor 1, Januari-Maret 2017
- Ridha, Muhammad. 2016. Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya di tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan. *Jurnal Cosmogov* Volume 2 Nomor 1, April 2016.
- Umar, Musni. “Kampanye Dalam Banyangan Hoaks”. Jakarta: *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, edisi Desember 2018.
- Zuchron, Daniel. “Demokrasi Pasca Pilkada DKI 2017”. Jakarta: *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, edisi April 2019.

Sumber Media

Harian Rakyat Merdeka
Harian Amanah
Antara
Rmol.co
rmoljakarta.com
Republika Online
Jawa Pos
JPNN
SINDOnews.com
OKEZONE.com
Kompas
CNN Indonesia
Indopos
www.netralnews.com
Soksinews.com
Akurat.co
lintasparlemen.com
teropongsenayan.com
Brilio
Suara.com
Jitunews.com
www.satupembaruan.com
peneleh.com
porosindonesia.com
kicaunews.com
beritabuana.co
fraksigolkar.or.id
wartaekonomi.co.id
terkininews.com
legaleraindonesia.com

pojoksatu.id
www.loveindonesia.com
kendaripos.fajar.co.id
indonesia.sfafaqna.com
iphi.web.id

Sumber Foto/Illustrasi/Gambar

1. <http://photo.jpgm.co.id/arsip/normal/2017/02/11/237f590223de817458370837d8242616.jpg>
2. http://www.inhilklik.com/assets/berita/original/148562322-pilkada_unik.png
3. http://rubik.okezone.com/uploads/contents/31356/ilustrasi-kepala-daerah_20150728_074814.jpg
4. <https://cdn.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2016/01/25/655561/670x335/waktu-pemungutan-suara-ulang-pilkada-simalungun-sedang-disusun.png>
5. http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/baliho-tiga-pasang-calon-pilkada-dki-jakarta-terpasang-_161120163720-233.jpg
6. <https://sgimage.detik.net.id/community/media/visual/2017/03/13/69e168dd-0866-4299-99ed-834003fbb226.jpg?w=780&q=90>
7. https://cdn.tempo.co/data/2014/12/29/id_356410/356410_620.jpg
8. <http://assets.kompas.com/data/photo/2016/09/20/2232208ahokjarot780x390.jpg>
9. https://pbs.twimg.com/profile_images/795844051324936192/PvEU8USA.jpg

10. http://www.cahayapapua.com/wp-content/uploads/2015/06/489766_10040806102014_golkar1.png
11. <http://assets.kompasiana.com/items/album/2016/02/16/736980-04350817122014-partai-golkar-56c2b9c8d17a61e804a1f718.jpg?t=o&v=1200>
12. <http://dekandidat.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/golkar.jpg>
13. <http://lintasgayo.co/wp-content/uploads/2014/04/PDIP.jpg>
14. <https://img.okezone.com/content/2015/04/08/337/1130802/penegasan-pdip-partai-ideologis-harus-tertuang-di-kongres-bali-3QggSrU2Ku.jpg>
15. http://www.rumahpan.com/file/content/2016/05/160527082954_rumahpan.jpg
16. <http://acehvideo.tv/wp-content/uploads/2016/08/71Pawai-Pilkada-2017.jpg>
17. <https://img.okezone.com/content/2016/02/04/340/1304794/suara-mantan-gam-dan-partai-aceh-bakal-pecah-di-pilkada-2017-jL3pQvOAJr.jpg>
18. http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/876750/big/066176800_1431656139-deddy_mizwar_2.jpg
19. https://i.ytimg.com/vi/WiKH_FUYB-c/maxresdefault.jpg
20. <https://4.bp.blogspot.com/-Nzn1A17R4-M/V3SANKzyGDI/AAAAAAAAAT7I/h77h2lBAswMNBkoXb6eXXhLECPkTWDLCQCLcB/s1600/jkw1.jpg>
21. <http://www.pikiranmerdeka.co/wp-content/uploads/2016/08/Bendera-Partai-Politik-di-Aceh-Foto-Ist-google.jpg>
22. <http://1000logos.net/wp-content/uploads/2017/02/Instagram-app-logo.jpg>

23. https://image.freepik.com/free-vector/twitter-social-network-icon-vector_652139.jpg
24. https://image.freepik.com/free-vector/twitter-social-network-icon-vector_652139.jpg
25. https://image.freepik.com/free-vector/glossy-social-media-icons-vector-set_659063.jpg
26. <https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/swa.co.id/wp-content/uploads/2013/03/Siswono-Yudo-Husodo1a.jpg>
27. http://news.rakyatku.com/thumbs/img_660_442_inialasan_1464980492rdin.jpg
28. <http://assets.kompasiana.com/items/album/2016/10/07/ppp-57f763085eafbdc70dfdb1ae.jpg?t=o&v=1200>
29. <http://beritamks.com/bm/wp-content/uploads/2015/08/bj-habibie-suararakyatindonesia-org1.jpg>
30. <https://2.bp.blogspot.com/-oi305vVyRwA/WKqbOnabIZI/AAAAAAAAAGcc/biwqC3dvj6UU1tSAA4NcbR0yLDnIfPNwwCLcB/s1600/Anies-Sandi.jpg>
31. https://c2.staticflickr.com/4/3083/2653215812_17e0d39672_z.jpg?zz=1
32. <https://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2016/02/14/664742/670x335/ini-daftar-menteri-yang-layak-dicopot-jokowi-diresuffle-jilid-ii.jpg>
33. <https://mmc.tirto.id/image/2017/01/29/antarafoto-kampanye-akbar-anies-sandi-290117-hma-1antarafoto-kampanye-akbar-anies-sandi-290117-hma-1.JPG>
34. https://gimg.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_auto,q_auto,fl_lossy,w_640/da7phscycl22gbm0paar.jpg
35. <http://poskotanews.com/cms/wp-content/uploads/2016/09/pilkada-selvie-3-pasang-700x400.jpg>
36. <http://assets.kompas.com/data/photo/2016/06/30/142553220160629HER341780x390.JPG>

37. https://www.senayanpost.com/wp-content/uploads/2016/06/70601-kpk-resmi-menahan-anggota-fraksi-demokrat-i-putu-sudiartana-iKM_highres.jpg
38. https://1.bp.blogspot.com/-Fkk-xwr_Uqs/WAIqQGgnPTI/AAAAAAAAAFkE/HAmMcj4M-20qiby2M0ccV-5XNFDzoyhRQCLcB/s640/nusron%2Bwahid.jpg
39. http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/kantor-bnp2tki-_140623092842-524.jpg
40. http://www.bnp2tki.go.id/uploads/images/img_24-03-2016_113358_Gedung_BNP2TKI_dilihat_dari_depan.jpg
41. http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/09/01/57c762563e28c-kapolri-jenderal-tito-karnavian_663_382.jpg
42. <http://assets.kompas.com/data/photo/2016/01/11/1940355IMG-20160111-165458-1452515370315780x390.jpg>
43. <http://palopopos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2016/07/turki-kudeta.jpg>
44. <https://fvanson.files.wordpress.com/2012/04/democracy-logo3.jpg>
45. <https://thumbs.dreamstime.com/x/lady-justice-331315.jpg>
46. http://4.bp.blogspot.com/-nu_SwivmxLA/UGqAn2t7ZI/AAAAAAAAA7M/JVbPZ3aCBL0/s1600/Jean-Jacques+Rousseau.jpg
47. <https://1.bp.blogspot.com/-sQItRKBYFWk/V1i9LAzJVhI/AF1M/6UHLme8lQCgMsuDmmODZs8a4BgUS9HbnACLcB/s1600/Demokrasi.jpg>
48. <http://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/06/tmp-democracy3-ulum-blog-comjpg-1821147071-568cc66b92fd19058b456d.jpg?t=o&v=800>

49. https://pbs.twimg.com/profile_images/516400619251183616/HxQzXVGo_400x400.jpeg
50. http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/demokrasi-ilustrasi-_120409120028-614.jpg
51. <https://cdns.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2016/04/12/692874/670x335/kenapa-demokrasi-parlemerter-mengalami-kegagalan.png>
52. http://3.bp.blogspot.com/-uzuwBTnpEDQ/VqeJJRz8_PI/AAAAAAAAAC7Y/Cx83qepW0RA/s1600/Ciri%2BNegara%2BDemokrasi.jpg
53. https://3.bp.blogspot.com/-4nvJM1AfITk/Vk9dRX_PJtI/AAAAAAAAADg/FMm0wOcrus0/s1600/macam%2Bmacam%2Bdemokrasi%2B-%2Bpresidensial.jpg
54. <https://cdns.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2014/05/16/367563/670x335/bpk-periksa-pns-soal-penyalaran-apbd-lewat-rekening-pribadi.jpg>
55. <http://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/10/versi-dullah-56920542989373b71d12b490.png?v=400&t=o?t=o&v=700>
56. <http://img.bisnis.com/posts/2017/04/25/647625/reshuffle.jpg>
57. <http://assets-a1.kompasiana.com/items/album/2017/03/13/uu-pilkada-553x330-58c5e99f307a61490953bc3d.jpg?t=o&v=800>
58. <http://dbagus.com/wp-content/uploads/2015/09/Pengertian-Korupsi-Kolusi-dan-Nepotisme-1-500x277.jpg>
59. http://www.dreamers.id/img_artikel/64debat-cawagub-dki.jpg
60. <http://ahokfornobel.com/images/why/why1.png>
61. http://cdn0-a.production.liptutan6.static6.com/medias/1167505/big/036050600_1457659527-tHUMBNAIL_2.png

62. http://photo.jpqm.co.id//picture/normal/20160128_215708/215708_996394_DPRD_DKI_gedung_BESAR.jpg
63. <http://www.acehportal.com/wp-content/uploads/2017/02/partai-Golkar-1.jpg>
64. <http://nasional.kini.co.id/files/2017/01/pdip.jpg>
65. <https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2015/11/30/630911/670x335/megawati-terjerat-skandal-korupsi-ratusan-triliun.jpg>
66. <http://cdn-tin.timestechnet.com/images/2016/02/09/4ujGnc.jpg>
67. <http://radarsukabumi.com/nasional/files/2016/05/calgub.jpg>
68. <http://pojoksatu.id/wp-content/uploads/2016/03/Ahmad-Heryawan-dan-istrinya-Netty-Prasetyani.jpg>
69. http://berita.suamerdeka.com/konten/uploads/2015/12/Foto-Diri-Jokowi-120814-wsj-5-683x1024-wpcf_728x413.jpg
70. https://cdn.tempo.co/data/2016/05/17/id_506932/506932_620.jpg
71. <https://3.bp.blogspot.com/-dE-PfWpG8kk/WA84jarfDII/AAAAAAAAAYqg/UdRS3NFuxNUyndFapXI7DkGdzLJjhCIXQCLcB/s1600/DP%2BBBM%2BMaju%2BBersama%2BAnies%2BSandi%2B2.jpg>
72. http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/05/14/57371488e60b5-pembukaan-munaslub-golkar-2016_663_382.JPG
73. <http://cms.beritabatavia.com/gambar/51Setya-Novanto.jpg>
74. <https://www.nasionalisme.co/wp-content/uploads/2016/02/kantor-pusat-kementerian-pertanian-1.jpg>
75. <https://i0.wp.com/s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/swa.co.id/wp-content/uploads/2017/01/Kantor-BPS>

- jpg?fit=470%2C270&ssl=1
76. https://challengepost-s3-challengepost.netdna-ssl.com/photos/production/solution_photos/000/056/847/datas/xlarge.png
 77. https://t4.ftcdn.net/jpg/00/36/03/07/500_F_36030760_rdXJtwEYqXFlgl4wPY1Sj9u8Vau5AQcr.jpg
 78. http://cdn2.tstatic.net/pontianak/foto/bank/images/tito-karnavian_20160615_182325.jpg
 79. https://riau.kemenag.go.id/file/file/FOTO/kemenag_ri.jpg
 80. <http://soksinews.com/upload/upload/265674144196.jpg>
 81. <http://indowarta.com/wp-content/uploads/2016/09/Ahok.jpg>
 82. <https://www.fancygreetings.com/public/images/cardimages/Happy-Idul-Adha.jpg>